



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN**

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN, KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN, SERTA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN;
DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN;
DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*; DAN
KETUA HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin/27 Januari 2020
Waktu	: Pukul 13.30-22.20 WIB
Tempat	: Ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara	: Melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 12 Desember 2019, membahas: 1. Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan Ketersediaa Pupuk Bersubsidi dalam Menghadapi Musim Tanam; 2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Tani; dan 3. Lain-lain.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 42 dari 54 orang Anggota Komisi IV DPR RI dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

10 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. Ir. Effendi Sianipar
3. Ono Surono, S.T.
4. H. Yadi Srimulyadi
5. Ir. Mindo Sianipar
6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
7. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
8. DR. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
9. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
10. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

6 Dari 8 orang Anggota

1. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
2. Firman Soebayo, S.E., M.H.
3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
4. Ichsan Firdaus
5. Budhy Setiawan
6. Ir. Panggah Susanto, M.M.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endor Hermono, M.B.A.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Khilmi

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

5 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Sri Wulan, S.E.
4. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
5. Yessy Melani, S.E.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
4. Edward Tannur, S.H.
5. Drs. H. Ibnu Multazam.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos, M.Si.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

4 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syarifudin, S.T., M.M.
2. Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
4. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah.

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
3. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
5. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T. (Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
6. Aas Asikin Idat (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*);
7. Bakir Pasaman (Direktur Utama PT Pupuk KALTIM);
8. Mulyono Prawiro (Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang);

9. Husni Achmad Zaki (Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda);
10. Racmad Pribadi (Direktur Utama Petrokimia Gresik);
11. Bambang Eka Cahyana (Direktur Utama PT Pupuk Kujang); dan
12. Ahmad Solichin Lutfiyanto (Sekretaris Himpunan Bank Milik Negara).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian beserta jajaran,

Yang terhormat Deputi II Bidang Koordinasi Pangan Pertanian dan Kementerian Koordinator Perekonomian beserta jajarannya,

Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company* beserta Direksi lainnya,

Yang terhormat Ketua Himpunan Bank Negara beserta jajarannya, serta hadirin yang kami hormati,

Jadi Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Ketua Himpunan Himbaranya tidak hadir karena ada kepentingan. Tetapi yang bersangkutan memberikan kuasa penuh kepada Sekretaris yang namanya Pak Amat Solihin Lukhtianto. Ini surat resminya. Jadi ini kan kita minta Himbara hanya minta penjelasan, bagaimana mekanisme ... pupuk tersebut.

Mengawali rapat hari ini marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan jadwal rapat Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 maka hari ini Senin, 27 Januari 2020 Komsis IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen dan Kepala Badan Kementerian Pertanian plus Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Direktur Utama PT Pupuk Holding, dan Himbara.

Menurut laporan Sekretariat Anggota yang sudah menghadiri dan menandatangani 31 Anggota terdiri dari 9 Fraksi. Sesuai dengan Tata Tertib Rapat Dengar Pendapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat Dengar Pendapat hari ini kita mulai pukul 13.30 dan akan diakhiri pada pukul 17.00. apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ada pun susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan para Dirjen, Kepala Badan, Deputi, Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding, dan Himbara;
3. Pendapat Anggota Komsis IV;
4. Jawaban para Dirjen, termasuk juga dari Pupuk Holding;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang Bahagia.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budidaya secara tepat guna dengan penggunaan sarana produksi sesuai dengan teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Sarana produksi mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas kualitas dan hasil pertanian. Keterbatasan pasokan, penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk, penjualan diluar wilayah distribusi pupuk, serta kurang efektifnya kerja Komsis pengawas pupuk dan pestisida atau KPPP dalam segi pengawasan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi belum berjalan dengan baik. Pemerintah mencoba mengantisipasi permasalahan tersebut melalui kebijakan kartu tani. Namun dalam pelaksanaannya pun masih mengalami beberapa tantangan, antara lain: petani yang lupa PIN-nya, kendala signal, hingga belum semua petani terdaftar dalam kartu tani.

Hal lain yang menjadi perhatian khusus bagi Komsis IV mengenai pendataan petani dan data luas lahan yang digunakan sebagai penentuan kebutuhan pupuk, validasi data menjadi penting karena terkait dengan keberhasilan program kartu tani pupuk bersubsidi secara keseluruhan. Jadi saya dapat info dalam Ratas, Kementerian Pertanian belum merilis berapa luasan. Masih menunggu rilis dari BPN-ATR. Jadi selama belum dirilis teman-teman Komsis IV kita jangan adakan dulu RDP. Karena kalau RDP dengan

gelap gulita yang akan kena masalah kita juga. Tunggu ada rilis resmi baru RDP. Ya ini kana da 4 Eselon I nih. Disampaikan saja sama Menteri.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Hari ini merupakan kelanjutan Rapat Dengar Pendapat tanggal 12 Desember 2019 yang lalu, guna mengkaji secara menyeluruh factor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.

Oleh karena itu Komsis IV mengundang para Dirjen, Kepala Badan Penyuluhan, termasuk juga Deputy II Bidang Pangan Pertanian, Kemenko Pertanian, Dirut Pupuk Holding, Himbara, dan lain-lain. Disamping itu juga Komsis IV juga ingin mendapatkan gambaran dari PT Pupuk Indonesia Holding Company dan Kementerian Pertanian terkait tingginya harga gas yang menyebabkan PT Pupuk Iskandar Muda tidak bisa beroperasi selama 2 bulan. Menurut alokasi subsidi pupuk Tahun 2020 sebanyak 7,9 juta ton atau setara dengan 26,6 Triliun Rupiah serta perkembangan piutang subsidi yang terlambat dibayar oleh Pemerintah sehingga menyebabkan biaya bunga dan menjadi beban subsidi.

Bapak/Ibu yang terhormat.

Demikian pengantar kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan para Dirjen, kemudian dilanjutkan Kepala Badan, setelah itu Dirut Pupuk Holding, yang terakhir Himbara.

Kami persilakan dari Kementerian Pertanian, siapa yang mulai dulu.
Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak Pimpinan dan Anggota Komsis IV DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan,
Bapak/Ibu sekalian yang ada disini, yang ada diruangan ini yang kami hormati dan kami banggakan.

Terima kasih atas....

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Pak, saya potong. Saya barusan melihat disini ada yang di BKO Pak Hilmi Nomor Anggota A-65 dari Partai Gerindra. Ini BKO-nya Pak Eddy Prabowo. Pak Eddy Prabowo masih Anggota Komisi IV. Jadi nanti kalau Pak Eddy Prabowo duduk didepan saya dia juga boleh nanya, boleh ditanya.

Terima kasih, lanjutkan.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik Bapak Pimpinan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami berempat Direktur Jenderal Ketahanan Pangan, kemudian Kepala Badan Litbang, dan Kepala Badan SDM.

Kami akan mencoba menyampaikan kaitan dengan arah kebijakan pupuk bersubsidi di Tahun 2020. Kebijakan Pemerintah dan pengelolaan belanja pupuk bersubsidi merupakan kebijakan subsidi tentunya agar kedepan lebih efisien dan tepat sasaran. Disini kami akan mencoba mengevaluasi kartu tani dan serapan pupuk bersubsidi Tahun 2019 dan alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2020.

Bapak Pimpinan, arah kebijakan pupuk bersubsidi tentunya kedepan ingin tepat sasaran dalam penyaluran dan pembayaran agar lebih cepat. Jadi sementara ini penerimaan subsidi belum terdata dengan baik. Tentunya dengan adanya pendataan ulang melalui ERDKK dengan basis NIK itu akan lebih tertib dan lebih tepat sasaran.

KETUA RAPAT:

Sebentar Dirjen, jadi sekian puluh tahun belum ada pendataan yang fix sih?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Iya.

KETUA RAPAT:

Sekian puluh tahun ya?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Iya.

KETUA RAPAT:

Karena saya sekian puluh tahun jadi Anggota Komsis IV datanya ya selalu begini. Jadi nanti kalau dituliskan kurang tepat sasaran, apa itu sudah lagu lama. jadi kurang tepat sasaran, salah sasaran, atau saya tidak tahu apa judulnya, tolong dijelaskan kepada semua Anggota Komsis IV. Jangan sekali lagi saya ingatkan, jangan Cuma dibibir saja. Yang saya inginkan data yang fix. Termasuk nanti dalam RDP yang akan datang, kalau datanya tidak fix saya batalkan. Karena saya tidak mau terulang lagi hal yang lalu. Contoh, kemarin Kementerian Pertanian merilis hasil produksi padi. Kalau tidak salah 52 Juta ton sekian. BPS merilis 32 Juta ton sekia. Saya tidak tahu mana yang

benar, mana yang salah. Saya minta tidak terulang lagi. Yang lalu anggap saja selesai. Yang akan datang harus lebih transparan. Mohon maaf Saudara Dirjen, ini Anggota saya semua ini jagoan semua nih. Mantan Pejabat Bupati, Ibu Endang dan yang lain-lain juga termasuk Pak Hasan, ini jagoan semua ini. Termasuk Pak Panggah juga. Jadi apabila berbohong ya pasti kami tahu. Itu saja.

Silakan lanjutkan.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi dengan basis e-KTP ini mudah-mudahan tidak ada duplikasi lagi kaitan dengan 1 orang punya 2 KTP atau orang yang meninggal masih didaftar. Ini mudah-mudahan bisa diantisipasi dengan NIP ini, dan kami sudah mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota kaitan dengan validasi data EERDKK ini.

Kemudian kedepan penebusan kita sudah rancang melalui kartu tani. Mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dengan lancar. Kaitan dengan sosialisasi sudah kita laksanakan 2018 Jawa dan Madura, 2019 diluar Jawa, dan Alhamdulillah sudah selesai secara administrasi kaitan dengan sosialisasi.

Kemudian kami sudah mempunyai Permentan 01 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sector pertanian 2020 dimana pada Pasal 5 Ayat (2) disana disebutkan pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk sub sector ketahanan pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kemudian di Bab III Pasal 5 Ayat (1) dan (2) bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah tergabung dalam kelompok tani dan menggarap lahan paling luas 2 hektar. Kemudian di Pasal 17 Ayat (2) Bab IV penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani. Disini bahasanya masih dapat karena memang masih kendala banyak titik-titik kios yang sinyalnya belum baik. Sehingga dikhawatirkan kalau kita langsung mewajibkan takut ada masalah dilapangan sehingga disini bahasanya masih dapat. Catatan, kartu tani diutamakan dan kalau ada kios-kios yang memang sinyalnya tidak baik atau tidak ada sinyal dilakukan secara manual.

Kemudian manfaat kartu tani ini dari sisi penagihan itu akan lebih simple karena tidak perlu nota penjualan atau kwitansi, tidak perlu lock book atau catatan pembukuan, tidak perlu penyimpanan ERDKK dikios, tidak perlu berita acara, verifikasi, dan validasi, yang memang ini memakan waktu lama dari kios ke distributor, distributor ke pupuk holding dan pupuk holding baru mereka ke pusat untuk dicairkan uangnya. Karena memang langsung terekam didalam dashboard bank. Kemudian waktu penagihan juga akan semakin singkat. Dimana tagihan berupa rekapitulasi transaksi penebusan atau printout dashboard penyaluran pupuk bersubsidi yang dilengkapi dengan surat penagihan dari pupuk Indonesia ke Kementerian Pertanian. Jadi nanti akan lebih simple, lebih tipis dan tidak makan banyak kertas. Kaitan dengan hal ini ketepatan sasaran penerima tentunya diharapkan akan lebih terjamin

karena penebusan pupuk bersubsidi hanya dilakukan oleh pemegang kartu tani.

Kemudian kaitan dengan definisi saya pikir sudah kita ketahui bahwa kartu tani yang dikeluarkan oleh perbankan kepada para petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin elektronik data capture di pengecer-pengecer resmi tentunya yang sudah terdaftar di pupuk Indonesia. Kemudian edisi itu sendiri merupakan mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukan atau menggesek kartu tani di pengecer resmi.

Bapak Pimpinan, kaitan dengan mekanisme EERDKK ini memang EERDKK ini dibuat oleh para petani, kemudian dibimbing oleh para penyuluh, kemudian dihimpun oleh kelompok tani, kemudian dari kelompok tani direkapitulasi di BPP, dan dari BPP diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Dari Dinas Pertanian Kabupaten diserahkan ke Dinas Pertanian Provinsi, disana ada validasi, kemudian disampaikan ke Pusat, kemudian dari Ditjen PSP membuat atau menyusun SK Menteri Pertanian kaitan dengan alokasi dan HET, kaitan dengan pupuk bersubsidi ini yang disampaikan kepada Provinsi dan Kabupaten. Dari Provinsi dan Kabupaten. Dari Provinsi itu membuat alokasi kuota per Kabupaten, tentunya sesuai usulan EERDKK dari Kabupaten/Kota, dan dari Kabupaten/Kota membuat SK alokasi pupuk untuk Kecamatan/Desa sesuai dengan usulan EERDKK.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, kalau kita lihat ini yang 3 ini masih dengan pola lama ya? 1, 2, 3 masih dengan pola lama toh? Iya toh? Masih usulan dari Gapokan, masih di Kecamatan. Seberapa validasinya? Karena setahu saya ini rata-rata mohon maaf ini, Dinas Kabupaten ini kebanyakan copy-paste. Ya kalau ini kan kita lihat Cuma kemajuannya adalah pakai kartu tani melalui Himbara. Yang belakang-belakang 3 ini kan masih pakai pola lama ini toh?

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Betul Pak. Kami jelaskan, kalau yang 2020 ini menggunakan NIK basisnya Pak. Nomor Induk KTP dengan e-KTP. jadi KTP elektronik. Artinya kalau dengan KTP elektronik itu tidak memungkinkan ada 1 nama 2 KTP Bapak Pimpinan. Sehingga kami lebih firm karena menggunakan e-KTP.

KETUA RAPAT:

Begitu Saudara Dirjen, saya paham. Yang Saudara Dirjen maksudkan saya paham. Tapi kan didalam e-KTP itu tercantum pekerjaan: petani, kan tidak juga. Ini kan masih rawan penyimpangan. Maka ini harus ada cek dan ricek. Karena apa? Mungkin Pak Budi punya KTP di kampung nih Cuma 1 e-KTP nih, Beliau bukan petani. Tetapi mohon maaf, bisa saja terjadi

kongkalikong dengan Gapoktan masukin saja nama saya supaya dapat. Nyatanya masih banyak kebocoran. Jadi saran saya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar saya lagi ngomong.

Jadi harus dicek secara benar masalah tadi itu. Kalau hanya e-KTP dasarnya saya rasa masih ada lain-lain.

Ya silakan Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Ini masalah teknis saja. Alangkah bijaksana kalau Pak Dirjen menyelesaikan presentasinya. Nanti kita masing-masing mengkritisi, dan yang kurang dari kita Pimpinan yang lebih memahami, semua lengkap, akhirnya kita punya kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Pak Haerudin, ini kan pas momentnya ini yang saya tanyakan. Ini secara teknisnya ini yang paling penting gitu loh. Jelas?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jelas.

KETUA RAPAT:

Ya Dirjen lanjutkan.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik terima kasih Bapak Pimpinan. Sarannya kami terima Pak. Itu kemungkinan besar seperti itu. Dan yang bukan petani bisa mengajukan.

Kemudian kaitan dengan kartu tani, ini basis data dari Kabupaten. Dari Kabupaten diakses oleh Bank Pelaksana. Disana ada 3, Mandiri, BRI dan BNI'46. Kemudian dari Bank mengakses data tersebut dan mengadakan edisi dan kartu tani yang diserahkan ke kios. Jadi Bank yang mengadakan edisi dan kartu tani itu adalah Bank Pelaksana. Yang diserahkan ke kios dan nanti dari kios dibagikan kepada petani yang sudah terdaftar di dalam EERDKK tersebut. Kemudian para petani melakukan penebusan pupuk bersubsidi melalui kios-kios yang sudah ditetapkan.

Data EERDKK Tahun 2000 berdasarkan sistem per tanggal 25 Desember 2019. Jadi mohon ijin kaitan dengan data nanti kami jelaskan kami tutup per 19 Desember. Kemudian ini berkembang, EERDKK yang masuk sampai 25 Desember ini berjumlah 12.211.768. Ini per NIK. Jadi Nomor Induk Kependudukan. Kemudian dengan jumlah luas tanam itu 22,9 Juta hektar. Ini berdasarkan luas tanam di EERDKK. Namun kami sudah konfirmasi ke Dirjen Tanaman Pangan bahwa luas tanam itu lebih kurang 11,8 Juta hektar targetnya dalam 1 tahun.

Kemudian yang disini yang mengusulkan untuk pupuk urea itu 5,02 Juta ton, kemudian pupuk SP3 itu 2,3 Juta ton.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Interupsi Pak Ketua.

Boleh?

Tolong ulangi Pak Ketua data itu 11 koma berapa?

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya. Saya juga agak bingung ini.

Jadi Pak Haerudin kalau ada hal yang penting tetap harus kita potong untuk menjelaskan supaya kita semua paham. Jadi dari 22901694 luas tanam

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Iya.

KETUA RAPAT:

Terus tadi yang 11 Juta? Coba Pak Ichsan. Tadi Pak Ichsan yang bertanya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya begini Pak Ketua.

Pak Dirjen, luas lahan itu 22,9 itu berapa luasan lahan teknis, berapa luasan yang tadah hujan menurut EERDKK. Kalau menurut data dari Kementerian Pertanian itu berapa? Terus menurut data BPS berapa? Maksud saya begitu Pak Ketua.

Ijin Ketua.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Ya, mohon ijin sedikit. Mungkin nanti ditambahkan dari Dirjen Tanaman Pangan. Yang dimaksud disini luas tanaman 22,9 Juta hektar ini. Ini berdasarkan luas tanam berdasarkan usulan yang ada di EERDKK Bapak Pimpinan untuk seluruh komoditas, baik di ketahanan pangan, perkebunan, hortikultura usulan. Usulan dalam EERDKK.

Kemudian luas tanam padi itu hanya 11,8 Juta hektar per tahun Bapak Pimpinan. Kemudian pupuk urea berdasarkan usulan dari EERDKK itu 5,028 Juta ton. SP36 2,3 Juta ton, pupuk organic 6,5 Juta ton, pupuk NPK 5,5 Juta ton, dan ... A 1,9 Juta ton. Kemudian kami sampaikan juga disini Bapak Pimpinan bahwa realisasi penggunaan kartu tani per 30 Desember 2019 ini kami sampaikan sebagai gambaran saja tapi untuk 2020 mudah-mudahan ada beberapa Kabupaten yang sudah full melakukan tebus pupuk subsidi dengan kartu tani, diantaranya Temanggung, Kabupaten Temanggung, sama di Sumenep kalau tidak keliru. Realisasi 2019 ini baru 10%. Jadi dari 10 Juta 200 kartu tani yang dibagikan kepada para petani kemudian didistribusi 5.652.000, kemudian petani yang bisa menggunakan kartu tani baru 10%-nya 581.000. Ini hanya sebagai gambaran saja.

Kemudian ini yang terkait dalam kaitan dalam kartu tani dan penoblosan pupuk bersubsidi. Itu disana ada Pemda, BPSDMP, kemudian Kementerian Keuangan dari sisi anggarannya, kemudian ada Dirjen PSP, ada telekomunikasi, kemudian juga ada pupuk holding tentunya. Kemudian ini berdasarkan SK Menteri Perekonomian. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bu Mus bahwa kita sudah membentuk kelompok kerja kebijakan pupuk bersubsidi yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian yang melibatkan Kementerian Pertanian. Ini dari sisi alokasi HET dan HPP, kemudian Kementerian Dalam Negeri dari sisi EERDKK dan Nomor Induk Kependudukan, kemudian Kementerian Keuangan dari sisi anggaran, Kementerian BUMN, Himbara, PT Pupuk Indonesia, dan operator telekomunikasi, kemudian Kementerian Perdagangan. Itu kaitan dengan

distribusi dan pengawasan, dan Kementerian Perindustrian berkaitan dengan pupuk bersubsidi. Dan kita sudah melakukan lebih kurang 3 kali putaran rapat dan disepakati bahwa penetapan target dan tindak lanjut percepatan program kartu tani ini efektif mulai 2020.

Ini yang sudah disusun oleh Kementerian Perekonomian. Mudah-mudahan selesai Tahun 2024. Namun demikian bahwa sosialisasi sudah kita lakukan 2018 untuk Jawa-Madura, 2019 diluar Jawa-Madura. Sehingga pelaksanaannya 2020 mudah-mudahan lebih baik dan tepat sasaran. Pak Menteri juga sudah menyampaikan surat ke Gubernur-Bupati untuk pelaksanaan tebus pupuk bersubsidi ini, juga ada surat Dirjen ke Dirut PIHC untuk melakukan percepatan penerapan kartu tani melalui distributor dan kios-kios yang sudah terdaftar di Indonesia. Ini kami sudah melakukan MoU dengan BNI, BRI dan Mandiri. Tentunya dengan wilayah-wilayah yang sudah kita tetapkan. Mudah-mudahan Bank-Bank dimaksud dapat melakukan percepatan pelaksanaan kartu tani ini.

Bapak Pimpinan, kami sampaikan bahwa untuk serapan penyaluran pupuk bersubsidi 2019 dan alokasi pupuk bersubsidi 2020. Realisasi penggunaan pupuk bersubsidi atau penebusan pupuk bersubsidi Tahun 2019 ini 98,14%. Jadi artinya realisasinya 8.708.647 ton dari alokasi atau dari target 8,874 ribu ton. Jadi realisasinya 98,14. Ini pun berdasarkan form 5 Bapak Pimpinan. Form 5 itu berarti dari distributor ke kios. Dari kios ke petani mungkin akan lebih kecil lagi. Itu ada F6 disana. Kita belum bisa menyampaikan disini karena harus berdasarkan hasil audit dari BPK.

Kemudian secara gambaran ini ada realisasi dari 2016 sampai 2019. Ini rata-rata 9,2 juta ton, kemudian di 2019 itu 8,708.647. Jadi ini rata-rata penggunaan pupuk bersubsidi 4 tahun terakhir itu rata-rata 9,2 juta ton, dan untuk 2019 itu 8,7 ton.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komsis IV DPR RI.

Kami disini menyampaikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan EERDKK yang masuk. Kita tutup tanggal 19 Desember 2019 yang berdasarkan sistem sudah ditandatangani oleh para Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Dari hasil rekap EERDKK yang kita tutup pada tanggal 19 Desember 2019 ini jumlahnya adalah 16.109.684 ton. Ini berdasarkan usulan EERDKK per 19 Desember 2019. Mengapa kita tutup tanggal 19 Desember 2019. Dengan harapan bahwa Kementerian Pertanian bisa memvalidasi, kemudian tingkat Provinsi juga bisa memvalidasi, juga nanti ada tingkat Kabupaten sehingga efektif awal 2020 bisa dilaksanakan secara efektif. Sedangkan alokasi yang tersedia itu 7.949.303. Sehingga bagaimana kita mengalokasikan, sehingga kita memberikan rumus penyesuaian. Jadi usulan EERDKK dibagi total jenis, total per jenis secara keseluruhan, kemudian dikalikan kuota 2020. Sehingga ketemulah sebagaimana terlampir.

Jadi ini merupakan alokasi pupuk untuk 2020 berdasarkan Permentan Nomor 1 Tahun 2020. Mungkin disini ada yang lahannya luas, pupuknya turun. Ada yang lahannya sama pupuknya naik. Karena ini berdasarkan

usulan EERDKK tanggal 19 Desember 2019 yang kami tutup dan sudah ditandatangani oleh Kepala-Kepala Dinas.

Namun demikian Bapak/Ibu sekalian, Bapak Pimpinan dan para Anggota.

Ini bukan berarti angka mati karena secara aturan bisa bergeser antar Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, kemudian bisa bergeser antar Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, bisa ada pergeseran antar Desa dan Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten. Contoh Aceh, misalnya dengan alokasi urea 82.717. Ini hanya cukup sampai bulan Mei maka untuk bulan selanjutnya itu bisa mengajukan. Nanti tetap dibayar oleh Pemerintah dengan kurang bayar setelah diaudit oleh BPK. Dan perhitungan 7,9 juta ton ini masih didasarkan pada luas lahan baku sawah 7,1 juta hektar. Jadi berdasarkan SK ATR-BPN Nomor 399 tahun 2018. Jadi tadi disampaikan Bapak Pimpinan untuk 2019 kami sampaikan juga sudah kami validasi dengan ATR-BPN dengan Badan Informasi Geospasial, dengan Badan Antariksa, kemudian dengan BPS, kemudian satunya lagi dengan Badan Informasi Geospasial. Jadi ketemunya lebih kurang 7,463 juta hektar. Jadi ada kenaikan 380.000 hektar. Namun belum diumumkan. Rencananya berdasarkan informasi dari teman-teman ATR-BPN tanggal 30 Februari.

KETUA RAPAT:

Jadi belum ada rilis?

DEPUTI PSP:

Belum Pak. nanti resminya tanggal 3 Februari.

KETUA RAPAT:

Tanggal 3 Februari?

DEPUTI PSP:

Iya, diumumkan rencananya Pak, jadi naik lebih kurang 380.000 hektar.

Kemudian selanjutnya tadi kita sudah simulasi, angkanya ketemu itu dengan catatan bisa ada pergeseran. Kalau kurang tinggal mengajukan nanti, tetap akan kita hitung dan minta anggaran untuk tambahan dan nanti akan dihitung sebagai kurang bayar setelah ada audit dari BPK.

Kemudian di Tahun 2020 ini ada cadangan. Jadi Bapak Menteri Pertanian itu menyisihkan cadangan 10%. Nah 10% ini gunanya untuk mengantisipasi kalau ada kelangkaan-kelangkaan pupuk di suatu daerah, di desa atau Kecamatan ini diambilkan dari yang 10% ini. Jadi kalau ada kurang pupuk disalah satu wilayah bisa diusulkan, nanti kita ambil dari cadangan pupuk yang 10% ini. Ini merupakan cadangan yang diskresi. Merupakan diskresi dari Bapak Menteri. Jumlahnya cukup banyak dan mudah-mudahan

kedepan pelaksanaan akan lebih tertib dan apabila ada kekurangan bisa diambil dari kekurangan cadangan 10% ini.

Kemudian alokasi, ini sudah saya sampaikan sebetulnya. Bisa lanjut saja.

Ini sebagai gambaran saja Bapak Pimpinan berkaitan dengan EERDKK, PS Alokasi, PS Realisasi. Jadi yang biru ini usulan EERDKK, kemudian alokasi yang merah ini realisasi yang hijau. Jadi memang rata-rata setiap tahun dalam 5 tahun terakhir itu tidak lebih dari 9,2 Juta ton penggunaan pupuk bersubsidi. Untuk 2019 malah 8,7.

Mungkin itu Bapak Pimpinan hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mungkin akan disampaikan Ibu Mus dari Menko Perekonomian berkaitan dengan kartu tani.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan Dewan, Wakil Pimpinan, beserta para Anggota Dewan yang terhormat, serta rekan-rekan Kementerian/Lembaga terkait.

Pertama-tama saya sampaikan mohon maaf Pak karena tadi ada rapat yang harus kami pimpin. Dan akhirnya sampai disini agak terlambat. Saya sampaikan permohonan maaf.

Jadi sesuai dengan keputusan Kantor Menko Perekonomian tanggal 30 September 2019 Nomor 305 Tahun 2019 tentang kelompok kerja kebijakan pupuk bersubsidi. Yang kami ingin sampaikan bahwa tugas kelompok kerja ini sebenarnya lebih umum, mengkoordinasikan perumusan kebijakan terkait pupuk bersubsidi, kebijakan produksi, distribusi, dan pengadaan pupuk bersubsidi serta melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

Khusus dalam rencana kerja Pokja pupuk Tahun 2019 dan 2020 ini, kami lebih banyak memfokuskan pada pelaksanaan percepatan penggunaan kartu tani untuk pupuk. Ini adalah berdasarkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet April 2015 maupun Sidang Kabinet Januari 2015 yang meminta agar uji coba kartu tani agar diperluas. Untuk itu beberapa rencana kegiatan yang kami siapkan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait. Untuk kami informasikan Kementerian/Lembaga terkait antara lain adalah selain Kementerian Pertanian kami bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian,

Pupuk Indonesia *Holding Company*, serta Himbara, serta Pemda yang terkait, peserta kelompok tani.

Rencana kerja yang disiapkan melalui Pokja ini adalah antara lain seperti tadi yang disampaikan. Kita mempunyai target-target untuk percepatan program kartu tani. Tahun 2020 ini kita menargetkan untuk wilayah Jawa-Madura 60%, dan diluar Jawa-Madura akan dilakukan updating data dan proses pencetakan kartu. Sebenarnya mohon maaf kami siapkan bahan. Mungkin tidak bisa.

Sudah, baik Pak.

Kemudian Tahun 2021 kami menargetkan implementasi Jawa-Madura 100%, Sumatera-Bali-Kalimantan-Sulawesi 50%, serta diluar wilayah tersebut dilakukan updating data dan proses pencetakan kartu. Dan Tahun 2022 kami targetkan implementasi Jawa-Madura-Sumatera-Bali-Kalimantan-Sulawesi 100%. Diluar wilayah tersebut akan dilakukan updating data dan proses pencetakan kartu. Kemudian Tahun 2023 ditargetkan Jawa-Madura-Sumatera-Bali-Kalimantan-Sulawesi 100% serta diperluas ke NTB, NTT, Maluku, Papua 70%. Diluar wilayah tersebut dilakukan updating data dan proses pencetakan kartu. Diharapkan Tahun 2024 Jawa-Madura-Sumatera-Bali-Kalimantan-Sulawesi-NTB-NTT-Maluku dan Papua untuk seluruh Indonesia akan tercapai target 100%. Sasaran-saran program ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali koordinasi dan antara lain kita meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat edaran kepada Gubernur Indonesia dan ini sudah ditindaklanjuti dengan terbitnya surat edaraan Nomor 520/14291/SJ. Kemudian Menteri Pertanian juga sudah menerbitkan edaran kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi seluruh Indonesia, dan ini sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan surat edaran dimaksud dengan Nomor 141.RC201/M/12/2019. Sedangkan surat edaran yang juga kita mintakan kepada Menteri Perdagangan untuk menerbitkan surat edaran penggunaan pupuk sedang proses untuk seluruh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan seluruh Indonesia. Dan yang lainnya kita juga mengharapakan Menteri BUMN menerbitkan surat edaran kepada PT Pupuk Indonesia dan Himbara terkait percepatan program kartu tani. Beberapa hal yang menjadi harapan kita bahwa sebenarnya banyak hal yang baik secara social dan yang lain-lain itu ... atau keengganan petani menggunakan kartu tani sebagaimana yang disampaikan tadi. Yang menggunakan baru 10% dari kartu tani yang sudah didistribusikan. Jadi sekitar 5 Juta, yang menggunakan baru 580.000. Ini antara lain karena petani itu harus memasukan dulu biaya untuk pembelian pupuk bersubsidi didalam kartu tersebut. Sehingga petani merasa ini bukan, dia merasa dia enggan untuk memasukan uang didalam tentunya untuk membeli pupuk padahal dia maunya cash seperti biasanya tanpa perlu memasukan didalam kartu. Dan ini yang tentu saja hanya membutuhkan sosialisasi bahwa uang yang mereka masukan kedalam kartu tersebut akan dimanfaatkan oleh mereka sendiri. Jadi komunikasi itu yang kita dorong pada Pemda untuk memberikan informasi yang lebih sederhana clear kepada petani-petani kita bahwa manfaat menggunakan kartu tani ini akan banyak lagi nanti memanfaatkan lebih luas lagi kedepan kalau mereka sudah bersedia menggunakan kartu tani. Ini yang pertama. Sehingga hal-hal yang membuat realisasi penggunaan kartu tani ini memang sampai sekarang masih

10%. Sosialisasi ini sebenarnya sudah berapa kali diselenggarakan bekerjasama dengan teman-teman Kementerian Pertanian serta Pupuk dan Himbara untuk kita lebih banyak berkomunikasi.

Yang kedua adalah signal yang mereka menganggap signal itu kadang-kadang tidak bisa diakses tetapi kalau kita lihat BPNT bisa melakukan perluasan penguatan signal dan yang lain-lain itu, *Inshaa Allah* ini sebenarnya bukan isu yang kita bisa mengkomunikasikan lebih baik lagi supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi kendala untuk menggunakan kartu tani kita kedepan.

Ini Pak Pimpinan yang bisa kami laporkan. Sementara ini kami terus mengkomunikasikan dan mencari hal-hal yang bisa kita lakukan lebih efektif, komunikasi dengan para petani agar berkenan atau bersedia menggunakan kartu tani dalam pembelian pupuk bersubsidi mereka didaerah.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya. Cuma yang agak menjadi permasalahan kenapa sih Pemerintah tidak mencoba dulu Jawa dan Madura untuk yang pertama. Jadi focus dulu. Jadi Jawa-Madura ini clear. Nah kalau ini kan kita lihat 2020 Jawa-Madura baru 65%. Kenapa tidak diuji coba dulu. Selesaikan dulu Jawa dengan Madura. Karena mohon maaf, begitu kita turun kapal kalau mau ke Lampung Pelabuhan Bakauheni masuk kanan sedikit, jangankan wifi, signal telepon saja sudah tidak ada. Ini yang pertama.

Yang kedua, apa mungkin petani mau setor uang dulu ke Bank. Itu kan mereka itu kadang-kadang mendadak harus beli langsung bawa uang cash. Itu yang kedua.

Yang ketiga jangan sampai nanti ini uangnya uang orang lain tapi pakai kartu tani disetorkan ke Bank. Ini harus diantisipasi. Karena modusnya pengecer maupun distribusi itu banyak sekali untuk hal itu.

Silakan siapa. Dilanjutkan tadi.

Dari mana Pak Dirjen?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (AAS ASIKIN IDAT):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Wakil Pimpinan Komsis IV DPR RI, juga

Yang kami hormati Anggota Dewan Komsi IV,
Hadirin juga yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami akan menyampaikan kalau kaitan dengan kartu tani tadi sudah disampaikan mengenai kesiapan Pupuk Indonesia dalam menghadapi musim tanam di Tahun 2020.

Dalam hal ini kami perlu sampaikan juga mengenai kebijakan Pupuk Indonesia dalam penyaluran dan pengembangan industri pupuk bersubsidi. Landasan dari pupuk bersubsidi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Permendag Nomor 15/Mdagper/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk, surat Menteri BUMN Nomor 154 mengenai persetujuan penugasan subsidi pupuk pada BUMN pelaksana, juga Permentan Nomor 001 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sector pertanian Tahun Anggaran 2020.

Rencana produksi seluruh jenis pupuk PI Group Tahun 2020 adalah sebanyak 15,2 Juta. Jadi ini kemampuan dari Pupuk Indonesia, pupuk yang biasa diproduksi adalah 15.2 Juta ton. Dan ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan subsidi yang sebanyak 7,9 juta ton. Tiga, didalam merencanakan penjualan Pupuk Indonesia Group memprioritaskan pemenuhan kebutuhan subsidi. Sehingga penjualan non subsidi untuk dalam negeri maupun non ekspor dan ekspor dilakukan setelah diyakini setelah kebutuhan subsidi ini terpenuhi. Yang keempat, dalam hal terdapat kekurangan alokasi untuk kebutuhan pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia Group menyediakan stok pupuk non subsidi di setiap kios resmi.

Kelima, Pupuk Indonesia Group menyiapkan pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 minggu kedepan diluar musim tanam dan 3 minggu kedepan dalam puncak musim tanam sesuai ketentuan Permendag 15 Tahun 2013, ini minimumnya. Tapi kalau pupuk Indonesia ini rata-rata bisa 2 bulan sampai 3 bulan kedepan kita persiapkan.

Keenam, stok yang tersedia saat ini, yang ada saat ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi hingga 2 bulan kedepan. Jadi berdasarkan aturan cukup 2 minggu, tapi Pupuk Indonesia sudah menyiapkan untuk 2 bulan kedepan baik di Provinsi maupun Kabupaten. Sehingga melebihi dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Kementerian Perdagangan yaitu selama 3 minggu.

Ketujuh, dalam melakukan perencanaan dan pengiriman pupuk melalui transportasi darat, dan laut. Pupuk Indonesia Group telah memperhitungkan waktu dan jarak tempuh serta kondisi dan cuaca. Kedelapan, Pupuk Indonesia Group membangun sistem monitoring penyaluran dan penyediaan pupuk stok berbasis IT. Kesembilan, Pupuk Indonesia Group senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten setempat serta

memperkuat jaringan pengawasan internal di lingkungan Pupuk Indonesia Group.

Juga kebijakan lainnya adalah pencirian pupuk bersubsidi. Dalam rangka membedakan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan maka pupuk bersubsidi diberi warna yaitu dengan warna pink, dan zetta dengan warna orange.

Sebelas penanganan khusus untuk daerah *remote*, apabila penyaluran pupuk bersubsidi tidak berjalan lancar seperti daerah *remote*, produsen unit satu akan melakukan penyaluran secara langsung kepada petani/kelompok tani di lini empat dengan berkoordinasi bersama pemda setempat.

Yang kedua belas, pemberlakuan kantong satu merek, yaitu untuk urea merek Pupuk Indonesia, untuk NPK merek Ponska Pupuk Indonesia. Dan juga pemberian *barcode*, *stamp*, serta nomor pengaduan pada kantong pupuk bersubsidi. Tujuannya ini adalah untuk menghindari adanya fanatisme terhadap merek tertentu. Juga memudahkan dalam pemenuhan apabila terjadi kekurangan pasokan. Juga untuk menelusuri sumber pupuk apabila ditemukan penyimpangan pupuk bersubsidi di lapangan. Yang ketiga belas, pemberlakuan kios pupuk lengkap di seluruh Indonesia, yaitu menyediakan pupuk secara lengkap (Urea, SP36, ZA, NPK, organik) di kios resmi. Kalau dulu itu masing-masing kios, ada kios Urea, kios NPK. Sekarang masing-masing kios harus melengkapi pupuk yang lengkap. Juga meningkatkan pelayanan kepada petani.

Program tepat harga eceran tertinggi ini pemberian ganti rugi kepada petani apabila membeli pupuk bersubsidi dengan harga tes HET dengan menunjukkan bukti pembeliannya. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengecer mana yang melakukan penjualan pupuk di atas HET nya. Juga layanan pelanggan telepn bebas pulsa dan monitoring tindak lanjut pengaduan melalui *website* Pupuk Indonesia. Itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka untuk mengamankan penyaluran pupuk bersubsidi.

Berikutnya adalah kami ingin menyampaikan penyediaan stok pupuk nasional tahun 2020. Stok awal di Januari kami mempunyai stok 2.623.658, yang terdiri dari Urea, NPK, SP36, ZA, dan organik. Produksi selama tahun 2020 adalah 12.655.000, sehingga secara total stok yang bisa disalurkan selama tahun 2020 adalah 15.278.658. Ini dari kemampuan Pupuk Indonesia dari stok awal ditambah dengan produksinya sebanyak 15 juta ini dialokasikan untuk subsidi sebanyak 7.949.303, dan untuk non subsidi sebanyak 4.548.249, sehingga secara total adalah 12.468.052, sehingga stok akhir di tahun 2020, ini juga kita untuk melihat bahwa nanti di awal tahun 2021 ini harus aman, stok Pupuk Indonesia ada sebanyak 2.780.603. Dan nantinya stok akhir yang ada tahun 2020 ini cukup untuk kebutuhan dua bulan kedepan, yang kalau menurut aturan hanya cukup dengan dua minggu. Tapi Pupuk Indonesia untuk pengamanan kita alokasikan sebanyak dua bulan.

Juga berikutnya kami ingin memperlihatkan alokasi dan penyediaan stok pupuk dua bulan di puncak musim tanam, khususnya untuk dua bulan ini

untuk Januari dan Pebruari. Untuk di Sumatera ini bisa terlihat di masing-masing kabupatennya. Jumlah yang ada kalau kita bandingkan dengan ketentuan, ini bisa terlihat bahwa ini yang di kolom h, ini semuanya di atas 100 persen ketentuan. Bahkan ada yang 226, 397, dan 500, 240. Ini artinya adalah bahwa stok yang tersedia di Sumatera ini sudah melebihi. Ini yang kami sampaikan disini adalah per provinsinya. Tapi kabupaten dan lainnya ada daftarnya, nanti bisa kami sampaikan juga.

Untuk Jawa dan Bali juga ini demikian. Kalau kita melihat di kolom h ini semua di atas 100 persen. Bahkan ada yang 477 persen, persen, ini dibandingkan dengan ketentuannya berdasarkan SK dari Menteri Perdagangan. Ini Jawa dan Bali. Dan untuk Kalimantan juga, daerah Kalimantan itu, ini di atas, bahkan ini ada 400, ada 500, 7.....persen, di atas ketentuan. Ini stok yang ada di daerah-daerah. Di Sulawesi dan Nusa Tenggara juga demikian, ini di kolom h ini bisa di lihat. Ini semuanya di atas 100 persen. Bahkan ada yang 516 persen diatas ketentuan. Untuk Maluku dan Papua ini juga diatas 100 persen. Bahkan untuk Papua Barat, tapi ini kecilah, ini 1.451 persen, ini di atas ketentuan.

Intinya stok ini adalah stok yang ada di provinsi, dan stok yang ada di kabupaten yang jumlahnya melebihi dari ketentuannya. Intinya adalah, Pupuk Indonesia selama ada RDKK nya, selama orangnya ada terdaftar di dalam RDKK, *Insyah Alloh* ini bisa terlayani. Intinya adalah kami akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai kesiapan Pupuk Indonesia Group dalam menghadapi musim tanam tahun 2020.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dilanjut, Himbara.

SEKRETARIS HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (AHMAD SOLICHIN LUTFIYANTO):

Terima kasih.

Yang kami hormati, Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan Komsis IV;
Bapak-bapak/Ibu Dirjen dan Deputi dari Kementerian terkait; serta
Bapak/Ibu Hadirin sekalian yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan, kami dari Himbara hadir, saya Solihin dari BRI sekaligus Sekretaris Himbara, terus ada Pak Bob/Direktur BNI, juga Pak Donjuan dari Direktur Bank Mandiri.

Mohon ijin, Bapak Pimpinan, kami sampaikan poin-poin yang akan disampaikan dari Himbara. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi dasar hukum dari petani yang kami laksanakan dari Permentan, khususnya terkait dengan Pasal 13 ayat (2) "penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan Kartu Tani". Jadi kami membantu dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini dalam konteks kami membantu perbankan berperan dalam penyediaan IDC dan juga dalam transaksi pembayarannya. Juga kami dari Himbara terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian terkait, terutama dengan Kementerian Pertanian dan juga dengan Menko Perekonomian.

Jadi fungsi utama Kartu Tani itu sebenarnya adalah sama dengan kartu perbankan yang lain juga. Hanya bedanya adalah di Kartu Tani juga terdapat data-data yang terkait dengan RDKK yang disampaikan dari kementerian terkait sebelumnya. Jadi ini sebetulnya adalah tidak ada buat kami dari perbankan/dari Himbara ini tidak ada yang spesial. Karena kami juga sudah biasa dalam melakukan kegiatan perbankan sehari-hari, ada tabungan, ada ATM, bisa juga dikaitkan dengan fasilitas *e-banking*, dan sebagainya.

Berikutnya ini adalah pembagian kami di Himbara untuk Kartu Tani. Jadi dari teman-teman kami di BRI, di Kepri, Banten, Jakarta, termasuk Papua dan Papua Barat. Jadi yang dari BNI adalah di Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Bali, NTB, Sulsel. Dan dari Bank Mandiri adalah di Sumbar, Riau. Jadi intinya kami dari Himbara terus berkoordinasi dan kolaborasi. Meskipun masing-masing Himbara juga sudah mempunyai wilayah kerja sendiri-sendiri.

Berikutnya kami sampaikan dari Himbara progres distribusi Kartu Tani. Dari total e-RDKK sebesar 10,79 juta itu sekitar 50 persennya itu telah diterima oleh petani dengan pembagian kurang lebih BRI 32, juta, BNI 1 setengah juta, dan Bank Mandiri 904 ribu yang telah didistribusikan.

Bagaimana dengan penggunaannya? Penggunaannya memang belum sepenuhnya/belum semua kartu yang didistribusikan tadi telah digunakan oleh petani dengan beberapa alasan seperti juga disampaikan dari kementerian terkait tadi. Untuk masing-masing banknya kira-kira demikian. BRI itu dari 3.526.000 telah digunakan, dari Bank BNI 40 ribu, dari Bank Mandiri 14 ribu, sehingga total Himbara yang sudah digunakan 581.611 dari total Kartu Tani yang telah diproduksi Himbara 5,6 juta. Jadi intinya kami dari Himbara untuk kaitannya dengan produksi kami sudah siap. Termasuk juga dengan penyediaan EDC dan lain sebagainya, sepanjang memang nanti data, terus siapa, titik-titik alamat dari kios pupuknya juga sudah tersedia dan sebagainya.

Ini kalau kita bicara EDC sebagai alat untuk melakukan transaksi penebusan dan pembayaran, dari total 15.143 KPL itu semuanya telah oleh mesin EDC Himbara. Dari jumlah tersebut kira-kira pembagiannya dari BRI 6 ribu sekian, BNI 5.500, dan Bank Mandiri juga telah menyediakan EDC di kios pupuk lengkap sebesar 3.457. Jadi intinya kami Himbara siap untuk *support* infrastruktur untuk mendukung kesuksesan program ini.

Berikutnya ini tadi sekilas sudah disampaikan dari kementerian, dari Kementerian Pertanian maupun dari Menko Perekonomian. Jadi kami dari Himbara kenapa ini kami sampaikan, artinya kami siap/*commit* untuk mendukung hasil koordinasi yang dilakukan di Menko Perekonomian bahwa tahun 2020 itu di Jawa-Madura 66 persen, sisanya fokus di data dan sebagainya, sampai dengan 2021.

Itu tadi seperti disampaikan Pak Ketua, Jawa-Madura fokus 100 persen kapan? Ini kalau hasil koordinasi dengan kementerian terkait itu akan dicapai di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari Himbara. Atas nama Himbara kami ucapkan terima kasih.

Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih.

Demikian, Bapak Pimpinan dan Anggota, paparan atau penjelasan yang sudah disampaikan dari Kementerian Pertanian, dari Menko Perekonomian, dari Pupuk Indonesia, dan dari Himbara. Untuk itu kami kembalikan ke Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bapak dan Ibu yang terhormat.

Para Dirjen sudah sebagian telah menyampaikan apa yang menjadi pembahasan hari ini. Sebagaimana ketentuan tata tertib kami persilakan kepada yang terhormat, Ibu Endang, untuk menyampaikan saran, tanggapan. Maksimal 3 menit dulu.

Kami persilakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. HJ. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepada para teman-teman kita di Anggota Dewan, dan khususnya para penyalur pupuk ini, dan juga Dirjen PSP, jadi saya melihat bahwa masalah di lapangan itu tidak sesuai seperti apa yang dikemukakan.

Yang pertama adalah keterlambatan utama dalam *matching database*. Jadi di lapangan itu banyak sekali para petani kita yang berhak menerima Kartu Tani dari Dinas Pertanian tapi sulit mendapatkannya karena tidak punya *e-KTP*. Di Bogor yang dekat Jakarta saja sulit mendapatkan *e-KTP*. Apalagi misalnya di Sulawesi Barat di sebelah saya ini, di Kalbar.

Kemudian masih banyak juga anggota kelompok tani yang belum *bankable*. Dan juga terbatasnya tenaga *admin*, tadi yang dikemukakan oleh Himbara, sebagai *peng-input* data di dinas itu sangat terbatas. Kemudian sistem *input* data dari kementerian dirasakan sulit. Apalagi untuk petani. Sedangkan saya saja misalnya tidak bawa *e-KTP* yang berinisial untuk bisa mengambil uang itu tidak bisa. Kemudian salah menulis. Misalnya 'kedele' ditulis 'kedelai', itu juga jadi *problem*.

Kemudian kendala distribusi pupuk di lapangan itu juga ada dampaknya dari musim kering tahun 2019. Kemudian penyusunan RDKK itu juga sangat lambat, karena pada umumnya petani kita sudah sepuh, sudah tua. Ini perlu ada pengawalan. Kemudian realisasi pencetakan kartu yang sangat lambat, dan banyak alamat yang tidak sesuai dengan nama yang diusulkan. Dan untuk daerah tertentu, jarak dari rumah petani ke kios pengecer yang sangat berjauhan. Apalagi misalnya di daerah dapil saya dekat dengan Jakarta, tapi Cianjur Selatan, itu perlu 5 jam. Kemudian banyak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pribadi, jadi sering-sering disalahgunakan.

Dan yang terakhir, banyak sekali para penyuluh yang kesejahteraannya tidak memadai, sehingga *boro-boro* maksudnya mau mengawal tapi untuk hidupnya saja sulit.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang telah memanfaatkan tiga menit.

Kami persilakan Bapak Edward

F-KB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Ini puasa ngomongnya sudah lama, satu bulan. Jadi sekarang dipersiapkan untuk mau ngomong dulu sedikit, supaya stabil mentalnya.

Terima kasih para perwakilan dari Kementerian Pertanian. Jadi data yang sudah disodorkan ini bagus. Tapi saya hanya sorot satu saja,

sosialisasinya masih kurang. Kita/DPR saja tidak tahu, bagaimana ini bisa rakyat mau tahu lagi. Padahal kami ini wakil rakyat. Kami turun dapil, hampir setiap bulan turun. Jadi ini kurang sinkronisasi antara kementerian dengan legislatif. Coba kita kerja yang baik-baik saja. Tujuan kita supaya rakyat Indonesia ini sejahtera.

Tadi saya lihat stok pupuknya cukup banyak ini. Tapi, Bapak-bapak atau Ibu-ibu, sekarang ini yang dibilang elnino ini sudah berjalan. Di dapil saya itu hujannya tidak merata. Kadang di sebelah desa hujan, disebelahnya tidak hujan. Jadi musim tanamnya tidak merata. Jadi orang mau bilang gagal tanam juga salah. Nanti beraibatya pada gagal panen, berakibat lagi busung lapar, berakibat lagi jangan sampai virus coona *dorang* lagi, kita habis semua.

Jadi ini yang perlu kita bicarakan secara matang, ada kejujuran diantara kita. Kami sebentar lagi, sekarang sementara ada yang kundapil, nanti reses. Jadi niat Bapak-bapak juga baik, kami juga baik. Yang penting tidak ada dusta diantara kita, itu saja. Kita semua ini pintar-pintar semua. Tapi pintar ngomong, dilapangannya tidak sesuai kenyataan, ini yang sangat saya takutkan. Satelit terlalu banyak, segala macam satelit kita pakai, tapi buktinya Indonesia masih impor pangan dari luar juga.

Jadi kira-kira itu saja, kekecewaan saya hanya itu saja. Mudah-mudahan kedepan dengan adanya kita rapat dengar pendapat atau rapat bersama bisa memperbaiki keadaan. Kasihan kita punya rakyat.

Cukup, terima kasih banyak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;
Yang saya hormati, Pak Dirjen bersama dengan seluruh jajarannya, dan Pupuk Indonesia.

Pupuk ini adalah kebutuhan petani pokok petani kita, utamanya petani kecil yang mungkin hanya setengah hektar dia punya lahan betul-betul dia bergantungnya di pupuk, pupuk subsidi utamanya. Karena kalau dia tidak pupuk produksinya turun. Ataupun kalau dia pupuk, tapi pupuk non subsidi, maka pendapatannya semakin kecil. Oleh karena itu perlu kita betul-betul perbaiki persoalan pupuk kita ini. Apalagi menggunakan anggaran yang cukup besar, kurang lebih 26 triliun.

Saya sependapat dengan misi '6 tepat', tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat harga, ini harus betul-betul

berjalan. Persoalannya adalah, saya tidak meyakini bahwa jumlah yang dialirkan perusahaan sesuai dengan jumlah yang subsidi yang diberikan, atau sesuai dengan data luasan yang diberikan ke Mentan. Karena di satu sisi kita belum sepatutnya dengan data Kementan dengan BPJS dan lainnya, utamanya tentang data luasan yang sebenarnya. Total pupuk subsidi 7,9 juta, setara dengan 26 triliun. Pupuknya dimana saja, dikemas dimana, dialirkan kepada siapa, ini menurut saya semuanya belum bisa kita menerima secara tepat.

Satu contoh, di kawasan timur Indonesia dengan alokasi kurang lebih 254 ribu ton kita sudah tinjau pada kunjungan reses yang lalu. Kita lihat tempat pengemasan pupuk untuk kawasan timur Indonesia di Makassar, hanya 4 *line*. Saya kira apakah akan mampu mengemas 254 ribu ton hanya dengan 4 *line*? Berarti dia akan mengemas 21 ribu ton setiap bulan, atau 706 ton setiap hari. Ini saya tidak yakin dengan kapasitas yang terpasang dengan jumlah yang harus dialirkan. Oleh karena itu terus terang saya tidak meyakini.

Yang kedua, data RDKK ini sengaja dibuat untuk dijadikan data bukti bahwa pupuk telah tersalurkan dengan RDKK. Untuk audit BPK *oke*, dia terima. Tapi RDKK tidak menjadi bukti penyaluran pupuk petani. Buktinya RDKK dibuat 63 ribu ton yang diberikan hanya 23 ribu ton. Jadi RDKK tidak menjadi dasar untuk menyalurkan kepada petani. Bisa saja menjadi dasar pertanggungjawaban, tapi penyaluran tidak, karena RDKK tidak didasarkan atas penyaluran.

Yang ketiga, peruntukkan pupuk yang seharusnya kepada petani pangan, atau petani miskin, tapi justru sebagian digunakan di perkebunan sawit, utamanya INTI. Saya kira ini menyalahi aturan. Faktanya, kunjungan reses saya di Sulawesi Barat, saya ingin sampaikan, saya contoh tiga kabupaten. Polewali Mandar luas areal sawahnya 18.450 ribu hektar. Pupuk yang diberikan hanya kurang lebih 6.230 ton. Kabupaten Pasang Kayu *full* sawit, dan disana perkebunan INTI, perkebunan INTI perusahaan besar, Astra, dan lain sebagainya. Luas areal sawahnya dan jagung hanya 3.900 hektar. Pupuk yang diberikan di tiga perusahaan distributor 9.000 ton lebih. Coba bandingkan Pak. Jadi memang pupuk ini masuk di perusahaan INTI. Kalau begini cara penyalurannya tidak sesuai dengan data areal sesungguhnya di satu lokasi dengan yang diberikan.

Demikian halnya dengan Mamuju. Mamuju luas areal persawahannya 16.375 hektar. Jatah pupuk yang diberikan hanya 5.600. RDKK yang diajukan itu kurang lebih 30.000. Jadi siapa yang menentukan? Bukan distributor, tapi adalah jatah yang diberikan oleh pemerintah.

Kesimpulan saya bahwa, dalam menyalurkan Saudara tidak menggunakan data yang benar, utamanya dalam pengambilan keputusan. Landasan distribusi tidak jelas, begitu juga besar produksi yang sesungguhnya sulit untuk dipercaya. Untuk itu walau lambat bayar barangkali Pemerintah juga perusahaan tidak pernah mengalami. Karena bisa saja hanya pupuk subsidi yang di produksi.

Pendapat saya adalah, ada transparansi terhadap perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan pupuk bersubsidi. Jangan monopoli. Dan lebih-lebih jangan di korupsi tentunya. Untuk rakyat kecil kita harus punya hati yang besar untuk bagaimana mengentaskan mereka dari kemiskinan. Manajemen penentuan alokasi pupuk per wilayah diatur ulang agar sesuai dengan data areal sawah yang sesungguhnya. Jangan berdasarkan kehendak saja, tapi lihat data persawahannya berapa. Jangan hanya menyalurkan berdasarkan RDKK, RDKK nya tidak jelas juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana diawasi dengan baik, dibuat sistem pengawasan yang lebih baik demi untuk kepentingan petani kita.

Khusus untuk Dirjen Pangan, ada beredar di media sosial ini alokasi bantuan benih jagung hibrida provinsi tahun 2020, ada 3 provinsi yang tidak mendapatkan disini. Saya lihat di media sosial. Yang pertama adalah NTB, yang kedua Kepri, yang ketiga Sulbar. Saya Dapil Sulbar, apa dasarnya sehingga tidak dapat bantuan benih jagung Sulawesi Barat ini. Kalau ini media sosial salah berarti saya minta maaf, karena saya ambil dari media sosial *facebook* tadi.

KETUA RAPAT:

Cukup, Pak Suhardi?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terakhir.

KETUA RAPAT:

Setengah menit.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya setuju dengan Kartu Tani. Hanya saja apakah ada jaminan kalau sudah orang pegang Kartu Tani pasti dapat pupuk subsidi?

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fraksi Golkar, silakan Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan beserta Anggota Komsis IV yang saya hormati;
Unsur Pemerintah, dan kemudian dari para *Stake Holder*, dari Direksi BUMN yang hadir.

Pertama, saya sebagai partai pendukung Pemerintah rasanya malu kalau masa jabatan lima tahun terakhir ini pemerintahan Jokowi tidak mampu menyelesaikan persoalan *carut-marutnya* pupuk subsidi yang tujuannya untuk petani.

Pupuk subsidi ini tujuannya adalah untuk diberikan kepada masyarakat petani yang tidak mampu. Oleh karena itu tadi saya betul-betul mencermati apa yang disampaikan Pak Dirjen, kemudian Pak As, dan kemudian juga dari Himbara. Kepada persoalan pupuk, Pak As, Bapak harus ada keberanian dan harus berani turun ke lapangan, apakah sistem distribusi pupuk ini sudah berjalan dengan baik atau tidak?

Pertama, Pak As, tentang penunjukkan distributor ini amburadul, tidak karu-karuan. Coba bayangkan kalau sistem pemetaan wilayah/pembagian wilayah distributor satu kecamatan diberikan untuk mendistribusikan di kecamatan lain. Bahkan ada satu di daerah pemilihan saya itu perusahaan dari kabupaten lain ditunjuk sebagai distributor, padahal di kabupaten itu ada pengusaha-pengusaha yang memang siap untuk itu. Kenapa itu tidak dievaluasi selama ini? Saya curiga ini ada permainan antara manajer-manajer dengan para penguasa di daerah. Dan ada juga penguasa di daerah yang menggunakan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang ujung-ujungnya adalah kepentingan penguasa itu.

Dan kemudian, kebijakan distribusi pupuk ini melalui distributor dan pengecer Pak sampai di tingkat distributor saya setuju. Tetapi ketika pengecer harus kita jujur. Di jaman orde baru dulu tidak pernah ada peristiwa pupuk seperti ini. Karena apa, langsung pupuk itu ke desa. Tanpa ada tadi Kartu Tani dan sebagainya. Kenapa itu tidak dilakukan. Ini tentunya harus menjadi perhatian, dan oleh karena itu Pak Aas perlu ada satu keberanian untuk mengevaluasi terhadap sistem di distribusi, penunjukkan distributor dan pengecer.

Pengecer itu banyak yang tidak bermodal. Karena mereka modalnya RDKK tadi. Begitu RDKK turun itu untuk nebus, bahkan petaninya suruh bayar duluan. Tetapi ketika pupuk datang, karena belum hujan, pupuknya dijual kepada orang lain dengan cara di ecer.

Langsung masuk poin kedua, karena waktunya 3 menit, adalah Kartu Tani.

Ibu Mus yang saya hormati.

Tidak ada salahnya kalau kita/Pak Menko mengevaluasi kembali. Saya mau tanya siapa yang bikin Kartu Tani ini? Apa maksud tujuannya? Ini jangan

sampai main-main antara bank pemerintah dengan kebijakan atau pengambil kebijakan atau pengambil kebijakan ketika itu.

Bank pemerintah inikan saya tahu *mindset*-nya itu adalah ini perputaran uang sekian triliun dari rakyat untuk pupuk subsidi. Alangkah luar biasanya kalau uang ini masuk ke Himbara, karena dia akan bisa mengendalkan uang yang segitu besar. Tetapi tidak pernah tahu situasi kondisi lapangan petani kita ini kayak apa.

Saya mendukung data yang disampaikan Mbak Endang tadi, petani kita ini jangan dikira orang yang melek teknologi. Petani kita ini semua ada di kampung-kampung. Saya ini anak petani Pak. Jauh dengan kantor-kantor bank. EDC yang Bapak sampaikan tadi itu teori Pak. Apakah EDC Bapak yang dibawa kampung-kampung itu tidak pernah ada *blank spot* dan sebagainya? Dan kondisi petani kita yang 50 tahun itu, walaupun PIN yang Bapak kasih seragam, itu tingkat kelupaan juga tinggi.

Dan banyak petani itu, saya masih ingat orang tua saya, ketika mau panen itu gadai jarit, gadai emas-emasan, untuk beli pupuk. Tidak seperti Bapak-bapak yang sekarang duduk ini, duitnya banyak. Ketika sudah dapat duit harus setor ke bank dulu. Banknya dimana, kartunya seperti apa. Ini harus Bapak pikirkan. Oleh karena itu, Pak Pimpinan, Kartu Tani ini gagal total, 'Gatot' namanya, gagal total. Kenapa kita harus mengulang kegagalan-kegagalan ini. Kenapa kita tidak menyederhanakan, memberikan servis yang baik. Abaikan itu *maindset*-nya Himbara ini 'uang yang sekian banyak'. Carilah peluang yang lain. Tolong petani ini diperhatikan betul.

Dan yang terakhir, Ibu Endang tadi betul bahwa petani kita ini banyak petani yang tidak memiliki lahan. Pak Dirjen, tadi Bapak mensyaratkan bahwa untuk minimal memiliki lahan 2 hektar banyak petani kita yang nyewa pak, nyewanya tidak sampai 2 hektar pak. Dan itu kalau lahan sewa, artinya tidak punya hak. Akhirnya yang pegang Karhutani siapa, yang milik lahan siapa. Nah, ini kondisi-kondisi ril di lapangan mohon dipertimbangkan Pimpinana. Saya rasa rapat RA ini saya setuju Pak Sudin dalam menangkap tadi jangan buru-buru mengambil keputusan, mengaminkan apa yang di inginkan teman-teman yang ada di depan ini tetapi kita harus ada keberanian, kalau memang rakyat tidak *heppy* tidak *enjoy* dengan kebijakan ini mari kita batalkan kebijakan ini. mari kita buat rakyat kita senang, mari kita buat rakyat kita supaya happy. Seperti bapak-bapak yang menjabat sebagai pejabat pemerintah maupun perbankan ini. saya rasa ini yang kami sampaikan, ini betul-betul suara dari rakyat karena anggota DPR yang 50 orang ini Pak. mungkin lebih dekat kepada rakyat dari pada bapak-bapak sekalian. Jangan berharap kepala dinas itu turun kelapangan, tidak ada pak kepala dinas. Petani ngadep ke kepala subdit saja susah, apalagi kepala dinas. Jadi itu kondisi ril di lapangan pak, jadi mohon perhatian jangan takut kita merevisi satu kebijakan yang memang tidak berkepentingan kepada rakyat.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Fraksi penguasa Pak Effendi.

F-PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi IV DPR RI dan Bapak-bapak Eselon I.

Yang kita bicarakan ini adalah sangat setrategis kepada pertumbuhan dari pada petani kita. Bapak-bapak yang menjadi masalah utama di daerah itu pak yang berperan RDKK nya pak, karena dari tahun ke tahun itu-itu aja. Karena dinas itu mem-foto copy RDKK yang lama. Jadi untuk itu saja dan saya tahu pak, ada yang sudah kaya. Karena apa dinasnya ini kurang aktif mendata. Baik dari Rt, Rw segala macam memberikan rekomendasi terhadap mana yang layak mendapatkan RDKK Pak. jadi yang paling utama kita berada RDKK. Saya kira sekarang adanya kartu tani, saya kira tidak begitu berpengaruh. Seperti kata Pak Firman tadi, mungkin ada konotasi biar ada perputaran uang di Bank. Tapi yang jelas RDKK dengan sistem belum kita berhasil merubah lagi, besok kita rubah lagi. jadi saya kira kita musti aktif lah. Kepada Eselon I, mendorong dinas-dinas di daerah karena di daerah pemilihan saya belum pernah saya mendengar ini pembicaraan karhutani apalagi ada syarat-syaratnya. Umur 50 tahun, yang petani pak umurnya 60 tapi tanahnya umurnya ratusan tahun.

Jadi saya kira di persimpel ininya dan juga bahwa kartu tani ini betul-betul di kaji dengan baik. Saya kira kalau kubu Indonesia tergantung dari pada berapa banyak RDKK yang di siapkan oleh kubu Indonesia. Dan mungkin juga nanti ada maslah-masalah keuangan dengan pemerintah saya kira tidak begitu masalah. Tapi yang jelas Dirjen, Kepala Dinas, dan daerah harus sama-sama mensosialisasikan RDKK ini dengan baik dan di awasi, bukan hanya teori yang kita bahas disini. Kalau teori di sini sangat bagus tidak ada yang kurang disini. Seperti kata Bu Endang tadi. karena Bu Endang ini Doktor ini. Jadi sekarang saya kira kita benahi kedepan ini dengan baik jadi nanti kita awasi pelaksanaannya. Karena ada progresnya, tadi baru 10%, sedangkan petani kan100%. Nah, yang 90% nya itu dari mana. Saya kira itu saja dari saya pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih Pak Effendi.

Silahkan Ust. Haerudin Partai Amanat Nasional.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, Mitra kerja, baik Pak Dirjen, baik dari Kementan, baik dari Kemenko, baik dari Building Company, baik dari Himbara dan Telekomunikasi, yang hadir.

Terima kasih.

Atas kesempatan yang dieberikan kepada saya, saya ingin menyampaikan beberapa hal Pimpinan termasuk tanggapan terhadap apa yang di sampaikan dari bapak-bapak yang tadi.

Pertama dari Pak Dirjen, tentu kami berharap bahwa alokasi daerah dari Permentan harus di ubah. Kan hanya kitab suci yang tidak boleh di ubah Pak Dirjen. Kalau pengalokasina ternyata menimbulkan gejolak, akan menimbulkan kelangkaan pupuk di daerah-daerah padat itu harus di pertimbangkan. Kami mohon dengan hormat itu di pertimbangkan karena ada beberapa daerah, provinsi yang mengajukan perubahan yaitu betul-betul di respon sesara positif.

Kedua untuk Pak Dirjen, persoalan alokasi yang ada di kita memang tidak bisa kita berbasis pikiran tunggal. Yang di sebut dengan laha baku ladang kita atau sawah kita. tidak hanya dari situ. Contoh Pak Dirjen di jawa ini mungkin lahan sempit tapi orangnya banyak. Satu orang punya 100 tumbak, ada yang 200 tumbak, ada yang hektar. Kalau di daerah Sumatra jarang yang punya 100 tumbak, banyaknya hektar. Nah mereka itu butuh keadilan untuk menerima pupuk. Itu yang ingin kami sampaikan

Yang ketiga dari Ibu Menko, Perwakilan dari Menko Perekonomian ya. tapi amin Bu bilang Ibu Menko itu amin, nanti ganti Pak Luhut Ibu. Yang kedua ingin kami sampaikan juga. saya setuju dengan yang di sampaikan oleh Ketua Pimpinan Komsis IV. Ketua Sudin menyampaikan bahwa harusnya satu daerah dulu clear. Ini uji coba tapi kita keseluruhan, sampai keMenterian sangat serius dari elektronik kartu kartani itu. dan ini akan luar biasa gejolak ketidak seimbangan. Kalau kita menghitung petani kita di meja, tidak tahu kultur petani kita sangat beratakan ini bu. jadi mengitung petani kita jangan hanya kalkulasi matematis, hitungan di meja dengan teori baru, kita harus memahami budaya tani kita bu, kalau tidak kita berantakan kedepan. Dengan segala hal tadi yang telah disampaikan teman-teman Komisi IV, bahwa harus di ulang kembali tentang kebijakan kartu tani ini. saya secara pribadi, untuk melihat kondisi daerah kita masih manual itu akan lebih tertib dan bijaksana. Tentunya kita melihat keadaan setabil dan juga tentunya pencerdasan. Contoh Bu, tahun dua ribu sekian bayangkan 75% Papua, terus prangkatnya apa bisa mencapai persentase itu Bu. kemampuan pendidikan, alur komunikasi. Contoh 2020 di tanah Jawa ini masih ada kampung yang belum ada listrik bu, jangankan Handphone listrik aja belum dan di situ tempat penduduk kita dan juga warga negara kita yang punya hak. Nah untuk itu

fokus daerahnya berbasis pada mana wilayahnya yang memungkinkan aksesnya ada. kalau aksesnya tidak ada dan tidak di hitung ini jadi masalah besar bu. nah untuk itu berdampak pada berapa hal termasuk alokasi. Alokasi yang tadi Pak Dirjen jadi fitnah bagi Ketua Sudin, karena Lampung 100% alokasi naiknya. Jadi fitnah untuk Pak Menteri Sulawesi Selatan naik 100% alokasinya. Jawa Barat, Jawa Timur turun alokasinya 25%, jadi fitnah untuk ketu Sudin yang kaya begitu tuh.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, apa yang di katakan oleh beliau ini tolong dijelaskan. Jangan nanti KKN, mentang-mentang Ketua Komisi IV DPR RI asal Lampung nanti aja Pak. karena saya merasa tidak nyaman seolah-plah saya di bilang KKN. Kalau tadi itu di putuskan sebelu, saya menjadi Ketua Komsu IV DPR RI Ini nanti tolong di jelaskan. Lanjutkan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih.

Nah, itu jadi fitnahnya karena Bapak Ketua, demi Allah saya tidak tahu urusan yang begitu tu. Selanjutnya ingin kami sampaikan juga bapak PI, berapa menolak Dari salah satu produsen kita. ini persoalan kualitas, tadi kesiapan PI begitu hebat dalam tulisan. Saya ingin sampaikan tahu tidak bapak banyak gudang yang bocor? Dan PI, produsen tidak mau tahu. apa dampaknya Pak kaya bubur. Ada yang daerah Majalengka, nanti saya lapor fotonya. Tapi itu butuh perbaikan. Saya ingin sampaikan kepada Pimpinan, pada waktu saat kita membuat Panja pupuk Pak. Kita mulai urut dari awal pak, dari mulai bahan baku, produksi sampai pemasaran. Saya lanjutkan sebentar lagi hanya khusus PI dan produsen. Kenapa kita buat panaj karena kita butuh neraca niaganya, ini duit Negara Pak Aas dan kawan-kawan, ada Kujang hadir di sini, mana Kusri, mana Kaltim, mana Petro.

Saya ingin sampaikan begini, ini bapak-bapak ini diberikan amanah Menteri BUMN untuk menjadi Dirut Utama, mereka di modali besar oleh Negara. Rp. 32 triliun subsidi pupuk. Itu seluruh modal utama di seluruh produsen ini. Lantas kenapa kita rugi? Lantas kenapa kita bermasalah pupuknya? Ada apa dengan kinerja kita itu. nah kalau urusan pasar kita tau, tidak pernah turun pasar pupuk. Pupuk masih tetap langkah seberapa besar, karena RDKK kah yang lebih kecil dari pada luasan lahan. Seperti yang tadi di belakang di bicarakan oleh teman saya Pak Sianipar, bahwa lahan kita punya 100 hektar belum tentu semua terdaftar. Salah satunya adalah kepala dinas pertanian kita dan perangkat di bawahnya itu malas melakukan Inventarisasi. Untuk itu butuh evaluasi di internal PI, butuh evaluasi kinerja. Dirut itu jangan mikirin mobilnya yang mewah, pikirin barangnya mewah, pikirin gudangnya baik jangan kotor, Nah, tolong di perhatikan Pak, dan seluruh pejabat di PI kita.

Jadi subsidi itu ongkos ekspedisinya ada, ongkos sosialisasinya ada, ongkos bongkar muatnya ada, onkos produksinya ada kenapa rugi terus? Pak

Aas dan kawan-kawan ini datang ke pupuk di Indonesia ini, punya Negara ini di modalin bukan bawa duit bukan jual sawah nenek buyut bukan. Maksud saya mengingatkan, tapi kalau tidak bisa di ingatkan kembali kita akan melakukan langkah-langkah strategis.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Haerudin 3 menit lebih.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Pimpinan beserta seluruh Anggota dan para Dirjen yang kami muliakan, serta para mitra yang sudah hadir,
Pak Dirjen beserta jajaran yang kami muliakan.

Perlu kami sampaikan yang pertama, bahwa saya masih menagih apa yang di sampaikan Pak Menteri menyangkut data. Dari tadi juga kita berbicara data yang tidak valid. Saya juga baru pulang dari reses di Aceh, di mana data yang kami terima tentang luas lahan 195.000 hektar, sedangkan faktual yang disampaikan kepada kami saat reses dengan kepala Dinas bahwa 230. Di sini saja terjadi perbedaan luas areal perswahan. Secara data 195 tetapi faktualnya 230. Di tambah lagi dengan pupuk bersubsidi, di Aceh mendapatkan 36% dari RDKK. Maka pada kesempatan ini kami meminta kepada KeMenterian untuk memperhatikan khususnya Aceh. Bahwa sangat tidak pantas kalau ke Aceh hanya mendapat 36% dari RDKK.

Karena yang pertama kami memiliki industri pupuk di sana yaitu PIM. Kami juga perlu sampaikan kepada Dewan dan Komisi IV DPR RI , bahwa sebenarnya produksi bagi daerah kami rugi, kenapa? Karena harga gas yang masuk ke PIM itu sekitar 7,08 Us Dolar per mbtu. Sedangkan gas itu dari yang seharusnya dijual 9,7 Us Dolar per mbtu. Selisih harga yang dijual kepasar oleh mesco 2,5 dolar per mbtu. Dengan harga yang kita jual ke PIM kurang 2,5 dolar kami Aceh kerugian pendapatan. Karena Aceh ada 60/70. Sehingga Aceh kerugian Rp. 65 miliar per tahun kalau tidak salah Pak Prim ya. jadi produksi tim gas yang kami berikan dari Aceh, Aceh rugi Rp. 65 miliar per tahun. Maka saya minta kepda Pak Dirjen, KeMenterian agar memperhatikan kerugian Aceh Rp. 65 Miliar per tahun akibat kami menjualkan gas kepada PIM. Kalau tidak kami Aceh tidak sepakat memeberikan gas kepada PIM, karena kerugian daerah kami Rp. 65 miliar per tahun. Tapi kami sepakat agar PIM hidup pupuk juga diberikan dengan persentasae yang lebih tinggi kepada Aceh. Ini saya mohon Pak, karena ada industri PIM di Aceh tapi pupuk bermasalah di Aceh. Ini harapan kami bagaimana sekema yang kita berikan, kemudian persentase yang lebih tinggi agar PIM bisa hidup, masyarakat juga tidak bermasalah dengan pupuk.

Kami telah memberikan subsidi kepada Negara Rp. 65 miliar per tahun kurang lebih. Yang terakhir saran saya, saya pernah teringat apa yang di sampaikan oleh Pak Mindu ya. Kalau bisa penyalurannya dari distributor langsung ke BUMD. Ini bagaimana agar penyalurannya tidak ada permainan ini mungkin nanti skemanya bisa duduk dengan Pimpinan kami dengan

kami untuk mengatur skema. Kalau kita berdebat disini terus ini tidak akan selesai, saran saya ada waktu-waktu tertentu yang di manfaatkan Pimpinan bersama ... untuk duduk bersama, merangkum, merancang sebuah strategi untuk kita sepakati bersama di sini.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Nasdem, Abdullah Tuasikal

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASTIKAL, M.Si.):

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Pak Dirjen beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Memang banyak orang dan banyak pendapat, saya mau ... Saya Dapil Maluku. Sebenarnya di sini ada penyakit, bagaimana cara kita memberi obat, untuk itu kasus ini sangat penting. Kalau buat saya dengan RDKK ini sebenarnya bisa menggambarkan dan menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Kalau kita telusuri dan kita cermati bahwa di setiap daerah kan ada penyuluh, ada gapoktan dan ada petani. Mari kita cermati penyuluh punya tugas sosialisasi kepada gapoktan dan selanjutnya gapoktan sosialisasi ke kelompok tani untuk mendapatkan gambaran berapa lahan tanah yang di miliki oleh masing-masing orang kelompok. Ada pendapat bahwa ada kelompok yang tidak mempunyai lahan dan ada kelompok yang memiliki lahan. Kalau kegiatan ini benar-benar serius dan tertata dengan baik, maka bisa dapat ketahuan bahwa sebenarnya berapa luas lahan tanah yang di miliki oleh petani? Kalau petani atau kelompok ini belum terakomodir kepada kelompok-kelompok itu maka data tanah pun tidak akan terakomodir. Itu menurut saya.

Untuk itu saya kira untuk Dirjen atau eselon I KeMenterian Pertanian. Kami harapkan agar kita lebih serius. Karena kunci dari pada validasi data yang ada itu ada pada penyuluh. Penyuluh kita di daerah sudah hampir habis bahkan rata-rata pensiun. Lalu dikatakan penyuluh itu yang mana? Untuk itu saya harapkan agar KeMenterian apakah penerimaan pegawai honor atau apa silahkan saja yang penting penyuluh diperbanyak. Karena apa yang kita dapat di lapangan saya ini soalnya pernah di lapangan, pernah memimpin daerah selama 10 tahun. Dan dengan regulasi yang ada maka saya turun kembali untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi. Yang terjadi itu adalah distributor, ada distributor dengan pengecer, ada distributor jujur dan ada distributor yang tidak jujur. Distributor yang tidak jujur dengan penyaluran kepada kelompok tani dengan tanda tangan kosong. Karena dengan tanda

tangan kosong itu maka distributor itu dapat menjual pupuk dengan harga yang lebih tinggi. Untuk itu kita harap ini harus menjadi serius, karena apa Pak Dirjen di wilayah kita itu terus terang saja kalau bicara tentang penyalahgunaan pupuk saya kira belum. Karena pupuk yang disediakan berdasarkan RDKK, kalau petani lewat gapot dan seterusnya, Kabupaten dan Provinsi itu maka jumlah itu terdistribusi ke Kabupaten. Pertanyaannya apakah dengan DKK data yang ada ini masuk ke sampai di Provinsi di setuju semua apa tidak? Jadi kita harus komitmen, kita dari DPR Komisi IV juga harus komitmen. Kalau informasi dari DKK dengan data sekain juta ton agar tidak kelangkaan pupuk. Makanya kita sepakat untuk menyetujui dana yang dibutuhkan oleh KeMenterian. Saya kira kalau tidak kelangkaan pupuk itu pasti ada. kelangkaan pupuk bukan tidak disediakan oleh KeMenterian tetapi kelangkaan pupuk mungkin persediaan dana mungkin itu tidak cukup. Ya untuk itu kepada KeMenterian data validasi ini harus lebih serius, tapi saya kira kunci ada pada penyuluh dan kunci ada pada keseriusan dan kunci itu ada pada distributor.

Yang terakhir wilayah kita kalau Jawa karena Jawa kan tidak semua. Wilayah kita kan kalau lihat-lihat dari sinyal hampir-hampir semua tidak ada. Distributor ada di Kecamatan saja, itupun petani mendapatkan data itu kesana saja agak sulit. Apa lagi kalau kita semuanya sudah pakai elektrik sudah pakai program-program yang lain. Untuk itu Pak Pimpinan saya kira kalau buat saya pendapat saya, marilah kita anggap bahwa semua Kemetrian ini adalah virus yang harus kita selesaikan. Mari kita memberikan jalan keluar, apalagi virus corona sudah mulai datang ini ya. kalau buat saya memang pendapatnya berbeda inikan Dapil saya juga. Ini sebenarnya ada apa, ada apa kejujuran itu lalu kita menyelesaikan masalah. Kita disini datang bukan untuk saling menyalahkan. Tapi bagi saya bagaimana Negara ini kita selesaikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, tidak ada korupsi dan lain-lain. Dan untuk itu ini kasus daerah kita. yang menyangkut masalah pupuk saya turun langsung tidak ada yang dikatakan penyalagunaan lain-lain, yang ada hanya distributor yang tidak jelas lalu masukkan RDKK sampai di tingkat provinsi sampai dengan yang di usulkan. Untuk itu harapan saya agar tenaga penyuluh harus ada pada wilayah-wilayah kita.

Saya kira demikian atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, ini tertulis Hilmi namanya (BKO). Memang khusus hari ini karena beliau ini pakar distributor pupuk ini. Kami persilahkan Dapil Jawa Timur ini, Gersik, Lamongan. Silahkan pakar distributor.

F-GERINDRA (KHILMI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Ketua Komsis IV DPR RI beserta Wakil yang terhormat,
Yang saya hormati Anggota Komsis IV DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak dan Ibu dari Bapenas, dari Dirut
pupuk dan dari Himbara.

Jadi sayaini sampai bingung juga loh Bu, kalau pemerintah ini melakukan hal-hal yang belum membuat kajian secara benar terus langsung di laksanakan seperti penggunaan kartu elektronik ini. Ibu sudah mempelajari tidak kelemahan-kelemahan dari kartu tani ini. Ini yang perlu di kaji dulu sebelum melaksanakan hal yang penting, jadi ini kan sengsara semua. Di dapil saya ini sekarang terjadi demo-demo karena masyarakat tidak bisa menebus pupuk kalau tidak berdasarkan RDKK, padahal ERDKK di Jawa Timur di ajukan itu yang di setujui cuma 60%. Jadi ini berdasarkan data ERDKK yang salah itu Pemprov atau Menteri Pertanian, tapi kalau saya percaya Pemprov sama Kabupaten yang saya saja. Karena di situ adalah masyarakat yang memilih saya yang mempercayakan saya. Jadi sebuah kebijakan itu harus dipikir matang jangan amsyarakat demo samapi kaya begini, ini kan kaya anak kecil saja. Kemarin saya ngitung BPS, ngitung kebutuhan pokok hasil panen di bagi delapan berapa hektarnya. Ini tidak boleh Pak, ini negara. Negara itu di laksanakan berdasarkan undang-undang, jadi ini lah saya tidak akan membahas hal-hal yang remeh temeh. Tapi saya akan mempercayakan bahwa ERDKK yang di buat Pemprov dan Pemkab itu adalah benar. Jadi kartu elektronik jadi.

Coba saya tanya sama Bapak sekarang ya, bisa ini Pak di jawab langsung. Kalau saya itu petani sekarang seperti di Dapil saya Sulawesi Selatan, habis nanam kena banjir. Kalau Bapak ngasih E-Kartu abis itu dia besok tidak bisa nebus lagi. Ini yang harus di cari, solusi-solusi yang paling ekstrim. Bapak asal jangan dapat nama pakai kartu tani akan aman, ini saya baca ini bapak. Menurut ERDKK dengan kartu tani tidak akan lagi terjadi kelangkaan pupuk. Sekarang bapak melaksanakan ini, di tempat saya demo dengan pengurangan pupuk ini. Bapak kan harus belajar dari tahun 2015 ke tahun 2020. Bapak itu ngasih pupuk berapa ke masyarakat itu, turunnya berapa. Bapak juga liat, nanti kalau menggunakan E-KTP orang meninggal bisa terdeteksi. Itukan salahnya masih tetap menggunakan pupuk walupun orang meninggal kan itu ada anaknya, bapak harus mikir panjang. Jangan samapi kaya begini. Saya kecewa kalau punya Birokrasi yang pikiranya pendek, harus panjang mikir. Kalau saya melaksanakan ini kedepannya ini akan terjaddi apa. Begitu pak kalau kita ini bernegara jangan sampai menyalahkan, kan ini yang di salahkan pabrik pupuk saja. Padahal kan pabrik pupuk sudah ngasih pertiga bulan tapi kan yang salah ini dinas pertanian. Saya berharap ini kedepan. Karena pupuk ini sebagai nutrisi dari tanaman. Bapak tahu kan di padang Arafah kenapa bisa tumbuh-tumbuhan, karena ada air ada pupuk, itulah fungsi dari pupuk itu. Jadi bapak itu harus mikir gitu loh, masa anggaran sudah disetujui dari Komisi IV berapa triliun mungkin 26 triliun mungkin besaran seperti tahun 2019. Tapi pelaksanaannya bapak motong di tengah jalan ini engga boleh. di Paripurna sudah di ketok, Ini undang-undang. Bapak melaksanakan pemerintahan berdasar kan undang-undang, jangan seenaknya sendiri. Bapak ini sudah pegawai di Dinas Pertanian

sudah lama, masa engga pernah belajar dari hal-hal yang terdahulu, harus belajar Pak.

Jadi begini pak, ini pupuk majemuk inikan masyarakat petani ini kan tidak bisa membuat sendiri. Karena ini kan harus di buat oleh pabrik, jadi kan seharusnya kalau bapak itu kurang subsidi solusikan ada. Bapak sudah ngasih peneglolahan bahan organik tanah. Mana yang harus di kurangi pupuk subsidi yang organik misalnya di alihkan ke pupuk majemuk. Jadi bapak harus pinter-pinter lah sudah ngasih peralatan tani tapi cara berfikirnya masih tidak panjang. Jadi bapak harus benar-benar ini. Kalau nanti bapak ini bener-bener untuk kesejahteraan petani, tolong di tinjau lagi SK-nya dari bapak itu.

Itu dari saya Pak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Mas Hilmi ini biar dianggapi, tapi sampean jangan pulang dulu yak karena BKO.

.....:

Interupsi Pimpinan, jadi saya kira begini Pimpinan.

Apa namanya, emang kita maklumkan Pak Khilmi tadi berapi-api menyampaikan persoalannya di bawah. Tapi alangkah lebih bijaknya nanti di jawabnya kemudian, tuntas dulu semuanya baru kemudian. Dan sekaligus katanya mengikat Pak Khilmi supaya tidak keluar.

Demikian, terima kasih.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh, iya silahkan, ini anak baru juga ini.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Saya anak baru Pak, baru masuk lagi maksudnya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati,

Dari Dirjen dan dari Himbara yang saya hormati.

Saya langsung *to the point* saja....

KETUA RAPAT:

Mau tanya atau intrupsi ini?

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Intrupsi.

KETUA RAPAT:

Oh, iya silahkan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Saya *to the point* saja, menyambung Mas Khoirudin bahwa kualitas pupuk dan lain sebagainya itu karena kurang bagus. Ini bagaimana kalau di lab, antara pupuk *subsidi* dan pupuk *non subsidi*. Yang lab kita, jadi di lab di sandingkan. Karena desas-desus yang ada itu kualitasnya beda, antara pupuk *subsidi* dan pupuk *non subsid*. Nanti kalau perlu KeMenterian Pertanian juga ngelab. Bagaimana kualitasnya?

Yang kedua kaitannya dengan kartu tani. Kartu tani itu hendaknya di tunda dulu, karena permasalahan yang ada di lapangan itu luar biasa banyak. Karena misalnya kios itu tambah kerjaan lagi, sudah menyalurkan pakai kartu tani tapi juga laporannya manual juga perlu. Msalnya kalau laporannya tidak manual itu Bank, karena itukan system perbankan. Jadi tidak menambah beban kios. Intrupsi selesai.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Multazam.

Intrupsinya selesai, Pak Panggah silahkan, nanti Pak Dirjen tanggapannya setelah selesai dengan saran Al-Mukarrom tadi.

Silahkan Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Wakil Ketua, Pimpinan, rekan-rekan Anggota dan Pak Dirjen, Bu Deputi serta Jajarannya, Pak Dirut beserta Jajarannya.

Kami menemukan fakta di lapangan, kami baru saja turun ke Dapil ya. Tadi di sebutkan Temanggung dan Sampang sudah beres dengan kartu tani.

Tapi saya menemukan masih banyak masalah di lapangan. Terjadi kericuhan soal pupuk ini dan kami di tanyakan soal bagaimana ini sebenarnya pupuk ini. Bahkan saya kemarin keliling-keliling, usulannya kalau memang sulit sudah di lepas saja. Sebenarnya mereka itu harga berapa saja mau asal tersedia nah itu. Saya kira perlu di lihat lagi apa yang di sampaikan oleh Pak Dirjen bahwa Temanggung dan Sampang sudah beres. Karena ini pasti ada masalah yang cukup rumit karena satu sisi di katakana, kebutuhan ada, tapi satu sisi stock di gudang menumpuk. Berarti ada permasalahan yang cukup rumit, dari pelaksanaan kartu tani ini. Coba nanti Pak dirjen bisa di jelaskan lebih terbuka ya dan fakta di lapangan, kalau tadi penjelasan keliatannya seperti mulus-mulus saja tetapi sebenarnya ada persoalan yang serius yang tidak tertangani dengan baik. Terkait dengan RDKK ini dari dulu Pak Pimpinan RDKK ini tidak pernah cocok, dari dulu sebelum kartu tani muncul waktu kami mengurus pupuk ya itu tidak pernah cocok, itu Bu Musdalifah tahu antara jumlahnya itu pasti lebih besar dari realisasinya penyerapan, setiap tahun itu tidak pernah dirubah, tidak pernah dikoreksi, selalu begitu, RDKK ini selalu lebih tinggi dari realisasi.

Oleh karena itu, saya kira dibereskan dulu ini data RDKK ini, setelah itu sekarang ditumpuk lagi dengan kartu tani dimana ini juga harus dibereskan juga soal data petani ini kan akhirnya kan? Kebutuhan dari satu petani ke satu petaninya, ini lebih rumit lagi, jadi yang satu RDKK saja belum beres, sudah harus ada PR (Pekerjaan Rumah) soal kartu tani yang itu menyangkut kartu petani. Oleh karena itu, saya setuju dengan Pimpinan tadi itu kita hentikan saja kartu tani ini, kita buat katakanlah kalau memang harus diteruskan dengan uji coba dulu, kalau uji cobanya jawa saya kira masih terlalu luas Pak, kalau perlu Jawa Tengah bagian tengah dulu atau wilayah sangat terbatas ya sehingga kesulitan-kesulitan yang muncul dilapangan itu bisa terdeteksi dalam jumlah terbatas, lah untuk transisinya saya kira diserahkan ke Pupuk Indonesia ini sudah ahli Pak, dari dulu sudah menyalurkan pupuk sejak jaman Bimas, dulu ada istilah *paid line system* itu mulai dari pabrik sampai ke petani, nah sudah serahkan saja ke mereka sementara, dari Kementerian mungkin hanya berfungsi untuk pengawasan, itu lebih baik demikian, mereka sudah sangat ahli daripada mereka sekarang ini sudah seperti ini, belum soal distributor-distributor yang tadi disebutkan banyak distributor abal-abal, ini karena tidak tahu penunjukannya, sistem penunjukkan distributornya itu seperti apa, ini menjadi masalah tersendiri.

Nah, katakanlah kartu tani yang tujuannya apa tidak tahu tetapi yang saya tahu itu tujuannya adalah agar subsidi yang semakin membesar ini bisa ditekan untuk bisa menyalurkan pupuk subsidi tepat sasaran, itu saya kira maksud dari kartu tani ini ya. Namun demikian, yang berikutnya adalah dengan berkurangnya jumlah pupuk yang disalurkan ini perlu pengembangan teknologi pemupukan, saat ini teknologi pemupukan ini belum berubah dari sejak saya masuk Kementerian Perindustrian dengan teknologi *single fertilizer* kemudian *compound fertilizer*, sekarang sudah generasi ketiga yaitu *trip irrigation*, kemudian pupuk itu diintegrasikan didalam sistem irigasi itu, ini sudah dipraktekkan di NTB, di Sumbawa, ini bisa dilihat dipulau Sumba itu sudah melakukan teknologi generasi ketiga, ini masih belum berubah, jadi setelah itu saya kira kalau subsidi memang mau di tekan kemudian teknologi

pemupukan juga harus dikembangkan. Nah, kita tahu Thailand itu tidak punya pabrik pupuk urea tetapi bisa swasembada beras, ini karena teknologi pemupukan yang diterapkan adalah tepat, saya kira ini kalau diserahkan ke Pusri saya kira ini lebih pintar, lebih fokus, kalau pintarnya sih semua pintar ya, tetapi pekerjaannya menjadi lebih fokus, kalau diserahkan ke pemerintah terus terang banyak pekerjaan di pemerintah ini, jadi lebih banyak ini didelegasikan saja ke ahlinya kira-kira begitu. Belum lagi permasalahan...

KETUA RAPAT:

3 menit Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Yang satu poin lagi, ini yang perlu dicermati juga, begitu ada subsidi artinya memang ada disparitas harga antara harga subsidi dan non subsidi, ini dari dulu juga menimbulkan masalah, tidak hanya di Indonesia, misalnya bensin di Singapura sama di Malaysia ada perbedaan harga, ya itu sudah otomatis ada bocoran dari wilayah yang mahal harganya ke murah harganya, saya kira didalam hal pupuk saya yakin itu juga terjadi masalah kebocoran dari pupuk subsidi ini ke non subsidi karena ada disparitas harga, ini diseluruh dunia kalau kebijakan seperti itu pasti kebocoran itu akan terjadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Budi Setiawan, Pak Budi ada?

WAKIL KETUA/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ada Pak.

KETUA RAPAT:

Duduknya biasanya disini.

WAKIL KETUA/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tenang saja Pak, kalau soal waktu kita malah kurang.

Saya cuman ingin fokus di kebutuhan benih, jadi mestinya dalam tabel ini Pak Dirjen bisa membandingkan juga dengan target produksinya Pak, Bapak punya target produksi berapa, kemudian target tanamnya bagaimana kemudian kebutuhan benih, kebutuhan pupuk dan segala macam jadi segala

kebutuhan itu, kebutuhan pupuk itu menunjang kepada target produksi Pak, kan Bapak juga diberi target soal produksi, bukan cuman tanamnya doang Pak, produksinya Pak, karena belakangan produksinya malah turun terus ini, yang saya ingin tanyakan adalah kebutuhan benih, apakah pengadaan benih ini sudah sesuai dengan target kita meningkatkan produksi kita Pak, itu saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup bijak.

Hansi Lema, putera NTT.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang.
Salam sejahtera buat kita semua.

Rekan-rekan Anggota Komsis IV DPR RI yang saya kasihi, Pak Dirjen, jajaran Kementerian, Ibu dari Kemenko dan juga PT. Pupuk.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama, ini kan kebijakan besar yang mau dibuat, Pak kebijakan besar itu butuh data yang akurat dan valid, yang bisa di verifikasi, kalau data ini tidak selesai, ini akan menjadi problem karena distribusi itu butuh validasi data, verifikasi data dan akurasi data, itu yang pertama, sederhana sih kita ngomong soal data tetapi dari dulu tidak pernah tuntas.

Yang kedua, aspek yang juga penting itu adalah teknologi telekomunikasi, ini barang ini pakai sinyal, percuma kita pegang kartu seperti atm tetapi kalau sinyalnya tidak ada ya ini tidak ada fungsinya Pak, apakah kita sudah memastikan bahwa Daerah-daerah ini terkoneksi sehingga kemudian tidak lagi bermasalah dari aspek teknologi komunikasi dalam hal ini sinyal.

Yang ketiga Pak, tadi beberapa rekan terdahulu sudah berbicara soal pentingnya sosialisasi yang artinya didalamnya itu adalah edukasi, petani ini tingkat pendidikannya sangat variatif Pak, petani didapil saya di NTT itu waduh tingkat pendidikannya masih sangat jauh dari, orang bilang melek pengetahuan mungkin Pak, karena itu butuh pendampingan, mereka perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi dan disana peran penyuluh sebagai ujung tombak, kalau kita buka data BPS 2018, petani itu 33 juta sekian, penyuluh itu 67 ribu, jadi 1 penyuluh harus menangani sekitar 495 petani, di NTT Tahun 2018 ada sekitar 940an ribu petani sementara penyuluhnya cuman 2500, jadi 1:380 ini kalau kita mau berpikir secara benar dengan data

yang jelas dan kita melihat bahwa penyuluh ini punya peran yang penting dalam hal ini Pak, apakah ini sudah disiapkan dari aspek manusia Pak.

Yang terakhir, kendala geografis Pak, banyak petani tinggal di Daerah-daerah yang jauh dan tidak mudah, mereka kalau mau mengakses ini harus mengeluarkan uang bolak balik seratus ribu, seratus ribu itu duit sekali buat mereka Pak, nah karena itu usulan saya secara konseptual tampaknya konsep ini bagus Pak tetapi konseptual ini juga harus kontekstual, harus bisa dilihat dari sisi ruang dan waktunya Pak, ada konteks lokal yang harus dipertimbangkan, mengapa tidak dibuat pilot project saja, sehingga dari pilot project ini ukurannya jelas, success story nya bisa kita tangkap, kalau sudah ada success story baru kita duplikasi di wilayah lain yang lebih luas, tetapi untuk mendapatkan pilot project ini kan Pak ini juga butuh sampel yang kita lihat, dari berbagai indikator kesiapan yang sudah saya sampaikan, kesiapan data, kesiapan teknologi telekomunikasinya, aspek edukasi dan sosialisasinya dan juga kendala geografisnya. Terkait dengan RDKK Pak, itu kan ada prosedur teknis yang harus disiapkan Pak, nah mungkin untuk sebagian petani mudah menyiapkan RDKK ini tetapi untuk sebagian yang lain ini persoalan serius buat mereka Pak, belum lagi kalau RDKK ini terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan tertentu Pak, padahal RDKK ini sifatnya bottom up, nah ini bagaimana mekansime ini dibangun untuk bisa menutup berbagai kelemahan-kelemahan ini yang ada Pak.

Yang kedua, soal pupuk, kita tahu pertanian butuh pupuk, pupuk itu butuh role material yang namanya gas, hari ini harga gas naik diatas angka patokan 6 jadi 7 lebih bahkan ada yang 8 Pak, nah yang ingin saya tanyakan ini bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah mengantisipasi hal ini, soal kenaikan harga, gas ini. Yang kedua, tadi Pak TA. Khalid teman saya dari Aceh itu bicara tentang PT. Pupuk Iskandar Muda, dulu Exxon kalau tidak salah yang menjadi pemasok disana, hari ini Exxon sudah hengkang Pak dan dampaknya itu besar terhadap Pupuk Iskandar Muda ini, nah saya ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif utuh, apa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk hal ini, apakah ada hitung-hitungan kalau misalnya di injeksi modal untuk Pupuk Iskandar Muda kira-kira dampaknya terhadap pertanian ini sebesar apa, nah ini mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Haji Sutrisno PDI Perjuangan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Wakil Pemerintah Himbara, langsung saja, karena waktunya 3 menit. Permasalahan pupuk ini tidak bisa dilepaskan dengan kartu tani, jadi artinya apa? permasalahan bukan hanya terletak pada petani saja, untuk diketahui

pabrik, agen penyalur juga terlambat, selama ini terlambat dalam mendistribusikan pupuk ke petani, masalahnya kenapa? Karena disetiap agen penyalur tidak menyediakan stok pupuk, pupuk itu datang langsung dari truknya langsung dibagi, satu ketika rakyat petani perlu pupuk akhirnya pupuk tidak ada, karena agen-agen ini hanya memiliki kontrakan, sewa rumah, pemiliknnya pun dari luar kabupaten. Oleh karena itu, usulnya Pimpinan bahwa perlu penertiban agen dan penyalur pupuk itu perlu ditertibkan, perlu diresdistributor, ini kendalanya.

Kemudian yang kedua, penyediaan pupuk oleh pabrik yang sekarang bergejolak termasuk tadi Jawa Timur katanya juga bergejolak demo dan segala macamnya, ternyata dari data Dirjen Pangan halaman 15 bahwa kebutuhan pupuk Januari-Maret itu tercatat 3.493.819 ternyata yang disediakan hanya 2.066.816 ini data pada halaman 15 dari Dirjen Pangan, jadi artinya hebohnya dilapangan karena seolah-olah penurunan subsidi, padahal penurunan subsidi ini karena area lahan memang berkurang akibat digunakan untuk kepentingan lain lahan pertaniannya bukan dipotong begitu saja. Kemudian, sekarang di lapangan dari Pupuk Indonesia ini rakyat kekurangan SP36, jadi SP3 melangkah dilapangan, saya kebetulan dari daerah Pak langsung kesini, cek dulu di kios-kios, nah ini apa akibatnya? Ada permainan harga ini, ada perbedaan harga di kios yang satu dengan kios yang lainnya karena kelangkaan pupuk.

Kemudian, kebijakan subsidi pupuk 2020 itu juga diantaranya untuk pupuk organik yang Tahun 2019 1 juta ton sekarang ditingkatkan menjadi 5 juta ton, data ini Pak, saya copy data ini, kalau salah ya mohon maaf ini. Saya bersyukur diperbesar, kenapa bersyukur? Karena harus jujur lahan pertanian sawah di pulau Jawa ini pada umumnya sudah jenuh, kalau kita turun ke lapangan itu hanya sekeong, semata kaki, bagaimana tingkat kesuburan bisa ditingkatkan, sehingga pada saat yang lalu Pak Dirjen PSP itu melepas ekspor pupuk organik ke Malaysia saya bangga Pak Dirjen tetapi saya tidak bangga, karena petani kita tidak diberikan pupuk organik, mestinya yang didahulukan adalah kepentingan rakyat petani kita sebelum kita ekspor, kalau kelebihan *manga* untuk di ekspor. Kemudian, dari sisi petani ini, kartu tani di Jawa Barat ini belum dipakai data yang disampaikan dari Dirjen PSP, itu baru mencapai 1-1,5% nah ini kartu-kartu tani ini Pak Dirjen itu dikumpulkan ke oknum, oknum lah yang mengambil untuk diijonkan, ini persoalannya, kenapa begitu? Harus disadari bahwa sebagian besar petani di Pulau Jawa itu adalah petani penggarap, kalau tahun ini tidak bayar, dicabut sama pemiliknya ganti sama yang lain, ini salah satu faktor yang menyebabkan RDKK jumlahnya lebih besar daripada yang sebenarnya, sehingga layak manakala Komsis IV DPR RI juga mengusulkan bikin Panja saja supaya jelas persoalannya.

Kemudian, penyelesaian kartu tani Pak, tadi Teman-teman agak radikal dihentikan saja, saya ke moderat, manakala mau diteruskan harus diperbaiki, jadi tidak akan ada artinya hasilnya, tidak akan mencapai tujuan sebagaimana tadi disampaikan, karena sumber data dasarnya itu adalah sudah salah, sudah tidak valid, jadi para penyuluh itu, itu mengambil data yang lama, yang sudah salah, mestinya kalau tujuannya ingin memperbaiki, meningkatkan efisiensi, mendidik rakyat menuju modernisasi, ini adalah

kesempatan terbaik untuk memperbaiki secara komprehensif. Dengan memanfaatkan penyuluh untuk mendata ulang. Nah, tinggal dua pilihan Pimpinan mau dibatalkan atau diperbaiki sistem apa namanya perbaikannya.

Kemudian....

KETUA RAPAT:

Yang terakhir Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ini yang terbaik dimana-mana ini kerjaan besar ini, tidak akan mungkin bisa jadi, lebih baik pilot proyek dulu, pilot proyek infrastruktur pendukung juga sudah memungkinkan untuk Pulau Jawa misalkan sehingga berbagai macam persoalan bisa kita atasi tidak langsung otomatis, konsekuensi daripada ini berdampak pada beban keuangan negara.

Terakhir Pak satu ya untuk Himbara. Kenapa di Jawa Barat itu baru 1,5% dimanfaatkan kartu itu diantaranya yang mendapatkan pekerjaan di Jawa Barat itu adalah Bank Mandiri, ini kan sangat tergantung bagaimana kondisi struktur Bank Mandiri terbatas cabangnya, terbatas kantor kas beda dengan BRI, sedangkan para petani ada di pedalaman, ini yang menghambat, yang tidak mendorong rakyat petani ingin dapat kartu tani, jadi terbuka saja darimana sudah siap semuanya, saya mantan Bank Indonesia Pak.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Mindo, Pak Krisantos nanti terakhir.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Pak.

Kalau mau selesai yang dibicarakan tadi walaupun saya setengah waktu tidak hadir, tidak mungkin diselesaikan sekarang, saya sarankan Pimpinan catat siapa yang berminat menyelesaikan ini, minimum satu orang satu Poksi, selesaikan dalam 1 minggu ini, selesaikan dalam minggu ini. Persoalan pupuk ini lebih ruwet dari yang kita bicarakan ini semua, lebih ruwet dari situ, jumlah pupuk yang disubsidi itu tergantung kelonggaran keuangan pemerintah, jadi walaupun misalnya 5 juta ton kebutuhan dari rakyat lewat RDKK tetapi kalau keuangan pemerintah setelah dibagi sana, bagi sini untuk subsidi pupuk hanya 3 juta ton ya 3 ton itu, jadi ini Menteri Keuangan yang menetapkan ini sebenarnya, sampai seperti itu harga gas mu juga seperti itu, ada teknologi untuk meningkatkan lifting minyak ya, dengan teknologi mikroba itu yang menjamin costnya itu dibawah USD19 per barel, dia tidak perlu dibayar sebelum terbukti, sudah dua kali terbukti di Pertamina dipotong tidak diteruskan, supaya kembali membeli yang lama dari luar, hubar

habir ini keadaan sebenarnya, jadi harus satu-satu diurainya. Ada langkah saya lihat kemarin di WA groupnya siapa sampai ke saya bahwa ada KUR pertanian, sudah maju juga pertanian toh? Ada KUR yang dibawa ke petani, nah kalau ada asuransi yang menjamin ini kan jangan-jangan memang pupuk itu kalau mendapat KUR, jangan-jangan pupuk bisa menjadi pupuk tidak bersubsidi, kan begitu. Nah, kemajuan teknologi teman-teman pabrik pupuk, harus siap-siap kembali ke pupuk tunggal lagi, jangan-jangan nanti tidak kita butuhkan lagi pupuk majemuk dua, cukup tiga? Cukup dua, teknologi nano sekarang luar biasa sehingga air dimanfaatkan nitrogen ke dalam air itu sudah bisa mengganti nitrogen, nah kalau di ... (*tidak jelas*)... tergantikan Pupuk Iskandar Muda nanti hilang karena tidak dibutuhkan lagi urea, kan begitu, jadi ini banyak Bapak. Jadi, saya sarankan kasih waktu paling lambat 1 minggu, bicarakan ini, bla...bla...itu kalau kita bicara soal kartu tani jadi kita memindahkan isi persoalan saja, begitu banyak persoalan sekitar pertanian kita ini.

Terima kasih begitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mindo.

Bapak dan Ibu sekalian eksekutif, legislatif, BUMN.

Saya ingin memberikan skors kesempatan kepada yang beragama Islam untuk menunaikan Shalat Ashar, jadi saya selaku Pimpinan tidak ingin menanggung dosa Bapak, Ibu, tidak skors Malaikat nanti jawabannya begitu. 15 menit, Shalat 5 menit, minum kopi 5 menit.

Saya skors 15 menit dan selanjutnya kita lanjutkan kembali.

(RAPAT DISKORS 15 MENIT)

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Skors saya cabut dan dimulai kembali.

Sebagaimana catatan dan nomer urut kami persilakan Pak Johan Rosihan, kalau PKS Ustad atau tuan guru.

Silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang baik hati, yang saya hormati.
Para Anggota Komsis IV DPR RI, Wakil Pemerintah dan seluruh yang hadir.

Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kita butuh pupuk untuk apa sih, pupuk itu kita butuhkan untuk meningkatkan produksi, tetapi data di saya 10 tahun terakhir itu antara perbandingan, peningkatan jumlah subsidi pupuk tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi kita, itu perbandingannya 30,9% dengan 13,2% nah ini bisa saja karena akurasi data kita yang kurang, bisa penggunaan pupuk yang tidak sesuai dosis atau mungkin karena di sistem distribusi.

Nah berikutnya Pak Pimpinan yang saya hormati, saya kemudian melihat data yang disajikan. Memang kita ini merancang untuk pupuk kurang, dari Tahun 2016 kita punya 9.205,75 ton sampai Tahun 2019 8,7 nah ketersediaan anggaran di Tahun 2020 tadi itu kita cuman 7,9 ini kan jauh turunnya, nah jadi maksud saya apa persoalan ini sehingga kita sampai menganggarkan itu kurang dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, artinya ini sama dengan kita merancang supaya pupuk ini murah, jangankan kita bicara tentang tepat sasaran, ketersediaannya saja kita bisa tidakenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada di RDKK, itu yang pertama.

Yang kedua, soal kartu tani, kartu tani kalau Teman-teman tadi ingin buat sampel atau pilot project, kalau saya mengusulkan minta penjelasan Pak dari yang sudah dibagikan dan sudah digunakan ini bagaimana pelaksanaannya sampai hari ini, itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil contoh NTB, NTB per 31 Desember 2019 itu data distribusi kartu taninya 31.156 tetapi belum ada satu pun yang digunakan, nah ini jauh meningkat sekitar 12.000 Bu, ketika sebelum Reses kita juga dikasih data oleh Dirjen PSP bahwa kartu yang sudah terdistribusi di NTB hanya 19.000 pada waktu itu, itu awal Desember, nah di akhir Desember sudah meningkat 12.000 menjadi 31.156 cuman lucunya satu pun belum ada yang menggunakan, nah apa persoalannya. Nah, Reses kemarin saya ketemu dengan Kepala Dinas Pertanian, saya tanya dia kenapa sudah distribusi ini peningkatan distribusinya terlalu tinggi tetapi belum ada yang digunakan, jawabannya adalah petani belum percaya bahwa kartu itu bisa digunakan. Yang kedua, sosialisasi belum dilakukan. Nah, Pak Ketua coba saya usulkan ini siapa tahu Anggota mungkin bisa membantu untuk sosialisasi kartu tani ini, mumpung kita Reses tanggal 28 Februari, ya masing-masing Anggota kasihlah apa namanya untuk sosialisasi tentang kartu tani, tidak usah ragu Bu, tidak usah ragu Pak, kami ini punya kelompok tani berapa diminta kami kasih ya, cuman kasih kesempatan kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita, lebih jelas saya pikir.

Yang berikutnya, soal distribusi pupuk, saya baru selesai kunjungan dapil ini Ibu, Bapak. Pak Dirjen keledai saja itu tidak mau jatuh dilubang yang sama, ini kita ini sampai tahap seleksi data, seleksi data itu masih menggunakan hal yang sama, masih menggunakan sistem RDKK ini, kalau terus kita menggunakan ini Pak menurut saya ini sudah tidak bisa, karena terus terang data, memang persoalan kita di data, saya Pimpinan mau menagih waktu itu kita hanya kesempatan bahkan Pak Menteri yang minta 1,5 bulan itu selesai urusan data, ini dikasih lagi perpanjangan Pimpinan, coba segera diagendakan supaya kita bisa tagih Pak Menteri ini waktu itu hanya minta 1,5 bulan selesai urusan data, kita minta, kalau ini tidak selesai ya terus

akan kejadian seperti ini. Soal penyaluran Pak, saya melihat karena baru dapat data kemarin pulang, pengecer itu Bapak, Ibu itu dicampur itu Pak saya tidak usah buka-buka data, dikasih tahu fakta lapangan saja, tidak ada pengecer yang hanya membeli, menjual pupuk subsidi yang berdasarkan RDKK itu Pak, paket Bu, pengecer itu menjual paket tidak akan dikasih Bu, pupuk subsidi kalau tidak membeli pupuk yang non subsidi, dipaket, apa memang begitu aturannya? Ini temuan kita di lapangan. Bicara kartu tani, saya mau tanya kios itu apa, apakah sama dengan pengecer? Siapa yang menentukan pengecer ini, siapa yang menentukan kios ini, berhenti Bu, Bapak, berhenti percaya kepada pengusaha untuk menjadi pengecer atau kios itu, saya usulkan kalau bisa dengan Bundes disalurkan, jadi pupuk misalnya dari distributor, kalau dulu kan tidak ada masalah jaman Pak Soeharto dulu karena ada KUD atau langsung ke desa, kalau kita distribusikan lewat desa misalnya lewat BUMDES-nya tidak akan berani kepala desa itu untuk menipu rakyatnya, dia akan dibakar kantor kepala desa itu, tetapi kalau pengusaha begini Bapak dan Ibu saya ceritakan jadi tahap pertama pupuk itu para pengecer keliling bulan delapan Bu, bulan delapan itu ketika mulai ada distribusi pupuk itu bulan delapan keliling, keliling-keliling menawarkan kepada pemilik RDKK ini, ayo tebus pupuk kalian, petani bulan delapan mana ada uang, paceklik, tidak bisa ditebus oleh petani disimpan sebagai stok oleh mereka, bulan sepuluh keliling lagi, ditawarkan lagi itu, pupuk itu, lebih-lebih bulan sepuluh petani juga tidak punya uang untuk menebus itu, nah disimpan lagi sebagai stok, nah pas bulan dua belas tahap ketiga itu kemudian keliling lagi, kemudian itu dipaket, yang subsidi tadi itu dikeluarkan sebagai yang dibeli oleh pengusaha itu, nah ini kan apa, bagaimana keberpihakan kita sementara kita Pak Dirjen seperti saya sudah ngomong kemarin kita susah untuk cari subsidi yang 26 triliun itu, kenapa ditingkat lapangan sampai seperti ini. Nah, karenanya perlu kita pikirkan bukan hanya persoalan kartu tani itu tadi, tetapi bagaimana kita juga siapa yang akan menyalurkan ini, kalau tetap pengusaha Pak walaupun kios atau pengecer namanya tetap akan begini, orang namanya cari untung. Bisa tidak anggaran-anggaran seperti ini kita sinergikan antara dana KUR pertanian itu dengan kartu tani, jadi perlu didiskusikan panjang menurut saya tentang ... **rekaman terputus ...**

Ini sekali lagi mari kita berpikir secara baik, secara benar bagaimana pupuk dengan anggaran yang Rp26 triliun subsidi itu bisa sampai kepada masyarakat dalam bentuk pupuk bersubsidi bukan diperjualbelikan oleh para pengecer atau pemilik kios tadi itu. Karenanya Pimpinan, saya mengusulkan kita bentuk Panja Pupuk ini, kita buat bentuk Panja distribusi pupuk.

Yang berikutnya Bapak Dirjen PSP, inikan antara kartu tani ini karena ibi produk perbankan. Kita di lapangan itu ada penyelia mitra tani namanya yang dulu ini pernah bekerja secara efektif untuk mendampingi para petani dalam PUAP. Nah, karena saya mengusulkan bagaimana supaya penyelia mitra tani ini (PMT) ini bisa mendampingi petani kita itu untuk urusan kartu tani ini. Ada yang mendampingi tidak bisa dilepas begitu saja petani kita harus ada yang mendampingi. Karenanya karena ini saya dalam diskusi kemarin itu ada anggarannya juga sudah tersedia Rp48 miliar untuk honor mereka. Nah, jangan sampai kemudian honor itu dipergunakan untuk anggaran-anggaran

yang lain. Saya minta kepada Pimpinan agar ini dijadikan sebagai satu point dalam keputusan kita agar ada pendampingan petani dan tidak perlu kita mencari mitra lain karena dilapangan sudah ada penyelia mitra tani. Jadi itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Ibu Farida Hidayati, Bapak Bambang Purwanto, Bapak Hermanto silakan. 3 menit kata Pimpinan yang lain.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

3 menit plus 5 kayaknya ini.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota dan Dirjen PSP beserta jajaran yang kami hormati semuanya dan Pupuk Indonesia bersama pabrik pupuknya.

Supaya masih ingat, saya hanya ingin menyampaikan karena persoalan pupuk ini maka rombongan Anggota DPRD Tanah Datar pekan lalu berkunjung ke Komsis DPR RI untuk menyampaikan persoalan pupuk ini. Barangkali penjelasan mereka ini di daerah sudah tidak bisa diatasi, sehingga mereka juga menganggap Pemerintah juga tidak bisa mengatasi. Dia mengadu kepada DPR RI ini di Komsis DPR RI terkait dengan selama ini Tanah Datar itu mendapatkan kuota 29 ribu ton. Nah, tahun ini mengalami penurunan sebesar 17 ribu ton, jadi terasa sekali kelangkaan pupuk di Tanah Datar itu. Dan di Tanah Datar itu 75% kawasannya itu adalah kawasan pertanian dan perkebunan. Jadi permohonan mereka ini adalah supaya Pemerintah bisa mengatasi ini secepatnya karena petani sudah masuk pada musim tanam. Dan ini adalah salah satu contoh kabupaten. Barangkali kabupaten yang lain se-Indonesia ini pun juga mirip. Nah, ini mohon kementerian dan juga Pupuk Indonesia memperhatikan hal semacam ini.

Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kita ini secara konsep sudah masuk pada *trap*, jebakan pupuk, jebakan pupuk ini kita menjadi sangat tergantung kepada pupuk kimia. Sampai-sampai petani itu sudah masuk pada candu, kalau tidak ada pupuk kimia mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya minta supaya Pemerintah membuat satu strategi kita keluar dari *trap* ini supaya kita tidak berulang-ulang terkait dengan kasus kelangkaan pupuk ini. Anggaran-anggaran yang besar itu saya pikir kalau untuk kita alokasikan pada inovasi-inovasi baru terkait dengan teknologi pengembangan pupuk yang organik saya pikir ini bisa kita mengatasi persoalan itu. Jadi saya minta supaya ada satu strategi kita keluar dari *trap* ini. Saya minta nanti

pertemuan berikutnya apa sih strateginya gitu, supaya kita tidak terus ribut masalah kekurangan pupuk ini.

Kemudian saya menukil penjelasan dari BUMN Pupuk Indonesia terkait dengan kebijakan pupuk Indonesia. Pada halaman 9 pada point 2 dalam hal terdapat kekurangan alokasi untuk kebutuhan pupuk bersubsidi PI Group menyediakan stok pupuk non subsidi di setiap kios resmi. Apa maknanya ini? masih ada ya, BUMN-nya masih ada? masih. Ini maknanya saya memberikan satu *statement* bahwa nampaknya PI Group ini tidak ada niat ikhlas untuk memenuhi pupuk bersubsidi. Jadi ini catatan saya, ini sudah ada satu rancangan dari Pupuk Indonesia satu saat nanti kebutuhan pupuk bersubsidi itu tidak terpenuhi akan masuk pupuk komersial, dengan kata lain begitu pupuk non subsidi. Artinya, ini sudah dirancang bangun situasi dan kondisinya, sehingga nanti petani akan membeli pupuk non subsidi. Bapak dan Ibu perlu kita ketahui yang bersubsidi saja petani itu sulit membelinya apalagi yang non subsidi. Coba Bapak bayangkan, yang bersubsidi itu kan harganya jauh lebih rendah dibandingkan yang non subsidi, itu susah, nebusnya juga susah.

Nah, dalam hal yang tersirat dalam *statement* ini Bapak dan Ibu khususnya yang terkait dengan *stake holder* yang pupuk ini mohon diperhatikan bisa jadi ini adalah peluang untuk para mafia untuk bermain disini. Dalam rapat ini saya ingin menyampaikan 4 hal soal subsidi ini. Yang pertama adalah terkaitnya semakin birokratisnya pupuk. Nah, ini perlu kita cermati bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pupuk ini soal yang sederhana begitu menjadi soal panjang. Kenapa ERDKK itu berlarut-larut hirarkisnya. Nah, ini persoalan kita.

Kemudian yang kedua, saya melihat disini ada sistem distribusi yang tidak tertata dengan baik, sehingga pupuk itu bisa menjangar kemana-mana. Pupuk subsidi ini menjangar kemana-mana, yang seharusnya dialokasikan kepada petani ini bisa menyebar ke non sawah. Nah, ini siapa yang bermain disini? Yang bermain disini adalah tidak lain ya bisa jadi Bapak dan Ibu sudah tahulah, ini adalah para mafia yang menyimpangkan pupuk dari jalur resmi kepada jalur non resmi. Nah, inilah yang mengakibatkan antiasipasi dari BUMN ini untuk menyediakan pupuk yang non subsidi. Jadi saya pikir ini logika yang salah, ini akan senantiasa memberikan peluang kepada para pihak yang bermain di non subsidi semakin mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Kemudian yang ketiga, saya mencermati terkait dengan soal ERDKK ini, ini Bapak dan Ibu tidak pernah mempelajari perilaku petani. Petani itu tidak mengerti soal teknologi informasi yang seperti ini, Bapak dan Ibu memaksakan dia datang ke bank, jangankan dia datang ke bank, melihat bank saja dia takut, takut dia, takut ditagih hutangnya, karena petani ini juga punya hutang ke bank. Disuruh lagi ngurus selain dari dia takut melihat bank juga memang mereka ini tidak mengerti persoalan soal teknologi informasi yang berkembang sekarang itu. Yang mereka tahu itu adalah dia ke sawah, bertani ke sawah dan memanen. Oleh karena itu, saya minta supaya Pemerintah aktif jangan menunggu, kalau menunggu ya seperti ini hanya

sekitar 550-an ribu sekian dari 6 jutaan sekian. Jadi saya minta supaya Pemerintah termasuk juga pihak bank ini turun untuk memberikan kesadaran dan penjelasan bagaimana mudahnya kita harus mengurus ini. Nah, ini persoalannya. Jadi saya melihat persoalan ERDCK ini juga sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan pupuk kita. Karena pupuk ini berulang-ulang masalahnya. Nah, itulah yang saya sebut ada *trap* disini, jadi kita harus keluar dari *trap* ini dengan membuat strategi pupuk yang organik, beralih kita.

Oleh karena itu saya minta Dirjen PSP mengembangkan, memperbanyak program UPO. UPO ini adalah satu strategi yang kita bisa mengatasi kelangkaan pupuk. Nah, bagaimana anggaran-anggaran untuk alokasi pupuk subsidi itu kita alokasikan saja ke program UPO, itu lebih banyak manfaatnya.

Demikian Bapak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Alhamdulillah 8 menit.

Ibu Farida, biar ke barat, ke timur.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Dirjen dari Kementerian Pertanian.

Mungkin begini ya, saya masuk ke awal dulu, petani. Yang dinamakan petani ini yang apa sih, penggarap atau pemilik sawah maksud saya. Kenapa? Saya ini punya sawah tapi saya tidak tahu sawahnya dimana, warisan ini ya. Tetapi ketika saya maksudnya saya begini, jadi yang dinamakan petani ini yang mana, pemilik sawah atau yang penggarap. Karena selama ini disitulah letak akhirnya RDCK-nya ini *double-double*. Seharusnya Pemerintah itu membedakan antara penggarap dengan pemilik sawah itu berdasarkan dengan pipil SPPT. Jadi kalau misalnya SPPT sawah siapapun balik nama atas nama pemilik yang baru, pemilik yang lama itu tidak akan menghilangkan pemiliknya. Jadi akan bisa membedakan antara pemilik dengan penggarap. Kenapa? Akhirnya begini kalau saya belajar akhirnya saya di Komsis DPR RI akhirnya saya jadi belajar, tanya kepada Ibu saya, sawah saya siapa yang garap, ternyata ada yang garap namanya Bapak. Jadi akhirnya saya tanya ternyata ada *double*, ada kesalahan, jadi saya dapat subsidi karena di pipilnya atas nama saya tetapi penggarapnya juga mendapatkan subsidi pupuk itu. Makanya itu akhirnya *double-double* disitu, seharusnya ERDCK-nya itu berdasarkan pipil sawah. Kenapa? Ternyata

banyak petani itu yang selain digunakan untuk lahan pertanian ternyata juga digunakan untuk di lahan kehutanan, karena waktu ketika mereka sekarang musim ini di lahan kehutanan inikan ditanamin jagung, akhirnya pupuknya itu jadi penggarap saya sendiri itu pupuknya digunakan untuk menggarap yang di lahan kehutanan. Jadi seperti itu, akhirnya berapa pun pupuk yang akan diturunkan kabupaten tersebut itu tidak akan mencukupi, karena dasarnya itu yang salah. Mungkin itu yang harus diperbaiki dulu, maunya pakai yang apa, jangan data dari pemiliknya atau penggarapnya tetapi berdasarkan pipil. Kalau pipil SPPT itu tidak akan salah, beralih kesiapa pun itu tidak akan salah datanya. Jadi datanya harus dari bawah dulu seperti itu.

Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Saya khawatir usul harus sudah di-PPAT sawahnya ternyata tidak ya, karena yang banyak notaris.

Silakan Mbak Riezky Aprilia, sedang menggelora di Medsos ini, namanya.

Silakan Ibu, 3 menit ya biar bijak, silakan 5 menit.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak-bapak Dirjen.

Kalau saya Cuma sekedar memberi saran, bahwa terkait ERDCK ini memang penting harus dipahami realisasi dan realita dilapangan. Karena tadi sepakat mungkin beberapa teman menyatakan karena RDCK terkait dengan teknologi lebih baik mungkin dan kartu tani juga terkait teknologi tapi tidak semua wilayah yang tercover dengan hal-hal tersebut.

Nah, kemudian kalau terkait dengan RDCK ini seringkali juga saya kemarin habis reses juga menemukan bahwa kelompok taninya misalkan itu-itu saja orangnya. Saya rasa ini bukan hal baru tetapi juga harus menjadi pertimbangan *requirement*-nya seperti apa, terus teknis kedepannya seperti apa, tadi seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan di Komsis DPR RI bahwa pada saat membangun sebuah sistem atau apapun itu terkait dengan RDCK ini harus dipertimbangkan realisasi dan aplikasinya dilapangan. Itu yang pertama.

Kemudian untuk kartu tani tadi ada beberapa masukan dan bahkan Pimpinan juga sempat menyatakan bahwa kenapa tidak dibikin *pilot project*-nya dulu. Saya sepakat kalau memang bisa *pilot project* dimana, apakah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, mungkin dimana titiknya ditentukan oleh saya tidak tahu teknisnya seperti apa di Dirjen terkait untuk merealisasikan tempat dimana, sebagai *pilot project*. Jadi masing-masing mungkin ada perwakilan dari Provinsi ini daerahnya mana. Karena kartu tani ini contoh saya dari Sumatera Selatan saya rasa ada rekan-rekan dari Pusri disini mungkin cukup paham bahwa medannya Sumatera Selatan boro-boro bawa duit ke bank, baru 500 meter sudah kena todong dijalan pasti petani itu. saya yakinkan itu pasti terjadi, nah jadi mohon jadi pertimbangan juga.

Nah, jadi memang kendalanya harus benar-benar diperhitungkan. Infrastruktur inikan juga berpengaruh atau kerja sama dengan banknya mungkin banknya ini pakai jemput bola bisa di kantor kepala desa tertentu. Jadi berapa kali seminggu atau sebulan berapa kali silakan diatur ritmenya seperti apa. Jadi pada saat hari ini tolong program-program ini dipertimbangkan secara matang karena mengingat wilayah NKRI ini belum sama bentuk dari kesiapannya untuk bicara teknis seperti ini.

Itu saja dari saya sekali lagi saya harap pada saat teman-teman dari Kementerian Pertanian ini membuat sebuah program cobalah lihat dulu aplikasinya dilapangan itu apakah realistis atau tidak.

Itu saja, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Riezky, Dapil Sulawesi kata beliau, Ibu yang sedang populerlah ini kata orang Madura top markotop. Kalau belum kenal tidak usah saya perkenalkan, sudahlah sedang, doanya sedang dikabulkan terus.

Wulan, tidak ada Mbak Wulan, Ustad Slamet, Dokter Hewan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan juga rekan-rekan Anggota Komsis IV DPR RI yang terhormat, serta mitra kerja yang hari ini hadir.

Beberapa hal menguatkan saja terkait dengan evaluasi pelaksanaan kartu tani itu ternyata hampir semua titik, hampir semua Dapil yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu itu sama, sehingga berarti permasalahannya ini adalah menyeluruh. Salah satu yang tadi belum

disinggung adalah terkait dengan yang mendapatkan kartu tani harus punya deposit 50 ribu untuk mengaktifkan kartu tani itu kepada bank yang ditunjuk. Saya sampaikan kepada Bapak Dirjen, bahwa ini saya pengakuan dari petani ya saya tidak mengada-ngada, kemarin kita juga ada reses, bahwa 50 ribu bagi petani itu adalah sesuatu yang memang tidak kecil, sehingga ini menjadi kendala tersendiri, walaupun ini uang dia yang disimpan. Itu dari sisi aktifasi, belum lagi kemudian tadi saya juga sama ketika kemudian dia harus datang ke bank itu bukan masalah mentalnya saja sudah grogi dulu, sehingga ini perlu dipikirkan itu.

Yang berikutnya, saya juga tadi ingin menyinggung bahwa tingkat penggunaan itu masih rendah, masih 10%. Disampaikan oleh pihak Dirjen tadi karena kurangnya sosialisasi. Saya ingin menekankan apakah kemudian kemitraan dengan Komsis DPR RI ini hanya kemitraan disaat kemudian kita memutuskan anggaran. Tetapi disaat eksekusi tidak ada kemitraan sama sekali dengan Anggota Komsis DPR RI, inikan menjadi perhatian kita semuanya. Jadi kita punya massa, kita duduk disini juga didukung oleh titik-titik kelompok tani kita juga banyak-banyak kenapa kemudian tidak sinergis dari sisi ini. Jadi ini menjadi catatan bagi kami untuk kemudian menjadi perhatian bagi kita. Jadi sekali lagi kemitraan ini saya pikir tidak pada tataran memutuskan anggaran tetapi eksekusi anggaran juga kemudian harus menjadi kemitraan bagi Komsis DPR RI.

Yang berikutnya yang saya baca ini Kementerian ini punya utang yang cukup besar di Pupuk Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa sampai punya utang padahal anggaran di APBN itu jelas ada, ini saya ambil dari media, bahwa punya utang dibayar di tahun berikutnya, dibayar di tahun berikutnya. Mungkin butuh penjelasan kenapa sampai kemudian punya utang ke Pupuk Indonesia.

Terakhir ini apakah tidak perlu dikaji, sebenarnya rakyat itu tidak perlu subsidi. Dengan catatan kemudian hasil panen dia saat panen harganya itu menjanjikan paling tidak HPP atau diatas HPP. Sehingga nampaknya cara berpikirnya kemudian juga harus coba dikaji oleh eksekutif dalam hal ini Kementan, apakah kemudian tidak memungkinkan subsidi pupuk kemudian dialihkan menjadi subsidi harga. Dan pada kajiannya tidak pasti setahun itu pasti keluar, karena memang pada saat-saat panen juga dengan harga tinggi, sehingga bisa jadi subsidi pupuk yang mestinya di bayarkan kepada petani itu tersimpan atau tidak terpakai karena memang saat panen harga tinggi. Oleh karena itu, mungkin perlu dipikirkan untuk kemudian melakukan subsidi harga, mengalihkan subsidi pupuk untuk menjadi itu.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu Wulan.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Hanya melanjutkan saja.

Rekan-rekan dan mitra yang saya hormati.

Tadi sudah banyak disampaikan bahwa paling tidak kita bermitra tidak hanya memutuskan anggaran tetapi eksekusi anggaran kita juga tetap bermitra. Saya rasa juga rekan-rekan mitra juga setuju ya, karena kan kita tahu juga bahwa titik-titik yang kita punya dilapangan itu juga tidak kalah banyaknya juga, karena mungkin kemarin yang mendukung saya adalah sekitar 80-an ribu lumayan banyak menurut saya. Dan ini semuanya kan kita pikirkan dan ada beberapa diantaranya mungkin prosentase yang paling besar adalah petani di dalamnya, karena daerah saya adalah daerah petani. Terus kemudian seperti tadi disampaikan bahwa kurang banyak sosialisasi juga itu juga menjadikan sorotan buat kita bersama mungkin dari sebelah depan saya tadi juga menyoroti tentang sosialisasi. Alangkah baiknya memang kita ada kordinasi tentang sosialisasi antara mitra dengan dewan, karena ini juga hal yang bagus juga. Sebenarnya dewan ini kan juga artinya memperjuangkan masyarakatnya bagaimana itu bisa mengerti informasi dan juga memanfaatkan dari program yang ada. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya mau menanyakan ini tadi dari Himbara. Himbara ada materi yang disuguhkan kepada kita dan juga dari PSP tadi juga ada disuguhkan data kepada kita juga mengenai kartu tani. Kartu tani yang terdistribusi dan juga kartu tani digunakan. Saya heran satu waktu yang sama kita berdiskusi disini tetapi dua data yang berbeda. Dari Himbara ini kalau tidak salah menurut progress penggunaan kartu tani setelah saya total dari BRI, BNI, Mandiri dan Himbara sendiri itu ada banyak. Kemudian yang ada di bank data dari PSP ini 581, mungkin bedanya saya tidak mengerti apakah ini dari Bank Mandiri, BNI dan juga BRI ditambahkan kemudian jumlahnya jadi Himbara ataukah keempat-empatnya ini ditambahkan. Tetapi kalau misalnya kita bagi dua pun tidak sesuai dengan datanya. Coba mohon koreksi ya, itu yang pertama.

Yang kedua, untuk Bapak Direktur Tanaman Pangan. Sebagaimana melihat paparan pada slide 15 terdapat target tanam dan ketersediaan pupuk antara Januari sampai Maret 2020, sebagaimana terdapat pada nomor 5 dinyatakan kekurangan tau kelebihan pupuk berdasarkan usulan RDKK terdapat minus 3.485.201. Dalam hal ini saya ingin menanyakan apa yang menjadikan minus dari ketersediaan pupuk itu Pak, kalau misalnya memang sudah melalui perencanaan.

Terus kemudian kartu tani harusnya sesuai dengan tujuan, yaitu menyalurkan pupuk bersubsidi. Tetapi saya mau tanya yang sebenarnya siapa sih yang menyalurkan kartu tani itu. Dan saya juga belum dengar tadi atau mungkin saya yang terlambat datang, sejauhmana kendala dari persoalan tahun-tahun sebelumnya dari subsidi ataupun juga pemberian kartu tani itu apakah sudah sesuai dengan sasaran atau belum. Karena yang kita lihat bahwa pengguna kartu tani boleh dikatakan hanya 10% tetapi kartu tani semuanya sudah terbagi dan apa yang menjadi kendalanya. Terus kemudian bagaimana yang betul-betul tadi disampaikan juga rekan terdahulu, yang betul-betul petani itu apabila tidak memperoleh kartu tani. Dan apakah bisa menjadi jaminan bahwa yang menerima kartu tani itu adalah betul-betul petani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Yessy.

F-NasDem (YESSY MELANIA, S.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan yang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas banyak hal.

Pertama, saya menyoroti tentang kartu tani. Kartu tani ini menurut saya adalah program yang sebenarnya sangat-sangat baik semangatnya, ruhnya itu tentu sangat-sangat baik karena menginginkan adanya pemerataan, pendistribusian pupuk subsidi. Kemudian juga saya melihat ini adalah salah satu program cara untuk memodernisasi petani-petani kita. Tentu petani-petani kita harus didekatkan, harus dibiasakan dengan lingkungan-lingkungan, dengan alam-alam yang orientasinya sudah kemajuan teknologi. Jadi saya sebenarnya saya setuju dengan program ini, tapi memang masih banyak sekali kendala, masih banyak sekali hambatan dilapangan yang kita temui. Karena kalau kita melihat lagi cita-cita Indonesia kedepan dibidang pertanian juga orientasinya adalah industry berbasis teknologi semuanya, 4.0 dan ini program kartu tani salah satu contoh kecil yang sudah dimulai dari Kementerian Pertanian.

Jadi tadi ada beberapa rekan yang mengatakan untuk di-cut atau untuk dihapus. Bagi saya mungkin belum terlalu pas, mungkin lebih kita matangkan kembali dengan konsep-konsep dan penyegaran yang lebih baru. Kemudian kalau melihat lagi kegagalan dalam tanda kutip beberapa yang sudah dijalankan dalam program ini tentu bukan hanya menjadi kesalahan ataupun kekurangan dari Pemerintah. Tentu sosialisasi, edukasi, kartu tani ini tugas kita semua terutama untuk rekan-rekan dari Himbara juga punya peran yang

sangat penting. Ini perbankan ada 3 yang dipercayakan oleh negara untuk mengakomodir kartu tani ini.

Tadi saya setuju dengan Mbak Kiki bahwa untuk edukasi atau mungkin karena tadi Ibu Mus ada menyampaikan bahwa banyak petani yang masih malas mengaktifkan kartu taninya karena salah satu mereka malas menyetor kepada bank. Ini menjadi catatan dan menjadi masalah kita kenapa tidak dari pihak Himbara saja yang sekaligus memberikan edukasi, sekaligus mendistribusikan kartu tani itu. Di saat mereka mendistribusikan mungkin saja bisa langsung verifikasi pengaktidan ari kartu tadi itu sendiri. Karena saya juga pernah Bapak dan Ibu perbankan hampir kurang lebih 8 tahun begitu juga, jangankan kartu tani yang sasarannya petani. Untuk KPE (Kartu Pegawai Elektronik) itu sangat susah untuk bisa mengedukasikan kepada masyarakat kita, padahal mereka itu sudah PNS, apalagi kalau petani yang SDM-nya kita paham semua seperti apa.

Saya minta mungkin dalam hal ini juga dari pihak Himbara harus serius membantu Pemerintah dalam mendistribusikan dan memberikan pendampingan dan memberikan edukasi secara berkelanjutan dengan petani-petani kita. Karena ketika saya lempar juga bola di Kalimantan Barat tentang program kartu tani ini, karena menag ini belum tersentuh disana, kalau tidak salah saya 2020 mungkin baru tersentuh kesana. Mereka sangat menyambut baik sebenarnya, tetapi ketakutan mereka sekali lagi itu. Mental mereka untuk datang ke bank saja mereka takut. Nah, mungkin ada salah satu pegawai bank yang bisa ditunjuk untuk mengakomodir entah itu pusatnya di kecamatan ataukah berapa desa dibagi zona untuk bisa memberikan pelatihan dan edukasi kepada petani-petani kita. Mungkin itu bisa membantu juga pencapaian dari kegunaan kartu tani ini. Inikan miris sekali, baru 10% yang terpakai dari yang sudah terdistribusikan.

Kemudian masalah jaringan ini juga, saya melihat tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, bahwa di point siapa melakukan apa. Jadi disini ada mitra, ada kerja sama dengan operator telekomunikasi. Saya ingin menanyakan programnya mengajak operator telekomunikasi ini sudah sejauhmana dan seperti apa sih *real*-nya ini. Karena kalau bicara jaringan Bapak dan Ibu di Kalimantan Barat ini sebagai gambaran saja. Jangankan di Kecamatan, di Ibu Kota Kabupaten saja signal jaringan itu masih turun naik. Jadi di perbankan itu belum 100% menggunakan fintech untuk keamanan customer, untuk keamanan nasabah. Jadi seminggu pakai, seminggu tidak, nah ini juga menjadi masalah untuk kita. Dan saya pikir harus ada komunikasi serius, komunikasi yang inten juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk bisa menunjang program pertanian ini tepat sasaran dan tepat guna.

Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Ema dari PPP.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,
Bapak Dirjen beserta jajarannya yang kami hormati.

Langsung saja ada beberapa masukan mungkin dari kami akan menambahkan. Pada intinya hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan dari Bapak dan Ibu Anggota Komsis DPR RI tadi, intinya sama bahwa permasalahan pupuk bersubsidi ini apabila dibahas dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Dan banyak sekali permasalahan juga dan tidak selesai hari ini, untuk itu saya menyampaikan bahwa kami mohon untuk kedepan untuk pupuk bersubsidi ini kita bisa lebih baik dalam hal penyalurannya. Yang mana setiap kami reses ketemu dengan para petani, keluhannya pasti pupuk dan pupuk. Sangat sulitnya mendapatkan pupuk dan sebagainya terutama beberapa waktu yang lalu, waktu kami reses ternyata ada petani tebu yang mana memang masuk dalam Poktan, tapi begitu ada pembagian subsidi tidak pernah dapat pupuk subsidi itu terutama petani tebu ini tidak pernah dapat jadi mengeluh kepada kami dan ini aspirasi ini langsung saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dari Kementerian untuk bisa nanti bagaimana regulasi atau teknisnya disampaikan kepada provinsi maupun kabupaten.

Selanjutnya saya juga sepakat agen-agen pupuk ini bagaimana kalau penyalurannya ini melalui Bumdes. Saya sepakat itu dan di daerah kami memang ada beberapa Bumdes yang sudah mulai menjadi agen-agen pupuk dan *alhamdulillah* bisa berkembang dengan baik dengan manajemen yang baik, ditunjang dengan SDM ini bisa berjalan dengan baik dari masyarakat juga untuk masyarakat pula dan tidak ada monopoli dan ini bisa dibagi rata. Dan mohon untuk juga nanti sebagai Bapak dan Ibu juga bisa nanti kalau memang ini bagus untuk dipakai untuk di daerah-daerah yang lain nanti bisa bapak/ibu bagaimana format yang bagus apabila pupuk ini akhirnya melalui Pungdes-Pungdes.

Yang kedua terkait kartu tani, kami sepakat dengan adanya kartu tani dan itu sangat bagus bila dilaksanakan karena salah satu program dari pemerintah juga tapi untuk saat ini kartu tani ini harus ada sinergi bagaimana kalau dari pihak pemerintah Kementan maupun dengan kami para Anggota DPR RI baik, terutama Komsis DPR RI untuk dilibatkan dalam sosialisasi karena kalau kita kunjungan Dapil, kita kalau reses setiap kali kita ketemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Ketua-Ketua Ormas yang mana dan ini bisa membantu pemerintah untuk mensosialisasikan tentang bagaimana manfaat dari kartu tani ini. Jadi kami mohon *in ito the point* saja

bapak untuk reses nanti kami juga minta ada program sosialisasi yang kami bawa terkait dengan kartu tani ini karena kami juga mendapatkan informasi dari kabupaten kami yaitu Kabupaten Jombang bahwa kartu tani ini yang dibutuhkan harusnya 85.000 kartu tani ini masih tercetak 30.000, terbagi 23.000, masih terbagi ke petani 23.000, tapi belum dimanfaatkan sama petani, kartu ini Cuma dipegang pak, nah tapi yang mereka ini masih tetap mendapatkan subsidi pupuk, belum bisa efektif kartu tani ini. Untuk itu kami mohon nanti kami juga diberi kesempatan memberikan sosialisasi betapa pentingnya kartu tani ini untuk dimanfaatkan untuk menerima pupuk subsidi.

Yang berikutnya tentang penyuluh pertanian. Ada beberapa masukan yang diusulkan kepada kami waktu kami juga ketemu dengan beberapa penyuluh, *Alhamdulillah* mereka tidak menanyakan tentang kesejahteraan, tetapi mereka menanyakan tentang kendaraan operasional, roda dua lah pak. kendaraan operasional yang mana memang ada 138 penyuluh di kabupaten kami itu meliputi 306 desa yang medannya juga ada medan yang sangat sulit, jadi mohon pak meskipun bertahap tapi kendaraan operasional ini memang sangat dibutuhkan oleh para penyuluh.

Yang terakhir, tentang biaya operasional Balai Penyuluh Pertanian, biaya operasional dari BPP ini sangat rendah bahkan hampir tidak ada, dan ini saya juga minta klarifikasi, kalau toh ada sudah dianggarkan untuk biaya operasional, mungkin bisa ditambah atau lebih bisa ditambah anggarannya karena program unggulan Kementan adalah Kostra, Kostra Tani dimana BPP berfungsi sebagai Pusat Data dan Informasi pembelajaran pertanian, pusat pengembangan pembangunan pertanian, untuk itu kami mohon untuk biaya operasional di BPP ini juga lebih ditingkatkan dan diperhatikan.

Terima kasih, itu bapak/ibu masukan dan mohon perhatiannya. Saya akhiri *wallahul muwaffiq ila aqwamit toriq.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-NasDem (Drs. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Aspirasi dari Ketua Dinas. Jombang dicatat pak Dirjen, Kabupatennya Jombang.

Silahkan ibu Nur'aini, cahaya mata

F-PD (Hj.NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Cahaya mata pak, matanya 2.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore buat semuanya.
Pimpinan dan Anggota Komsis IV DPR RI,
Para Dirjen dari Pupuk Indonesia,
Serta Hambara yang saya hormati, saya banggakan.

Terima kasih atas paparan yang disampaikan, luar biasa, kalau saya menyikapi Permenpan 01/2020 itu tujuannya luar biasa ya, bagaimana petani kita mendapatkan subsidi pupuk, sampai kepada kartu tani yang harus digulirkan dan lain sebagainya, ini tujuannya sangat mulia sebetulnya, akan tetapi dari sisi realisasi dan implementasinya ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh teman-teman, nah ini tentunya butuh suatu niat yang baik, komitmen serta konsistensi terhadap rencana kebijakan dan prgram prioritas yang sudah dilakukan oleh Kementan itu sendiri, itu yang pertama.

Yang kedua saya kira persoalan petani dan pertanian tidak hanya melulu menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, banyak kementerian yang lain harus pula ikut mendukung, harus diselesaikan secara kroyokan, harus ada integrasi, ordiniasi yang baik dari semua kementerian, bisa saja mungkin kedepan ini sebagai evaluasi ya, tidak hanya melulu Kementerian Pertanian saja, tapi bagaimana peranan Kementerian Desa juga ya untuk ikut terlibat dalam program ini, karena kalau tidak dilakukan secara kroyokan saya kira semua kementerian jalannya masing-masing dan tidak akan ketemu apa yang menjadi sasaran, apa yang menjadi tujuan untuk bisa mensejahterakan petani kita. Itu yang kedua.

Dan berikutnya yang ingin saya tanyakan, sanggupkan dari kementerian itu sendiri untuk bisa merealisasikan, mengimplementasikan dari Permenpan 01/2020. Kalau sanggup berapa lama sebetulnya yang bisa ditargetkan dari teman-teman kementerian. Nah saya melihat bahwa program ini masih sebatas ujicoba, karena ini sudah dicoba dimulai di tahun 2018 betul nggak, ini sudah mau memasuki di 2020, dari kekurangan yang kemarin 2018 tentunya ini sudah ada inventarisir, sejauh mana teman-teman kementerian ini melakukan inventarisasi dan upaya-upaya solusi apa saja yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan 2020 agar tidak menemui kendala seperti ini lagi. Saya juga menyadari bahwa kedepan ini bagaimana Kementerian Pertanian memiliki misi salah satunya melakukan swasembada pangan di negara kita, luar biasa ini, mulia sekali ini, saya dukung yang kearah sana, tapi ini juga harus diimbangi, apalagi mengarah kepada teknologi pertanian yang nanti diarahkan bagaimana petani-petani kita ini menyesuaikan ya terhadap aplikasi-aplikasi yang semakin canggih, tapi kalau tidak diimbangi dengan diberikan edukasi, sumber daya manusianya yang harus mumpuni petani-petani kita, petani muda juga harus mulai diaktifkan, dikembangkan, ini juga mulai sulit, nah ini upaya-upaya ini harus segera dilakukan ya.

Dan berikutnya, bahwa ini yang dilakukan hari ini semestinya tidak bisa dilepas, aplikasi yang melalui IT-IT yang canggih tidak dilepaskan begitu saja, tapi harus ada program kemitraan, tadi setuju dengan pak Johan, harus diaktifkan kembali pendamping mitra tani, yang tujuannya untuk konsen mendampingi peteni-petani tradisional kita, yang Gaptek, yang malu, yang takut dengan model-model yakak begini, kalau dilepas tentunya petani yang mana sih yang harus kita sasar, kita target, paling juga dengan model seperti ini cuma 10% petani yang ngerti itu, saya sedikit mengoreksi, mengevaluasi juga terhadap tadi realisasi yang disampaikan baik data maupun antara Dirjen satu dengan Dirjen yang lainnya ini betul kata mbak Wulan tadi belum *match*, belum adanya koordinasi ataupun integrasi data yang nyambung sepertinya

antara Dirjen PSP aja dengan Himbara itu berbeda dari data maupun jumlah alokasi pupuk yang didistribusikan.

Yang berikutnya bahwa saya melihat data tentang kartu tani diseluruh Indonesia ini ternyata hanya Jawa Tengah saja yang sudah difungsikan ya kartu tani tersebut, distribusi dan digunakan, dari distribusi sekian juta yang sudah digunakan kurang lebih 500.000, nah berarti ini kan mereka mencoba ya, jadi berapa persen petaninya sudah ngerti, tidak gaptek dan sedikit modern mungkin. Yang ingin saya tanyakan, dari sekian, 34 provinsi hanya Jawa Tengah yang hanya bisa mampu petaninya bisa menggunakan 500.000 kurang lebih. Akan tetapi realisasi pupuk bersubsidi kok mencapai 98%, sementara petani-petani diseluruh, khususnya Banten sendiri bapak/ibu, ternyata kartu tani itu sulit difungsikan, dan petanipun tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, kalau tidak memiliki kartu tani. Nah berarti berbanding terbalik Ketua, apa yang menjadi realisasi pupuk bersubsidi kepada petani seluruh Indonesia berbanding kebalik, dimana gitu kelemahan ataupun saya tidak menuduh ya, agak sedikit bertanya. Sebetulnya subsidi pupuk itu diberikan ke petani yang mana, kenyatannya petani kita itu tidak memiliki kartu tani lho, apakah memang subsidi itu dialihkan kepada non subsidi, hingga petani itu serta merta membayar padahal itu sudah disubsidi. Nah ini tolong dijelaskan dari teman-teman.

KETUA RAPAT

3 menit sudah bu.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Cukup saya kira, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan bapak Sumail.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bapak/ibu Anggota yang saya hormati,
Mitra Kerja Komsis IV DPR RI, Pak Dirjen, Bapak Kepala Badan dan bapak dan ibu dari Himbara juga ada Kemenkeu disini.

Kalau saya memperhatikan dengan seksama ibu, dari beberapa bapak/ibu yang disampaikan oleh teman-teman Anggota ini, dan paparan yang diekspos oleh bapak-bapak tadi adalah terutama yang diekspos lah, itu artinya indah semuanya, konsepnya bagus, secara konsep, akan tetapi pada saat implementasi banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul dipermukaan, sederhana sekali sebenarnya bapak/ibu kalau kita punya kepekaan sebenarnya kayak gitu kan. Karena saya yakin dan percaya saudara-saudara ada disini, duduk disini juga melalui sebuah filter,

kompetensi, kepantasan dan apa namanya, keunggulan lah seperti itu. namun beberapa hal yang kita lihat misalnya dari sisi sinergitas, itu masih jauh dari harapan, dari sinergitas antar lembaga yang ada ini, goalnya sudah bagus, tujuannya bagus, ingin mensejahterakan petani, ingin meningkatkan taraf hidup petani ke arah yang lebih layak, diujungnya disana mungkin ketahanan pangan ya, akan tetapi jangankan kita mengarah kesana, pupuk saja langka, pupuk saja jauh dari apa yang diinginkan oleh petani-petani, disana sini masih timbul carut marut yang luar biasa.

Akan tetapi kita yang ada disini sudah dibekali dengan anggaran kurang lebih 26 triliun tadi kalau dikonversikan seakan tidak bisa berbuat apa-apa, saya juga barusan dapat surat cinta dari kabupaten saya, ya kebetulan dari Dapil, Dapil saya Banyuwangi, disana sudah menerapkan smart kampung, hampir semuanya sudah apa, bisa di *cover* dengan teknologi informatika sehingga mungkin kita dengar bahwa bupatinya disana Musrenbang ke situ langsung secara kolosal, secara bersama-sama ya. Disitu tercatat kebutuhan yang berdasarkan e-RDKK untuk Urea saja 91.000 tonan, tetapi alokasinya di...bapak/ibu itu Cuma 31, artinya Cuma sepertiganya saja ini.

Nah sementara saat ini sudah musim tanam dan ada juga yang sudah menanam tapi kemudian ada bencana banjir, sementara juga ERDKK, kartu tani juga tidak bisa digunakan, bagaimana ini ya, ERDKK-nya juga, yang diharapkan 91.000 ton tetapi saat alokasi di 2020 hanya 31 ton, 31.000, ini jauh sekali, sehingga dia minta ke kami untuk segera disuarakan di rapat yang begitu penting ini agar ada tambahan minimal 30.000 ton sehingga kebutuhan walaupun tidak sempurna, walaupun tidak tuntas disana bisa apa, terpenuhi, sedikit bisa terpenuhi, bukan terpenuhi dengan banyak.

Saya kira itu kita juga tidak ingin apa namanya, tadi bang Johan mengatakan kita tidak ingin jatuh kesekian kalinya, sebab pak kalau kita putar dan kita review dirapat kita ini, dari tahun ke tahun isinya begini sajalah sebenarnya dari dulu itu, coba kita putar, kita cari ngobrol dengan pak Darori iya juga pak ya, saya bilang, isinya begini persoalan-persoalan tidak selesai, nah ini sampai kapan ini bapak/ibu. Saya ingin menggugah kepada kita semuanya untuk punya budaya malu, nah kalau kita misalnya tidak mau menyelesaikan ya konsekwensinya saya kira angkat tangan. Misalnya disampaikan kepada pak presiden, pak presiden kami tidak mampu mengurai ini, benang khusus ini, barangkali ada orang lain yang lebih pantas sehingga persoalan-persoalan dibawah itu bisa tercover dengan baik.

Saya kira itu Pimpinan. Oh iya, kepada pak Sudin dan pak Pimpinan gong xi fat cai, murah rejeki pak, sukses selalu, sehat. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-NasDem (Drs. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Sudah mas Ichsan makannya? Silahkan mas Ichsan Firdaus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Dirjen, Bu Deputy, Pak Dirut dan Ketua Himbara dan kawan-kawan Komsis IV DPR RI, Pimpinan yang saya hormati.

Pak Dirjen, saya ingin bertanya sedikit saja, terkait dengan pelaksanaan kartu tani ini, sebenarnya kartu tani ini dilaksanakan sejak tahun berapa pak? efektif 2019, menurut uji cobanya 2019, artinya ini uji coba di Kementan itu tahun 2019, sedangkan menurut *slide* nya di Kantor Menko Perekonomian, uji coba pertama itu Januari 2016, ini saya membaca *slide* nya pak, artinya Kementan 2019 sedangkan kemudian ujicoba menurut perintah bapak presiden Republik Indonesia itu ditahun 2015, kalau kemudian selama 3 tahun itu apa yang dilakukan pak, saya ingin bertanya itu saja, artinya kalau kemudian sejak tahun 2019 itu baru uji coba di Kementerian Pertanian sebagai cord apa namanya, pelaksanaan dari kartu tani ini, sedangkan perintah presiden itu sekitar bulan pertengahan tahun 2015, tetapi kemudian menurut ibu Deputy, ibu Musdalifah didalam *slide* nya itu Januari 2016, artinya ada 3 tahun kartu tani itu tidak dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Ini sebuah cermin bahwa ada perintah presiden tahun 2015 baru dilaksanakan di Januari 2019.

Nah, ini yang kemudian harus kita evaluasi apakah betul serius tidak dilaksanakan kartu tani ini. Kalau kemudian selama 4 tahun sudah dilakukan berdasarkan perintah presiden tetapi baru dilaksanakan Januari 2019, ini ada apa? Saya minta nanti minta penjelasan dari ibu Deputy, selama 4 tahun itu dilaksanakannya seperti apa evaluasinya. 1 tahun maka wajar kalau kemudian ketika kartu tani itu sudah didistribusikan 5 juta tetapi baru bisa digunakan oleh petani sekitar 10%, bayangkan perintah presiden 2015, 2020 sekarang sudah 4 tahun baru dipergunakan sekitar 10%, ini menjadi catatan pak bagi saya bahwa memang Kementerian Pertanian dalam pandangan saya itu tidak melaksanakan perintah presiden. dalam pandangan saya, ini simple saja kita membacanya pak, kita simple saja membacanya bahwa ada leg 3 tahun itu tidak dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Saya tidak tahu ada masalah apa, ini biar pak Dirjen, baik pak Dirjen PSP maupun Dirjen Tanaman Pangan bisa menjelaskan kenapa baru dilaksanakan 2019. Nah ini adalah sesuatu yang menurut saya perlu menjadi catatan. Bayangkan saja, sebuah visi presiden yang menarik baru bisa dilaksanakan menjelang akhir masa kepemimpinannya beliau. Begitu pak Mindo, mohon ijin pak Mindo, ini sebuah catatan, apakah ini menjelang Pemilu apakah seperti apa? Bu Deputy sudah menjelaskan tadi Januari 2016, bukan begitu ibu? Didalam *slide* nya, ini sebuah catatan. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin tanya terkait dengan RDKK dan luas lahan yang seharusnya disubsidi oleh pemerintah, tadi pak Dirjen PSP menjelaskan bahwa didalam e-RDKK, e-RDKK luas lahan itu ada sekitar 22 juta hektar

bukan begitu pak? sedangkan luas lahan yang seharusnya dilakukan itu ada 11,25 atau 11,5, hampir 50% e-RDKK itu tidak sesuai dengan faktanya. Pertanyaan saya adalah satu hal saja, dari 11,25 itu, itu data Kementerian Pertanian atau data BPS pak. saya ingat Raker terakhir kita, saya tanya ke Dirjen Tanaman Pangan waktu itu tetapi pak Dirjennya memang belum hadir, tapi oleh pak Menteri menyampaikan bahwa luas lahan teknis kita itu ada sekitar 7,15 juta hektar.

KETUA RAPAT:

Cukup pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ntar dulu, 7,15 sedangkan asumsi luas lahan teknis kita itu untuk subsidi tahun 2020 itu 8,15, tolong koreksi kalau saya salah, berarti ada 1 juta hektar yang bermasalah dari data yang ada. Nah, pertanyaan saya adalah satu pak, 11,25 itu tolong diuraikan pak, luas lahan teknisnya berapa kemudian luas tadah hujannya berapa, luas perkebunan yang disubsidi itu berapa, sehingga kami tahu dari 11,25 itu berapa sesungguhnya yang layak untuk disubsidi. Itu pak pertanyaan saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Ichsan. Seingat saya waktu itu Rapat Kerja, saudara Dirjen Tanaman Pangan nggak datang tapi ...menjawab tidak tahu datanya, itu yang saya ingat pada waktu itu.

Selanjutnya pak Sulaeman. Pak Sulaeman silahkan pak, ini yang banyak masalah juga karena wilayahnya paling jauh, Papua.

F-NasDem (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan kawan-kawan Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen seluruh hadirin sekalian.

Saya singkat saja pak Ketua, mengurus pupuk ini memang butuh keseriusan kita semuanya karena ternyata memang dari tahun ke tahun kita bicarakan hal yang sama saja, tidak ada perubahan, lalu apa yang kita kerjakan selama ini. Karena itu saya sedikit cerita pengalaman saya di Dapil saya, 2 tahun lalu saya mengundang produsen pupuk, kemudian distributornya dan juga Direktur Pupuk yang kita, dan semua dinas saya

undang untuk membicarakan soal-soal ini di Papua. Wilayah begitu sulit dan memang konsentrasi pertanian di Papua inikan sebagaimana yang diarahkan oleh pak Presiden, Merauke itu akan menjadi lumbung pangan nasional. Sehingga saya lenih banyak konsentrasi disana. Ternyata ada beberapa hal pak Ketua yang saya temukan dilapangan, dari hasil pembicaraan kami itu, dilapangan bahwa ternyata ada RDKK yang memang di *copy paste* setiap tahun, dan itu sampai di wilayah, kemudian diusulkan dan seterusnya. Otomatis yang baru ini yang tidak pernah disentuh tentu tidak bisa apa-apa. Itu soal yang menurut saya memang harus terus menerus setiap tahun itu perlu ada *updating* data untuk bisa mendapatkan data yang akurat.

Yang kedua, soal masih didata lapangan kita punya distributor dan pengecer pupuk yang dibawah ini, ini perhatian untuk para apa, Dirut Pupuk yang hadir dan Pupuk Indonesia. Di lapangan itu ternyata memang masih ada pelayanan pupuk kepada petani yang lahannya itu lebih dari 2 hektar, padahal pupuk subsidi, mestinya diberikan kepada petani yang masih layak menerima itu 2 hektar. Tekornya disitu sebetulnya, karena itu selalu saja yang punya RDKK pun teriak bahwa dia tidak pernah kebagian pupuk, jadi diselidiki di lapangan ternyata memang ditemukan hal semacam itu. perlu ada penegasan kepada pengecer pupuk dan distributor ini supaya mereka jangan lagi melakukan hal semacam itu karena sebetulnya mereka diujung tombak yang menentukan pelayanan pupuk di lapangan. Kalau kita tidak beri penegasan kepada mereka ya tentu asal-asalan saja pelayanan mereka kepada petani, itu sangat disayangkan sebetulnya. Kepercayaan dari produsen untuk sampai ke lapangan itu bisa sesuai dengan harapan, ternyata juga tidak bisa berlaku seperti itu.

Yang kedua, jarak tempuh pak Ketua, jarak tempuh yang jauh kemudian kendala di lapangan, memang tidak bisa dipastikan menunggu sampai pupuk itu habis terpakai di gudang, atau katakan sudah stoknya sudah menipis baru bisa di drop lagi. Padahal daerah yang sulit seperti wilayah saya ini kan sebetulnya hanya butuh kesungguhan tadi saya bilang, butuh apa, agenda yang pasti untuk mengirimkan kapal yang betul-betul tiba ditempat tepat waktu dan yang kedua para distributor ini juga sekali lagi itu juga perlu mempunyai kesiapan, punya gudang yang layak yang cukup untuk bisa menampung pupuk sehingga pada musim tanam tidak lagi menunggu tunggu pupuk datang baru bisa tanam, ini tidak bisa begitu. Musim tanam pasti petani akan melakukan penanaman. Soalnya disitu karena memang alasan gudang tidak mencukupi, ini masalah sebetulnya. Tetapi bahwa saya juga mengapresiasi kepada pelaku yang saya undang tadi dari Ditjen apa, Direktur Pupuk kemudian Pupuk Indonesia dan itu pada waktu pertemuan 2 tahun lalu itu kami bisa memecahkan persoalan itu, jadi kesulitan dilapangan pak Ketua, itu bisa direlokasi dari daerah yang masih menumpuk pupuknya tapi tidak digunakan. Nah ini mungkin juga jadi cara untuk kita bisa melakukan pelayanan lebih maksimal lagi. Sekali lagi ini memang butuh kesungguhan pak Ketua, kesungguhan dari semua yang terkait ini, tidak hanya dari pertanian, kemudian dari produsen dan distributor pupuk tetapi juga butuh kerjasama juga dari kementerian terkait lainnya. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi teriak persoalan yang sama ditahun-tahun yang lalu sampai sekarang ini dan tidak akan selesai. Kita butuh keseriusan kita, mungkin

tahun ini kita bisa selesaikan persoalan ini sehingga yang rutin nanti kita hadapi setiap tahun itu, itu bisa lebih baik lagi dari sekarang.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Seingat saya di wilayah bapak ada namanya 1 mive, Merauke integrated put asted dan energi tetapi tidak jalan, karena waktu itu salah konsep dari pemerintah yang lama. Kenapa salah konsep? Tiba-tiba PT ini dapat 200.000, ini 150.000. saya masih ingat waktu itu Dirjen SDA masih disini namanya siapa pak Mindo? Hilman, akhirnya terbengkalai semua, masa membuat vote energy, integrated vote energy dan lain-lain satu kawasan yang membiayai dana APBN, sementara yang menikmati para pengusaha kaya, ini kan nggak adil.

Bapak/ibu, ini masih ada 5 penanya lagi. Sedangkan nanti pukul 18.00 kita harus skors, apakah kita kasih satu orang 2 menit supaya nanti pukul 18.00 kita stop, kita break, ishoma kembali lagi jam 19.00. setuju?

Mbah Tarom silahkan.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komsis DPR RI dan mitra, Pak Dirjen, Hadirin semuanya yang saya hormati.

Langsung saja, tadi berbicara soal RDKK sudah banyak disampaikan, memang ini persoalan data dan memang harus kita seriusi, persoalan RDKK. Terkait dengan RDKK kalau ini memang kita benar-benar bagaimana RDKK ini valid maka harus ada yang mengasistensi, disana ada mantra tani, ada penyuluh. Kemarin sudah saya sampaikan meskipun ini domainnya pak Sekjen, coba nanti penyuluh ini dibuatkan regulasi bagaimana regulasinya ini penyuluh itu polivalen tidak monovalent, karena kalau monovalent ini standby di kecamatan akhirnya tidak efektif, tapi kalau polivalen setiap bidang itu menguasai seluruhnya, menguasai pertanian, menguasai kehutanan, perkebunan dan lain sebagainya dalam rangka untuk menjangkau, kalau bisa jumlah desa ini sejumlah dengan penyuluh yang ada plus mantra tani yang ada biar data RDKK ini valid, karena begini, saya khawatir kalau RDKK ini tidak valid dan para kelompok tani tidak pernah ngerti bagaimana kedepan itu tentang iklim atau musim, bola panas itu di petani, karena dianggap petani membuat data fiktif, seperti kita akan menghadapi ini, bagai apa pak, elnino, tentunya kalau RDKK nya itu *copy paste* ya ini kalau ketahuan pihak aparat penegak hukum ini menjadi bola panas di petani. Petani bisa ya dianggap membuat RDKK fiktif. Ini jangan sampailah bola panas ini kita berikan kepada petani kita.

Kemudian terkait dengan distribusi pupuk, ini bagaimana kami ini diberikan kewenangan, saya, kita sadar bahwa kita tidak mempunyai fungsi eksekutif tapi bagaimana diberi ruang dan dibenarkan kami membuat dan tentunya difasilitasi oleh pihak kementerian. Jadi kalau sekarang ini kios itu boleh jadi dibuat oleh distributor atau siapapun, ini menyebabkan pupuk hilang dan pupuk lebih, karena apa? Karena kios ini posisinya itu tidak ada di desa itu, kemungkinan di desa lain, maka karena dia itu berkeinginan bagaimana perputarannya uang itu cepat maka RDKK yang tidak ditempat itu juga dilayani, maka akhirnya menyebabkan pupuk itu hilang dari pasaran. Makanya bagaimana kalau kita DPR ini diberi sedikit pembedaan untuk membuat ...plot atau *pilot project* se kabupaten itu 1 atau 2, kios ini kita salurkan lewat Bumdes, kios pupuk itu disalurkan lewat Bumdes tentunya nanti fasilitas juga dari pihak pemerintah. ini sekaligus terjadi multi player effect dalam rangka pemberdayaan Bumdes itu sendiri, dan Insya Allah ini akan disiplin lah penjualan pupuk ditingkat ujung tombak ini karena mesti kepala desa mengintervensi dan tidak berani macam-macam.

Kemudian terkait dengan masalah kartu tadi, kartu tani ini program kerja sama pemerintah dengan pihak perbankan, saya tidak tahu persis bahwa anggaran 26 triliun itu apa *include* disitu kerjasama kaitannya fasilitas kaitannya dengan kartu tani, disini saya membaca didata bapak bahwa kartu tani yang sudah terdistribusikan itu mencapai 5 juta 600 sekian. Kemudian kartu tani sudah digunakan 581.611, kalau ini seperti ini dan dananya sudah disana, ini apa artinya begitu, karena pikiran saya kalau kartu tani ini sudah diberikan, didistribusikan, pemahaman saya disitu sudah *include* fasilitas yang ada disana, makanya ini saya tidak ini, sudah menyangkut teknis, saya tidak tahu persis, tapi sebaiknya kalau memang ini lebih baik kita transparan saja, dan biar tidak ada suasana bahwa bapak ini kinerjanya jelek, kalau memang dananya kurang ya ngomong saja, karena seolah-olah panjenengan itu kinerjanya jelek, tidak bisa melaksanakan tugas karena dananya kurang, kalau memang dananya kurang ya ngomong saja di majelis ini, seijin Pimpinan ya biar nanti dibicarakan di tingkat Komsis IV ini, ini saya mohon maaf ya sedikit memberi angin, bolak-balik diseneni terus, sedikit kita berikan angin untuk bapak dan ibu mitra kita.

KETUA RAPAT:

Cukup, nanti setelah dijawab ada pendalaman. Monggo pak sampai jam 12 malam saya tunggu.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Siap Ketua, nggih terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

mengatakan mau mencoba ... ya nanti koordinasi saja dengan Pupuk Indonesia, saya berharap supaya mencari jalan keluar yang terbaik.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Termasuk sosialisasi.

KETUA RAPAT:

Ya, tadi mbah Tarom mengatakan kalau duitnya kurang subsidiya ngomong saja, tapi nanti nggak tak kasih kan gitu kan. Selanjutnya Pak ... singkat, karena waktunya makin mepet, kita mau Ishoma, Pak Bambang Purwanto. Nggak ada berarti Pak Salim Fakhry yang baru nikahan silahkan.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebenarnya saya pak Ketua nggak ada tadi niat untuk berbicara Cuma karena teman bilang ini mitra, saya paksakan juga, ini pak Ketua, pak Dirjen dan teman-teman sekalian, kalau bicara masalah pupuk pak Ketua teranglah selalu kita bicarakan, sistem RDKK lah salah, sistem yang salah semuanya, selalu ini yang diperdebatkan Ketua, setiap mau tahun anggaran selalu ini yang kita permasalahan, Cuma beberapa teman saya seprinsip tadi ada yang mau cari solusi Ketua, kalau pihak pak Dirjen dan kawan-kawan ini jangan terjadi selalu begini Ketua, ini kalau salah-salah rapat sampai tengah malam pak Ketua. Saya sayang sama pak Dirjen ini dan kawan-kawan saja pak Ketua.

Cuma begini pak Ketua, kalau mau cari apa pak Dirjen dan kawan-kawan, namanya kita mitra itu sepakat saja lah, kenapa sepakat, duduk kita yang 50 sekian orang ini jelas kemitraan itu nggak ada sistem seperti itu pak, sebab kawan-kawan jangan terlampaui banyak mengharap Pak Ketua, jangan terlalu banyak meminta. Contoh Pak Ketua tadi sudah saya ketemu sama Pak Dirjen, walaupun saya orang baru Pak Ketua jatah aspirasi tahun yang lalu Pak Ketua 3 cuma TR 4 Ketua sampai sekarang ndak masuk Pak Ketua. Model-model begini lah Pak Ketua nanti kalau keras saya ngomong seolah-olah kita tidak apa, memang saya sebenarnya memang malas ngomong Ketua, ini kawan-kawan ini terlampaui banyak mengharap saya, setengah saja pengharapan Anggota Komsis IV ini yang dilakukan oleh mitra kita ini jago Pak Ketua. *Alhamdulillah* cuma nggak tentu Pak Ketua mewakili teman-teman harapan kami dibawah Pimpinan Pak Sudin entah berubah nasib kami di 2020, kalau yang dulu terus terang Pak Ketua ini saja contoh Pak Ketua, pertama dulu hentraktor seratus sekian turun menjadi empat puluh satu, traktor yang TR4 3 biji sampai sekarang baru saya cek ke Kepala Dinas Ketua tidak ada masuk, karena saya nggak mau ribut kalau ribut nanti lebih pandai saya ribut pada Ketua pun.

Sudah itu Ketua masalah perlu Pak Ketua masukan masalah pupuk subsidi dan non subsidi perlu kita uji di lab sebab ada indikasi Pak Ketua indikasi yang subsidi ini mutunya tidak bagus Cuma membuktikan indikasi

tersebut harus ada pembuktian. Satu lagi ada informasi Ketua setelah Menteri baru ada pengalokasian dana di Kementerian Pertanian ke Provinsi Aceh Pak Ketua Rp160Miliar secara khusus.

KETUA RAPAT:

Ke Provinsi Aceh atau ke Provinsi Sulawesi Selatan?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sulawesi Pak Ketua saya lupa Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jangan salah baca Pak.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Iya salah baca saya Pak Ketua. Ini apakah sudah di kompromikan dengan Komsu Pak Ketua? Kami berharap Anggota ini kalau adapun pengalokasian paham kita Menterinya dari sana Pak Ketua, cuma apa salahnya sebagai mitra kita rembukkan, ini indikasi Pak Ketua sebab indikasi tidak bisa didelik Pak Ketua Rp160Miliar sekian.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sekali lagi Pak Ketua.

Jadinya strategi tadi saya kira Pak Ketua kalau bermitra ini Pak Dirjen mitra yang bagus lah, saya ndak pernah minta-minta Pak Dirjen terkecuali ada banjir-banjir di daerah cuma ini nampaknya kalangan dari Dirjen dari pupuk kalau pupuk ini Pak Ketua dia ini patuh ke Komsu VI ini, termasuk pupuk-pupuk ini Pak Ketua CSR itu apa salahnya kalau kita mitra ke Komsu IV, saya kira setuju Anggota semua Pak Ketua. Ini nggak, kalau Komsu VI itu yang minta Pak Ketua oh cepat padahal kita juga kan mitra ini, kalau kita bukan mitra Pak Dirjen tidak menghadirkan Direktur pupuk pada sore ini. Adil lah hidup ini Pak Ketua, paham dan paham itu saja Pak Ketua, ndak ada betul ini ndak ada banyak-banyak, ini Pak Ketua sedikit lagi Pak Ketua 45 detik. Pak Ketua sudah canangkan pertama selama saya memimpin Pak Sudin memimpin, Pak Danil memimpin dibawah Pimpinan saya berubah semua Komsu IV kami tunggu buktinya Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Salim Fakhry saya juga kaget semalam saya di telepon sama Ketua Fraksi, kok tahu-tahu ada sekian Rp150Miliar lebih Anggaran diserahkan ke Sulawesi Selatan secara simbolik. Saya jelaskan setahu saya ya mungkin 1, 2, 3, 4 ini jagoan tidak perlu ada bahas Anggaran mereka putuskan sendiri, berarti nanti *nggak* perlu ada RDP Eselon I kalau perlu tidak usah ada Raker sama Kementerian Pertanian kalau sudah diputuskan, betul *nggak*? Mereka bisa memutuskan kok, alokasi Anggarannya belanja apa belum kita bahas eh teman-teman komplainnya ke saya, ini kan alangkah hebatnya Kementerian Pertanian. Ekspor beras 1 tahun 500.000 ton, apakah dalam negeri cukup? Jangan membuat atasan senang tapi menjerumuskan. Hari ini lagi saya baca barusan ini kewajiban importir bawang putih kalau masukin 1 ton wajib ekspor bawang merah 3 ton, berdasarkan apa? Data BPS berapa? Data penen berapa? Data kebutuhan berapa? Jangan sampai ngotot ekspor bawang merahnya dalam negeri harganya melonjak. Ini loh, kita jangan ini lah membuat atasan senang ya boleh-boleh saja tapi jangan sampai menjerumuskan.

Pak Kanjeng silakan Pak.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Izin sedikit Pak Kanjeng sebelumnya mohon maaf Ketua. Saya tadi berdosa Ketua, saya kira Ketua tahu rupanya sudah jelas begini Ketua pun memang sama sekali tidak tahu. Mungkin saya berdosa Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya suudzon boleh saja sama saya *nggak* apa-apa, kalau Pimpinan kan selalu disalahkan.

F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, terima kasih

Pak Dirjen, pejabat Eselon I langsung. Saya telah mendengar dari teman-teman ini perlu ada transparansi keterbukaan, Anggaran yang anda dapatkan untuk pengadaan pupuk apakah lebih kecil atau lebih besar dari luas sawah ataupun kawasan yang diberi subsidi, kalau itu lebih kecil sudah jawab bahwa memang pupuk tidak terpenuhi, tapi kalau sama ini dugaan kami kemungkinan ada salah penyaluran atau ada produksi pupuk fiktif artinya harusnya X ton tapi X minus ton ini harus. Karena ini Pak Ketua selama kami disini ini belum pernah ada Panja pupuk ya ini alur daripada produksi sampai kepada Petani itu belum pernah kita baca ya saya tahu lah ini ya ini perlu dan saya tanya kepada Kementerian Pertanian ini data Pertanian sudah sama dengan BPS belum? Karena selama ini janjinya itu waktu itu Menteri baru dilantik langsung ketemu. Contoh tahun 2019 data Menpan Menteri Pertanian itu produksinya 50 juta ton tapi BPS-nya hanya 32 juta, konsumsinya sama 29 juta ton BPS 29, Menteri Pertanian mengatakan

surplus 21 juta ton sedangkan BPS hanya 2 juta. Nah ini kalau diteruskan ini mana yang dipakai untuk pupuk ini yang dipakai, memang kata teman-teman periode yang lalu Kementerian Pertanian banyak pencitraan ini, kalau Menteri sekarang nampaknya tidak mau fakta realita kemudian ini dilakukan. Saya tanya apakah sudah data untuk pengadaan pupuk sama dengan BPS karena Presiden sekarang menggunakan data BPS tidak data dari yang lain.

Saya kira itu Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kanjeng, selanjutnya Pak Daniel Johan. Setelah itu kita *break* dulu untuk Ishoma.

WAKIL KETUA/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Iya terima kasih Pimpinan.

Segenap Anggota yang kita hormati.

Pak Dirjen, Pak seluruh jajaran Dirjen Direktur. Yang pertama adalah kalau lihat presentasi tadi hampir semuanya baik ya tetapi masukan dari lapangan, termasuk dari Dapil-dapil itu banyak sekali masalah Pak ya. Hal yang utama misalkan yang sederhana saya sempat tanya bahkan kita sudah berapa tahun Pak subsidi pupuk? Dari Pak Harto tahun berapa itu, tahun 80, sekarang 34 tahun berarti kan, 32 tahun jadinya hampir 34 tahun ya. Nah tetapi masalah-masalah yang dari tahun ke tahun itu nggak pernah berkurang Pak, yang simpel saja di Dapil saya dan hampir di semua Dapil se-Indonesia itu jarang sekali pupuk yang hadir tepat waktu, pasti lambat ya. Kalau keterlambatan tidak punya dampak masih oke, tapi kalau misalkan telat seminggu dua minggu itu akan membuat produksi drop. Kita ada 11,2 atau 11,8 juta hektare? Anggap 10 juta hektare, kalau 1 hektare saja gara-gara keterlambatan kurang 1 ton saja berarti berapa, 10 juta ton kita *loss*. 10 juta ton itu nilainya kalau 1 kg gabah Rp4000 itu Rp40Triliun Pak, sama saja kita sedang merampas Rp40Triliun uang petani yang seharusnya mereka miliki. Belum lagi jadi Pimpinan saya nanti usul kita langsung kunspek, kita ambil *sampling* ya masalah kualitas pupuk antara subsidi dan non subsidi bahkan kalau bisa lab-nya lab yang canggih lah nanti, Pak Sudin mengusulin bawa ke Bulan nanti untuk lab. Ya kita ingin memastikan ini berjalan dengan baik, apalagi kalau sampai isu yang disampaikan Pak Daror itu benar ya kalau itu sudah berjalan puluhan tahun mungkin perlu nanti kesimpulan kita dorong lakukan audit investigasi ya biar persoalan pupuk rakyat semakin *clear nggak* berulang dari tahun ke tahun ya. Nanti kita buat tembusan saja ke pihak-pihak yang berwenang agar audit investigasi itu bisa dilakukan dengan baik sehingga bisa menuntaskan seluruh persoalan pupuk rakyat.

Mungkin itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Daniel.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Kita *break* dulu untuk Ishoma, kembali ke ruangan ini jam 19.00 WIB.
Terima kasih.

(RAPAT DI SKORS)

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Demikian pertanyaan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilakan kepada Dirjen, Kepala Badan Deputi, serta Dirut PT Pupuk Indonesia *Holding company* dan Himbara untuk menyampaikan jawabannya. Silakan.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komsis IV DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan.

Kami mencoba menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Komsis IV. Yang pertama terkait dengan data RDKK, data RDKK adalah dasarnya KTP, kemudian SPPT itu yang kami bikin surat ke daerah, SPPT ini fungsinya untuk melihat berapa luas lahan sawah kemudian dan atau dan atau ya dan atau surat-surat lainnya kalau disana sawahnya bersertifikat ya sertifikatnya dilihat, AJB-AJB dilihat dan seterusnya sehingga luasannya itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, RDKK menjadi e-RDKK ini secara umum saja dibuat oleh Petani didampingi oleh para penyuluh, jadi hal ini untuk meminimalisir kesalahan tadi apa yang disampaikan Ibu Endang jadi ada kesalahan nama dan seterusnya sebetulnya sudah ada pendamping dari para penyuluh Bapak. Karena RDKK dibuat oleh para petani didampingi oleh para penyuluh kemudian nanti dikumpulkan di kelompok tani, diserahkan ke BPP disana ada verifikasi, dari BPP diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten disana ada Kepala Seksi penyuluhan disana yang memverifikasi, kemudian dari Dinas Kabupaten Kota diserahkan ke Provinsi, Provinsi ke Pusat. Jadi pusat tidak memverifikasi kaitan dengan jumlah saja nanti kita Permentankan seperti Permentan 01 itu merupakan gambaran dari alokasi-alokasi pupuk yang diusulkan oleh daerah, mulai dari Petani, kemudian kelompok tani, dihimpun oleh BPP, diverifikasi

oleh Dinas Kabupaten Provinsi dan dialokasikan lagi atau dikuotakan lagi oleh pusat melalui Peraturan Menteri Pertanian.

.....:

Sebentar Pak Ketua boleh izin untuk klarifikasi.

Jadi kalau itu kan daerahnya dekat Pak, nah seperti yang dialami Cianjur itu perjalanannya saja 5 jam Pak, perjalanan dan si Penyuluhnya itu tidak siap Pak gitu nah itu perlu diperhatikan. Jadi penyuluhnya tidak siap, kemudian mohon maaf ya Pak materinya juga tidak lengkap begitu. Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Mungkin ini kasus nanti ada Kepala Badan SDM yang membawahi penyuluh untuk hal-hal semacam ini mungkin agar di fokuskan dan diperlakukan secara khusus.

Kemudian ada pertanyaan yang ditugasi atau yang ditugaskan melaksanakan kartu tani itu siapa? Jadi memang ada penugasan sesuai dengan apa namanya aturan dari Menko Perekonomian bahwa yang ditugaskan untuk melaksanakan kartu tani itu diserahkan ke Himbara Pak Pimpinan. Jadi mulai dari pengadaan Kartu Taninya, kemudian pengadaan elektornik data *capture*-nya, kemudian yang menyerahkan ke kelompok taninya itu adalah Himbara, jadi Himpunan Bank-bank Negara jadi diserahkan ke BUMN. Himbara ini yang berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia untuk melaksanakan kartu tani ini, fungsi Pemerintah apa? Fungsi Pemerintah itu hanya menyiapkan database, menyiapkan database kaitan dengan RDKK yang disusun oleh Petani dan didampingi oleh Penyuluh. Ini mungkin biar jelas jadi yang pelaksana itu adalah Himbara sehingga disana dari Himbara dibagi-bagi wilayahnya BNI daerah mana, BRI daerah mana, kemudian Bank Mandiri daerah mana sehingga dengan harapan akan lebih mudah mengontrolnya. Kemudian tadi ada pertanyaan distribusi pupuk dengan mengapa tidak langsung ke Bumdes? Ini sangat setuju Bapak Pimpinan, sesuai dengan arahan Bapak Menteri bahwa kalau bisa distribusi pupuk itu langsung dari lini 1 ke lini 4, jadi melewati lini 3 dan lini 2. Jadi kalau misalnya Bumdes nanti akan difungsikan sebagai lini 4 sebagai kepanjangan dari Petani itu kalau kami sampaikan ke Pak Menteri mungkin akan sangat setuju gitu ya sehingga tidak ada lagi celah-celah yang kira-kira menghambat atau menyalahgunakan pupuk ini ditingkat lini 2 dan lini 3 jadi langsung ke lini 4 ini sangat setuju. Kemudian data pupuk bersubsidi dasarnya adalah RDKK dari para petani, tadi ada yang menanyakan dasar subsidi pupuk itu dari mana? dasarnya adalah rencana definitif kebutuhan kelompok yang disusun oleh Petani kemudian dihimpun BPP dan seterusnya.

Kemudian ada pertanyaan lagi, pupuk bersubsidi lebih dominan untuk sawit. Jadi berdasarkan catatan yang ada, pupuk subsidi untuk sektor perkebunan itu hanya untuk teh, lada, kopi, kakao, karet, tebu, dan tembakau,

jadi tidak ada untuk sawit sehingga tadi Pak Suhardi disana banyak untuk sawit berarti itu salah Pak jadi artinya sudah pelanggaran gitu.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sedikit Ketua. Jadi saya minta ini perlu diperbaiki di Sulawesi Barat ya karena apa yang saya katakan tadi Kabupaten yang tidak ada atau kecil sekali pangannya justru besar penyaluran pupuknya. Jadi saya minta sekali lagi Pak supaya distribusinya diperbaiki kembali, alokasi per Kabupaten.

Terima kasih Pak.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik Pak Suhardi, sarannya di perhatikan dan *insyaa Allah* dilaksanakan. Tapi apabila ada pupuk subsidi untuk sawit tolong diingatkan bahwa itu melanggar karena berdasarkan ketentuannya tidak untuk sawit karena sawit banyak untuk industri Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bisa pendalaman Pak Ketua.

Ada pertanyaan yang menyambung Pak, ketika kemudian data dari karena beliau mantan Bupati ya jadi pasti tahu persis. Lahan pertaniannya sedikit tapi di RDKK lebih besar dan ternyata larinya adalah ke sawit, kira-kira dasar penghitungannya bagaimana sehingga mungkin Kementerian juga memastikan bahwa data itu tidak abal-abal.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Saya tambahan sedikit Ketua. Saya ingin mempertegas lagi bahwa subsidi pupuk ini patokannya RDKK ya Pak ya bukan luas lahan ya Pak yang ada dari. Oh, berarti bisa dipahami bahwa jika luas lahannya 11,5 menurut data yang ada yang tadi saya tanyakan sama Pak Dirjen, lalu RDKK-nya 22,5 juta hektare berarti patokan untuk subsidi itu adalah RDKK tidak ada komparasi dengan sesungguhnya jumlah luas lahan itu kita berapa gitu, begitu ya Pak Dirjen? Berarti penyimpangannya luar biasa ini Pak 50% lebih sebenarnya kalau boleh.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik Pak nanti saya jelaskan.

Kita lanjutkan dulu Bapak Pimpinan. Kemudian kaitan dengan data nanti saya jelaskan sesuai dengan saran Pak Ichsan. Kemudian tadi ada

pertanyaan apakah pemegang kartu tani pasti mendapat pupuk subsidi? Pasti. Tadi juga ada pertanyaan Pak Helmi kalau tidak salah, banyak petani yang tidak mempunyai kartu tani apakah mendapatkan pupuk subsidi? jawabannya adalah dapat sepanjang dia mengisi RDKK dan tergabung didalam Anggota kelompok tani, ini jawabnya itu Pak.

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Interupsi Pak.

Apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan.

KETUA RAPAT:

Bu, kalau interupsi melalui Pimpinan tidak melalui sana.

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Oh, ya maaf-maaf, siap. Izin kan Pak Ketua. Lanjut.

Jadi apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan realita dilapangan, kenyataannya di Banten sendiri dan dari sekian yang digulirkan yang digunakan itu 0% ya. Serang ya. Jadi itu sulit petani itu untuk bisa mendapatkan subsidi pupuk dan mohon dari RDKK juga dari Banten itu kira-kira ditambah untuk subsidi pupuk.

Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Siap Ibu iya.

Mungkin kasusnya begini Bu, banyak terjadi, jadi seperti kami kunjungan ke lapangan Pak Petani apakah tahu pupuk subsidi? Oh tidak Pak apa itu pupuk subsidi? Rupanya dia tidak masuk ke kelompok tani. Kalau Ibu ada waktu di Dapil Ibu dimana nanti kita sama-sama kesana gitu biar selesai itu dengan teman-teman dari Pupuk Indonesia gitu Bu ya, jadi ini pasti petani itu tidak masuk dalam kelompok, pasti itu ya. Oke.

Kemudian kios dan distributor amburadul ini dari Pak Firman, kenapa tidak langsung ke Bumdes? Nanti karena kios dan distributor itu domainnya Pupuk Indonesia.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Ketua, sedikit Ketua.

Saya minta dituntaskan saya punya khusus mengenai jagung tadi saya minta jawaban yang tegas apakah memang bibit jagung untuk 3 Provinsi ini memang tidak dapat atau belum ya? Nanti ada ya, oke terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Jadi intinya kalau bibit jagung. Jadi intinya kaitan dengan bibit jagung Bapak Suhardi sepanjang ada usulan pasti dikasih Pak karena memang kita ada program pengembangan jagung, jadi berapapun luasnya pasti dikasih gitu Pak ya termasuk padi hibrida Pak.

Kios dan distributor amburadul, kenapa tidak langsung? nanti yang jawab dari Pupuk Indonesia karena domainnya domain beliau binaan beliau dan kenapa tidak ke Bumdes? nah ini lagi-lagi mungkin kami saya pribadi setuju gitu nanti tinggal kami lapor ke Bapak Menteri Pertanian.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Interupsi Pimpinan boleh.

Pimpinan, terima kasih. Pak Dirjen tadi dasar dari pupuk tadi RDKK? Itu diusulkan oleh Dinas, kelompok ke dinas gitu?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

RDKK itu dibuat oleh Petani, dasarnya adalah SPPT untuk melihat lahan luas lahannya, kalau *nggak* ada SPPT ya syukur ada sertifikatnya, ada surat-surat tanah lainnya dan KTP yang bersangkutan.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pastinya dinas tahu ya?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Harus tahu karena begini prosesnya begini Bu, izin.

KETUA RAPAT:

Saya membantu menjelaskan.

Saudara Dirjen jangan bicara dinas pasti tahu, belum tentu dinas tahu lapangan, ini kenyataannya begitu loh. Jangankan dinas, penyuluh saja belum tentu tahu lapangan, jadi jangan bilang pasti, pasti jangan. Tolong di klarifikasi itu.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Siap, siap Pak Ketua. Jadi dinas tahu, dinas Provinsi tahu, dinas Provinsi tahu, Kabupaten Kota tahu, BPPT tahu.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Anggap saja tahu dan anggap saja paham. Berarti kalau misalnya tahu dan paham berarti dia tahu akan kebutuhan-kebutuhan dari wilayahnya, kemudian di naikkan lagi untuk permintaan jumlah pupuk, untuk dikuotakan. Tetapi pertanyaan, apakah kuota yang diminta Kabupaten itu seluruhnya dipenuhi? Anggap saja ini tahu dulu Pak, walaupun saya tahu tidak semuanya itu tidak tepat tahunya gitu loh. Tolong dijawab dulu Pak.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik, jadi tidak semua yang ada di RDKK itu dipenuhi karena disesuaikan dengan Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah gitu Bu ya. Nanti saya jelaskan di *slide* ada kok bagaimana rumusnya kita mengakomodir usulan berdasarkan RDKK, kemudian Pemerintah menyiapkan Anggaran berapa kita simulasikan ketemunya seperti itu, gitu Bu ya. Dan rata-rata penggunaan pupuk subsidi dalam 5 tahun terakhir itu rata-rata 9,2 juta ton, untuk 2019 8,7 juta ton, untuk 2020 dialokasikan untuk 7,9 juta ton, jadi memang turun dari Rp28Triliun ke *dua puluh enam* gitu Bu ya. Bisa lanjut Pak Ketua?

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Boleh Pak Ketua sebentar satu kali.

Berarti boleh dikatakan bahwa tidak semua yang punya kartu tani itu dapat?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Semua yang punya kartu tani itu dapat Ibu. Yang punya RDKK dapat hanya jumlahnya itu volumenya itu tidak sesuai yang diusulkan, semuanya dapat.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Tetapi jumlahnya tidak sesuai?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Tidak sesuai dengan yang diusulkan, diproporsionalkan.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Oke, terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Nanti yang mengatur dinas Kabupaten.

WAKIL KETUA/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pimpinan sebentar, Ketua saya mohon izin sedikit saja.

Ini maaf saya ingin mendalami juga ini permasalahan di Dapil saya yaitu Kalimantan Timur Pak Dirjen, ini menyambung dengan kuota pupuk dari RDKK yang diajukan dan juga penentuan alokasi di tahun 2020. Saya cuma mau kasih gambaran saja dari Kaltim Pak ya jadi ini nanti hubungannya saya ingin tahu ini mekanisme untuk menentukan alokasinya itu seperti apa ya. Ini saya membacakan saja persentasi kuota pupuk dengan RDKK *online* tahun 2020 secara persentasi Pak ya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 itu dari yang diajukan RDKK untuk Urea itu hanya 23%, untuk SP36 hanya 7,6%, untuk ZA 14%, untuk pupuk NPK 18,95% dan pupuk organik 4,14%, ini kalau saya lihat kok sangat miris sekali kawan-kawan petani saya di Kalimantan Timur. Mohon nanti benar-benar Bapak menjelaskan ini mekanisme untuk menentukan alokasi dari besar kecilnya seperti apa ya.

Terima kasih Pak Dirjen.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Mohon ditayangkan halaman 17 Pak tayangan saya, izin halaman 17. Mohon izin mungkin saya jelaskan jadi ini data usulan daerah yang masuk ke sistem e-RDKK sampai tanggal 19 Desember 2019, mengapa kita batasi sampai tanggal 19 harusnya sampai tanggal 15? karena kita memberikan waktu ke Provinsi untuk memvalidasi ulang 1 minggu, Kabupaten 1 minggu dan akhirnya awal Januari itu kita tetapkan dengan Permentan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi hampir tiap hari kita komunikasi dengan para Kepala Dinas Kabupaten Kota dan tanggal 19 Desember kita *close* dengan setiap Kepala Kabupaten Kota tandatangan di sistem Pak, izin. Kemudian berdasarkan alokasi ini ternyata pupuk yang dibutuhkan berdasarkan e-RDKK per jenis pupuk itu jumlahnya 16.109.684 ton setelah saya jumlah, ini untuk pupuk Urea ada 3,8 juta, SP36 1,78 juta, ZA 1,43 juta, pupuk NPK 4,1 juta, kemudian formula khusus 33000, kemudian organik 4,9 juta, nah ini saya jumlahkan 16.109.684 ton, ini berdasarkan usulan RDKK. Sedangkan itu ada disampingnya alokasi dari Pemerintah hanya 7,9 juta ton ini separuhnya Pak, bagaimana kita mensimulasikan agar semua Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa itu dapat alokasi pupuk tentunya tidak harus sepenuhnya gitu ya tidak harus sepenuhnya sehingga kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya adalah usulan e-RDKK contoh misalnya untuk Aceh, untuk Aceh itu 96033 dibagi total per jenis dibagi 3,8 juta, dikali kuota Urea yang dialokasikan oleh Pemerintah 3,2 juta ton, jadi ketemu disebelahnya itu 82,717 ton Pak. Nah ini secara proporsional ke bawah sehingga jumlah yang dibawah itu untuk Urea 3,274303 itu sama dengan alokasi yang di berikan

oleh Pemerintah gitu Pak ya, begitu juga untuk SP36, ZA, NPK, kemudian NPK formula dan organik itu jumlahnya sama gitu Pak ya.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua. Ketua, izin Ketua.

Jadi tolong Pak Dirjen dipertegas bahwa pembagian pupuk itu tidak sesuai dengan permohonan RDKK, satu. Yang kedua apakah ini dibagi rata kelompok tani dapat, yang harusnya 10 kilo misalkan karena terbatasnya hanya 5 kilo atau dipilih-pilih orang yang dapat itu dipertegas, ini teman-teman kan pertanyaannya seperti itu.

Terima kasih Ketua.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik Bapak.

Jadi tugas Kementerian Pertanian adalah memberikan kuota sesuai dengan usulan RDKK yang diusulkan oleh Provinsi. Dari Provinsi turun ke Kepala Dinas Kabupaten, dari Pusat dari Menteri Pertanian turun ke Provinsi, Provinsi meng-SK-kan kuota per Kabupaten, nah yang membagi per Desa Kecamatan itu Kepala Dinas Kabupaten, itu kita tidak paham karena yang paham adalah mereka Pak gitu. Jadi apa namanya harusnya setiap petani ya setiap petani yang mengusulkan RDKK itu akan dapat pupuk hanya mungkin volumenya tidak sama dengan yang diusulkan karena memang kenyataannya coba Pak lanjut Pak, lanjut lanjut terus lanjut, nah ini Pak. Karena disini itu yang biru itu berdasarkan usulan RDKK Pak, tinggi-tinggi banyak-banyak, jadi usulannya memang mungkin diperbanyak dengan harapan syukur dapat semua minimal seper berapanya ya *tiga perempatnya* minimal gitu, hanya kenyataan di lapangan itu realisasinya itu tidak jauh dengan alokasi jadi rata-rata 9,2 juta ton per tahun. Itu seperti contoh disana ada contoh saya gambarkan Urea. Urea itu usulannya berdasarkan RDKK 6,8 juta ton untuk 2016.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Interupsi Pimpinan.

Terima kasih Pak.

Saya heran juga, tadi Bapak pertama menyampaikan bahwa yang biru itu usulan yang mungkin diperbesar. Berarti ini jingg tidak berdasarkan data valid.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Tidak Pak.

Ijin Pak, jadi yang biru ini berdasarkan usulan RDKK Pak.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Itulah usulan RDKK yang mungkin diperbesar Bapak bilang sampaikan tadi.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Mungkin jumlahnya diperbesar dari daerah mungkin.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Berarti tidak mungkin.

Begitu Pak, ini kita ini mohon maaf, kami Komsis DPR RI mengoreksi Bapak bukan mengoreksi Bapak, mengoreksi kepentingan kita bersama. Tadi berbicara bahwa kemungkinan Bapak juga dibohongi dari bawah dengan dibesarkan data, faktanya seperti Bapak sampaikan, yang biru itu realisasi, yang merah malah hampir setiap tahun tidak terpenuhi yang diharapkan. Berarti data biru itu data yang mungkin dibesarkan sebagaimana Bapak sampaikan tadi, bermakna negeri kita sampai hari ini belum punya data yang valid. Kita berharap kita dukungan bersama sebagaimana cita-cita Menteri Pak Syahrul Limpo dalam jangka 100 hari dia kerja, kita punya data yang valid. Itu satu.

Yang kedua, kembali tadi Bapak sampaikan bahwa tentang alokasi pupuk yang punya rumus tersendiri. Itu berlaku sama keseluruhan provinsi betul. Kembali pada penegasan ini saya sampaikan. Kalau berlaku sama seluruh provinsi mohon maaf teman-teman dari anggota DPR-RI dari dapil yang berbeda, saya Aceh merasa rugi. Kalau rumus yang digunakan keseluruhan provinsi sama, kami Aceh merasa rugi kenapa, karena kami pupuk kalau sama rumusnya seperti provinsi lain, kami rugi, kenapa rugi, karena gas yang kami juga ke PIM, tidak sesuai dengan harga. Kami ada rugi penjualan gas ke PIM \$2,5/MBTU. Rugi, kenapa rugi, begini Pak, ini perlu saya jelaskan sedikit. Kami di Aceh punya qanun bagi hasil migas, disaat harga gas kami jual kepada PIM atau kepada pihak lain, tidak sesuai dengan harga dengan harga murah, sehingga keuntungan kami berkurang. Disaat keuntungan kami berkurang dari baik dari PT. Arun ataupun dari Blok A, kami kerugian bagi hasil tidak mencapai, malah perhitungan sementara sekitar 65 miliar/tahun kami ada kekurangan. Maka saya mohon kepada kesempatan ini, khusus untuk Aceh kami sudah rugi diharga gas, jangan disamakan pembagiannya dengan provinsi lain.

Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Saran saya Pak Khalid, suruh Gubernurnya buat surat usulan, jadi pemerintah dengan pemerintah kita sebagai legislatif ikut mendorong.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Siap dilaksanakan Ketua, terima kasih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ijin Pak Ketua.

Ijin Johan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ini seperti ini konsekuensi dari sistem yang kita pakai, karena ini RDKK ini tidak boleh lagi kita lanjutkan, ini PHP namanya. Yang namanya kita minta masyarakat mengajukan usulan, dia akan usulkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan RDKK itu kebutuhan kelompok. Mereka akan mengajukan sesuai dengan kebutuhannya. Nah inilah akibatnya dari pada kita panjang-panjang itu, selesaikan data Pak. Dengan data kita hitung kebutuhan masyarakat ini. Nah anggaran kita berapa, dari anggaran yang tersedia inilah kemudian kita distribusi kepada masyarakat. Kalau kita minta masyarakat mengajukan terus kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, ia PHP lah namanya itu, karenanya banyaklah truck-truck di kampung saya itu dijara pupuk subsidi itu Pak.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua interupsi Ketua.

Pak Dirjen, data RDKK itu data luas areal atau apa, atau luas tanah. Saya tolong dijawab dulu ini. Apa yang disampaikan oleh teman-teman itu termasuk oleh saya, itu fakta di lapangan, saya mantan Bupati Pak. Saya tahu betul bagaimana kerjanya penyuluhh, bagaimana kerjanya di dinas itu, tutup mata itu. Tolong dijawab dulu itu, luas areal atau luas tanam.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik Pak.

Yang pertama ijin, berdasarkan RDKK itu 16 juta ton Pak, pupuk yang dibutuhkan 16 juta ton. Kami mengusulkan kepada pemerintah itu, itu sebesar diawal 34 triliun Pak. 34 triliun untuk 22 juta ton. Kemudian ini kasus 2019, disetujui 8,6 senilai 29 sekian triliun. Kemudian dirasionalisasi dengan adanya penurunan luas baku sawah, itu diblokir 2,146 triliun rupiah atau sekitar 7 ribu ton. Itu usulan kita sesuai dengan RDKK, karena memang kemampuan keuangan pemerintah hanya sebesar itu, maka kita rasionalisasi yang pertama.

Yang kedua, tadi pertanyaan dari Pak Mantan Bupati. Berdasarkan luas tanam atau luas lahan baku sawah, karena intruksi kita kepada para penyuluh itu berdasarkan data luas lahan baku sawah, maka yang ada di RDKK itu berdasarkan luas lahan baku sawah Pak, otomatis *ekuivalen* dengan luas tanam. Artinya, yang diusulkan dalam RDKK itu berdasarkan luas lahan baku sawah karena dasarnya adalah SPPT dan KTP.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua sambung dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Sutrisno. Saya jelaskan bertanya lagi. Tadi mengatakan bahwa RDKK itu dihitung dari luasan tanam atau sawah. Sawah atau tanam?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Luas lahan baku sawah sama tanam kalau ditanami semua sama Bapak.

KETUA RAPAT:

Kalau ditanami semua. Anda tahu tidak ada lahan itu berapa luasnya di Indonesia. Inikan masih ada lahan tidur, orang kota membeli sawah belum tentu diolah. Kalau mau yang gampang melihatnya, datang ke Lampung kebelakang Bandara, luas tanahnya itu kosong semua, itu kan lahan tidur. Jadi saya juga bingung mau bicara lagi. Silakan Pak Sutrisno lanjutkan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ini penting jawabannya, karena di lapangan ada yang sekali dihitungnya dua kali tanam, dua kali tanam dihitung tiga kali tanam, karena

biasalah birokrasi kalau mengusulkan itu lebih mengusulkannya. Jadi artinya apa, efeknya adalah pada kerugian negara, karena nanti pengusulan untuk subsidiya bisa lebih besar. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh kita ingin membantu Bapak, untuk memperbaiki data kasar itu. Kalau data kasar itu tidak diperbaiki, apa yang tadi indah itu tidak akan menjadi indah akhirnya. Di daerah Ibu Indah disini.

Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik, jadi maksud saya begini Pak.

Mohon ijin Pak.

Jadi membahas RDKK, jadi RDKK itu dasarnya adalah SPPT dan KTP. Berarti disana ada luas lahan baku sawah. Ternyata setelah kita hitung, itu sama dengan luas tanam yang diusulkan, karena ekuivalen sama dengan ini. Kemudian untuk menghitung pupuk ini, untuk pertanaman sekarang April-September, pertanaman April itu kita menggunakan luas tanam Bapak Pimpinan dari BPS yaitu 11,8 juta hektar dalam satu tahun.

KETUA RAPAT:

Sekarang pemerintah menggunakan data BPS atau data dari ATR/BPN. Karena kemarin Sekjen anda mengatakan akan dirilis data luasan yang akan ditanaman melalui DPR ATN. Jadi saya mau tahu dulu ini, Pak Dirjen sama Sekjennya bicaranya beda.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik Pak, bisa saya jelaskan.

Mohon ijin menejelaskan Pak.

Jadi hasil rilis terakhir tadi ada pertanyaan juga belum sampai kesana. Pak Mentan itu menjanjikan satu setengah bulan selesai untuk satu data lahan baku sawah, kemudian kami dari PSP bisa menyelesaikan lebih kurang 28 hari kalender dengan megerahkan lebih kurang 160 petugas kedaerah untuk melakukan validasi dan dengan metode arcgis dan diakhir tanggal 28 Desember kami melakukan rapat dengan BPS TR/BPN, Badan Informasi, Geospasial, Badan Antariksa, kemudian ada enam, satunya lagi saya lupa, dan itu sepakat diangka 7,4 juta hektar. 7,4 hektar ini kalau misalnya rata-rata IP nya 1,6, itu bertemu angka 11,8 juta hektar untuk pertanaman dalam satu tahun. Ini informasi dari Dirjen Tanaman Pangan sama datanya dengan BPS. Itu yang kami gunakan.

KETUA RAPAT:

Sekali lagi pertanyaan saya.

Yang mau digunakan data BPS atau data ATR/BPN?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Dua-duanya Bapak.

KETUA RAPAT:

Dua-duanya, kalau dua-duanya tidak sama?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Harusnya sama, karena lahan baku sawah 7,4.

KETUA RAPAT:

Tampilkan yang tadi.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Luas baku sama luas namam beda.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ijin sedikit Pak Ketua.

Ini dua kali masyarakat kita dipotong ini. Pertama RDKK berbasis NIK. Satu NIK itu dua hektar. Harusnya dari sini sudah cukup dua hektar itu apa tidak semua kebutuhan lahan masyarakat itu diajukan. Kalau di kampung saya Pak saya ini langsung orang Sumbawah, besar-besar, luas-luas tanah kita Pak, 2 hektar itu kita mengajukan begitu sudah tidak bisa dipehuni semua kita lapor tanahnya, pupuknya juga dikurangi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan pemerintah. Dua kalu petani ini Pak. Nah jadi maksud saya itu sebenarnya data manapun dipakai sebenarnya dengan basis NIK, RDKK itu basisnya NIK, satu NIK 2 hektar itu sudah bisa kita hitung sebenarnya.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak.

Nah, kita lihat ini datanya. Data Kementan sama data BPS. Pak Mindo silakan kalau mau bicara.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Kalau ini kan soal produksi ya, tadi kita soal input pupuk tadi ya. Nah tidak bisa ekuivalen setiap itu provitasnya berbeda-beda daerah itu berbeda. Teman-teman sekalian dan Pak Dirjen, sebenarnya kita mempunyai kesalahan yang sama, kealfaan yang sama. Bapak-bapak yang pernah bekas Bupati, juga mengalami kekeliruan yang sama. Karena waktu menetapkan RDKK itu, penyuluh itu juga banyak yang tidak mengerti kok. Banyak yang tidak mengerti kalau menanam padi berapa kebutuhan Ureanya, berapa kebutuhan Phonska dan sebagainya. Masih pada Tahun 2005 an, saya pernah marah kepada Kepala Dinas di Gresik yang meminta. Kalau di daerah kami 6 kilo dibutuhkan Urea untuk satu hektar, itu marah saya. Kalau Kepala Dinas saja berfikir seperti itu, orang Medan bilang, Hubar-habir republik. Inilah persoalan kita sekarang. Kalau tabulasinya itu sudah sangat betul, kalian tanam Apel, berapa luas butuh pupuknya apa saja dan bila mana, itu sangat kuantitatif. Jelas waktunya, siapa yang harus mengontrol ini, seharusnya penyuluh. Penyuluhnya jauh berkurang.

Dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sarjana dari jurusan olahraga jadi Kepala Dinas Pertanian. Kepala Dinas Pertanian tidak tunduk kepada Menteri Pertanian, dia tunduknya kepada Bupati, karena Bupati lah yang mengangkat dia. Jangan pula tiba-tiba dia jadi Kepala Sekolah di daerah terpencil, haknya Bupati selama eselonisasinya sama, dimana itu. Jadi memang masalah pertanian ini, memang persoalan Pak. Mari kita selesaikan bersama, tidak ada yang bisa tiba-tiba kita selesaikan, harus bertahap kita selesaikan ini. Salah satu tadi Bumdes itu sudah sepakat, itu baru salah satu bagian kecil, memverifikasi kebutuhan itu juga dibutuhkan. Belum lagi misalnya khusus untuk Pulau Jawa, dipastikan orang-orang mana tadi teman yang di BKO tadi itu, itu dari Lamongan dan Gresik. Itu pupuk Ureanya yang untuk tambak sudah dimasukan apa belum, karena tidak mungkin dia masuk RDKK kelompok tadi, padahal dia nyata tubuh sebelum dimasukan bandeng atau yang lainny itu, dikasih dulu Urea supaya plankton-plankton dan jasad renik lainnya itu bisa tumbuh. Kemudian Perhutani, Jagung ada yang sudah masuk RDKK, ada yang belum masuk RDKK. Nanti bisa berapa juta hektar Perhutani, sekarang ini lagi didorong bersama lagi kita beratanam Porang. Ini Pak Bupati mau tanam Proang 20 hektar, dia mau mengasih saya 5 hektar katanya, kalau betul itu masih potensial.

Nah, saya kira begitu usul saya Pak Ketua, dibuat tim kerja, bekerja satu mengatas namakan poksi-poksi, dibawah koordinasi Pimpinan Komsu supaya selesaikan ini, tidak mungkin kita selesaikan malam ini. Apa yang bisa kita selesaikan malam ini, kita selesaikan, yang tidak bisa lanjutkan dalam satu minggu ini.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mindo.

Jadi di Lampung apa yang Pak Mido katakan, Kepala Rumah Sakit Umum daerah, itu Dokter Hewan. Lho ini benar saya bicara benar, silakan di cek. Alasannya apa, binatang tidak bisa bicara sama saja, saya bisa obati, apalagi manusia. Belum lama ini Kepala Dinas Perikanan, Sarjana Hiu, di Provinsi Lampung. Saya tanya Bapak, Bapak SAI ya, berarti Bapak Sarjana Hiu, ia Pak, mengerti tidak masalah perikanan, saya tidak mengerti apa-apa Pak, saya cuma suruh datang, Dirjen datang, Bapak datang, saya datang. Itu titelnya Sarjana Hiu. Jadi yang Pak Mido katakan itu adalah benar.

Silakan lanjutkan.

Singkat Pak, karena masih banyak nanti mungkin SDM, Ibu dari Meko Ekuin, Pupuk Holding mungkin juga Dirut pupuk yang lain harus bicara, kalau ada masalah bicara, jangan diam saja, Bapak diundang disini dari pagi sampai malam harus bicara masalahnya kita pecahkan bersama-sama.

Silakan.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Pak Ketua, sebelum dilanjutkan, ada agak sedikit mengganggu itu ada penjelasan Pak Dirjen, mengatakan kalau dapat kartu tani pasti dapat pupuk, begitu ya. Ini saya dari teman-teman di lapangan, tidak demikian Pak. Jadi banyak yang sudah pegang kartu tani, pupuk tidak ada, tidak dapat. Nah tolong ini jangan *misleading* dalam informasi ini Pak, supaya kita bisa mengetahui ini. Persis ini sebenarnya sebabnya apa.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Menambahkan pengalaman ini Pimpinan sebentar.

Jadi saya menguatkan, bahkan bahasa petani itu, sudah jangan subsidi bayar, asal barangnya ada. Ini kan permasalahan. Itu saja tambahannya.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Terima kasih.

Nanti mungkin ikut menjauh dari Pupuk Indonesia, intinya begini Bapak. Kalau dia sudah membuat RDKK, itu pasti dapat itu Pak ya. Mungkin dia memegang kartu tani, kemudian pupuknya tidak ada.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, tolong jangan bilang mungkin jangan. Kalau mungkin itu nanti susah juga, besok saya memutuskan RDP Eselon I, kata-kata saya mungkin juga nanti.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Maksud saya begini Bapak Pimpinan.

Kasus kartu tani itu belum masuk ke akses edisi di kios Pak, itu biasanya seperti itu, sehingga tidak bisa untuk menebus, tapi dengan dia sudah mengisi RDKK, pasti dapat Pak.

**DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (AAS
ASIKIN IDAT):**

Pak Ketua, mungkin saya jelaskan yang Pak Panggah.

Jadi betul Pak, ada beberapa atau banyak petani yang sudah punya kartu, tapi dia tidak bisa membeli pupuk. Karena syarat untuk bisa membeli yang tani, dia harus punya kartu taninya sesuai dengan KTP nya dan di dalamnya ada alokasi berapa dia mempunyai hak untuk mendapatkan pupuk Pak, karena disana juga ada luasan tanahnya. Jadi kalau itu belum dientri, jadi kartu tani yang dibuat oleh teman-teman di perbankan, itu belum tentu di dalamnya belum ada alokasi-alokasi yang untuk masing-masingnya itu, karena yang mengalokasikannya itu itu adalah dinas-dinas pertanian yang di daerah. Ini belum dimasukkan, sehingga petani yang datang ke pengecer, begitu digesek, namanya ada, tapi datanya tidak ada Pak, dia bisa membeli pupuk atau tidak begitu.

F-PKS (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan sebentar ya, langsung ke Pak Dirut ini, Pak Dirut sebelah kiri, Pak Haerudin.

Pertanyaan tadi temant-teman itu apa yang pegang kartu tani, dapat pu pupuk tidak. Ini jawabnya pasti dapat. Pemahaman saya kalau lihat neraca tadi, banyak kalau jawaban Pak Dirjen tadi, dapat, tapi tidak maksimal dapatnya, mungkin hitungan luas lahan itu tidak semua masuk menjadi RDKK. Tidak seluruh kumulasi RDKK itu tersiapkan pupuknya karena kemampuan kita. Jadi logikanya itu sederhana. Tidak semua RDKK bisa mampu diberi pupuk, kalapun mampu itu berarti volumenya kecil, yang seharusnya 50 dapat 20. Nah, kira-kira begitulah.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup Pak Haerudin, saya rasa Bapak lebih cocok duduk di depan nanti.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pak Ketua, pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Trisno, sebentar saja.

Jadi ini judulnya punya kartu, seharusnya kartu ini dikeluarkan dengan data yang sudah lengkap baru dikelolakan. Maka saya juga bingung, punya kartu kalau tidak ada saldonya, tidak ada keterangannya, untuk apa kartu dikeluarkan. Maka tadi usulan, sampaikan ke Menko Ekuin, kenapa tidak dicoba dulu Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa sudah clear, semua bisa, baru dilanjutkan. Kalau ini acak-acakan kalau begini. Jadi pernyataan tadi saudara dari Pupuk Indonesia, ada kartunya, tidak ada datanya, ia buat apa dikasih kartu. Harusnya datanya entri dulu semua masuk, sudah selesai, dijelaskan, anda harus menyimpan uang dulu baru bisa ambil pupuk begitu kan, betul tidak. Ia kalau kartunya dapat, data sudah dientri, kuotanya ada, duitnya tidak ada, ia tidak bisa beli juga.

Silakan Pak Trisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya tujukan kepada Himbaran.

Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa urusan kartu tani dari mulai persiapan cetak sampai kemendidik kepada petani dari himbaran. Prosedru perbankan manakala dokumen itu sudah lepas kepada masyarakat, pendataan entri data sudah dilakukan. Pertanyaan saya, kartu yang sudah dilepas kepada publik itu kapan dientrinya.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY* (AAS ASIKIN IDAT):

Terima kasih Pak.

Jadi kami dari Himbara tentunya berkoordinasi degan yang terkait Pak. jadi porsi kami adalah dipencetakan kartu sesuai dengan data yang disampaikan kepada kami dan edukasinya, sosialisasinya sepakat Pak, kami sama-sama dengan Dinas dan Kementerian Pertanian.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bapak saya tambahkan ini.

Ini kalau begini bohong-bohongan ini. Yang tadi begitu indah nanti kita bisa tahu berapa lahan, toh nanti sumber data itu dari edisi, begitu proses, nah kalau sistemnya belum di enter, bagaimana mungkin bisa, itu. Ini berarti bohong-bohongan ini.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (AAS ASIKIN IDAT):

Sepakat Pak.

Jadi untuk Pemda yang sudah koordinasi dengan baik dengan Himbara Pak, contohnya di Provinsi Jateng dan di Sumbawa Barat, itu memang jadinya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan dengan tempat yang lain, karena memang datanya juga masih belum divalidasi Pak, maaf saya ralat, datanya terus dikoordinasikan, bukan belum divalidasi, maaf.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua, itu memang datanya memang begitu bicaranya. Kartu yang sudah dikeluarkan itu 5 juta, yang baru dipakai itu baru 581. Nah salah satunya yang Bapak sebut tadi itu Sumbawa Barat, Dapil saya. Jadi NTB totalnya itu 31 ribu Pak, belum ada satu pun yang menggunakan termasuk orang Sumbawa Barat yang Bapak sebut hebat itu. Nah itu pertanyaan saya tadi itu. Bagaimana nasib yang 581 yang sudah pegang kartu tani hari ini, apakah mereka sudah terjamin sesuai dengan hak-haknya sebagai pemegang kartu tani.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan menambahkan.

Menambahkan Pak Johan. Jadi pertanya berapa persen dari kartu yang sudah diberikan itu yang ada datanya, janga sampai nanti yang menggunakan itu oke sudah ada datanya, tetapi bolehlah program ini semuanya ada, semuanya tersampaikan, tetapi data entrinya tadi tidak ada. Jadi sama saja seperti disampaikan oleh Pak Bupati, jangan sampai nanti bohong-bohongan saja jadinya judulnya.

Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pimpinan tambahan.

Terima kasih.

Masih soal entri data itu Pak. Tadi saya bilang ada prosedur teknis yang harus dipenuhi pada saat tadi sesi tanya jawab, saya menyatakan hal itu dan ternyata terbukti disini belum tuntas dilakukan, dan ingat bahwa kartu ini manfaatnya bukan sekedar untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tetapi juga dipergunakan untuk penjualan langsung, digunakan juga untuk kredit usaha, untuk tabungan dan bantuan sosial. Kalau satu aspek saja ini tidak sempurna, bagaimana dengan tiga, empat aspek yang lain Pak. Karena itu dari tadi kita usulkan, lebih baik kita buat *pilot project*. Kita pilih persiapannya seperti apa, dari berbagai aspek tadi, mulai dari aspek yang sifatnya sistem, aspek

teknologi dan aspek manusianya kita siapkan, sehingga evaluasinya itu lebih jelas dan terukur Pak. Setelah ada sukses story, baru kemudian kita duplikasi, kita sesuaikan dimana daerah yang bisa kita lakukan Pak. Kalau seperti ini, ia mohon maaf Pak, akhirnya kita memutar-mutar, tadi RDKK berdasarkan semua pasti dapat katanya, padahal aspek manusianya kita siapkan sehingga evaluasinya itu lebih jelas dan terukur Pak, setelah ada *success story* baru kemudian kita duplikasi kita sesuaikan dimana didaerah mana lagi kita bisa lakukan, kalau seperti ini mohon maaf Pak akhirnya kita mutar-mutar. Tadi dibidang RDKK berdasarkan semua pasti dapat katanya padahal baca tabel saja jelas biru itukan RDKK yang diusulkan, realisasinya tidak seperti itu Pak saya terus terang bicara soal ini saya usulkan *pilot project* supaya lebih terukur dimana saja fokus, sehingga kita evaluasinya juga jelas kalau banyak begini akhirnya tidak kepegang Pak, semua hal mau kita bereskan selesaikan tapi tidak ada yang tuntas itu baru satu aspek tadi untuk mendapatkan pupuk subsidi, soal 3 item yang lain kita belum tahu Pak.

Terima kasih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua satu lagi Pak.

Mau tanya cerita sukses saja karena dari 581 kartu yang sudah dibagikan dan digunakan itu adanya 526 di Jawa Tengah, artinya ini sebagian besar ada 561 kartu tani yang sudah dibagi di Jawa Tengah, bagaimana kondisi petani yang menerima 561 di Jawa Tengah hari ini? Apakah mereka sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kartu tani yang dikeluarkan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan dijawab.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Untuk di Jawa tengah itu transaksinya sekarang tercatat didata base kami 57.280 transaksi didata base kami.

KETUA RAPAT:

Jadi datanya yang sudah dibuatkan kartu tadi 5 juta yang baru digunakan 500 ribu, dipulau Jawa berarti cuma 10% nya dipulau Jawa kalau dipulau lain? kalau kita begini sampai pagipun kita muter-muter tidak akan abis-abis ini.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Sedikit Pak Ketua.

Pak Dirjen saya mau tanya ini di Aceh 88 baru ya? boleh langsung Pak Ketua? 88 dan belum digunakan pasti pupuk juga belum pernah tersalurkan? Coba Bapak lihat kartu tani sudah didistribusikan 88 ya Pak coba dilihat, ini kartu yang tersalur yang kartu tani baru 88 seharusnya untuk Aceh misalkan berapa kartu tani yang harus dikeluarkan? Berapa untuk sample saja kita kejar satu dahulu.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Mohon izin Pak.

Ini data dari himbara bahwa kartu tani sudah terdistribusi di Aceh sudah 88 seharusnya berapa mungkin Himbara lebih tahu.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Instruksi Ketua.

Saya kira Himbara suruh keluar saja Ketua karena tidak menguasai data, untuk apa hadir disini berbelit-belit saja kita ketemu, kalau dia belum siap suruh keluar saja belajar diluar baru ini mohon maaf.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Saya bertanya Pak data calon pemegang kartu tani itu siapa yang membuat? Bukan Himbara yang menentukan, kalau Himbara inikan dia yang membuat kartu dia yang mengadminstrasikan tapi data petaninya dari Dirjen dong dari Kementerian.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Mohon Izin Pak.

Jadi data petani data RDKK kita yang membuat data base nya dari Dinas Pertanian Kabupaten, kemudian data base itu diakses oleh Himbara lalu Himbara yang mencetak kartu kemudian membagikan kepada para petani termasuk edisinya.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Ngerti saya pak ngerti itu, makanya tadi itu tadikan ditanya 88 petani sudah terima kartu tani dari berapa? Jangan ditanya ke Himbara karena Himbarakan hanya mencetak kartu saja, tapi yang memasukan data petani itukan dari Kementerian walaupun inputnya itukan dari RDKK itu.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Izin Bapak Pimpinan.

Jadi kita membuat data base yang masuk ke RDKK diakses oleh Bank, Bank itu yang selanjutnya membuat kartu tani yang menyerahkan ke kios yang dibagikan ke petani-petani, sehingga yang mengetahui berapa petani yang dapat kemudian realisasi berapa itu seharusnya dari Bank Pak.

F-GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Instruksi Pimpinan.

Ini tambah rumit ini, ini mohon maaf informasi yang saya dapat dari luar seharusnya ini bukan informasi yang saya dapat diluar tapi Bapak-Bapak yang harusnya memberikan informasi, itu hampir 268.000 kalau tidak salah yang harus mendapatkan berdasarkan data RDKK.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Izin Bapak.

Kalau berdasarkan data kami yang harus mendapatkan itu 340.589 kartu tani.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Dari data seharusnya 340 ribu ini baru keluar 88, jadi ini permasalahan segini sudah masuk kalau kita Januari masuk Februari kita baru 88 *MasyaAllah* ini kita mau bawa kemana ini, bilangnya orang Aceh ribut terus apa tidak ribut? 70 sudah negara Indonesia merdeka kartu tani di Aceh baru 88 dan ini belum teralisasi masih 0 berarti di Aceh belum beredar pupuk subsidi sampai detik ini?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Bukan begitu Bapak mohon izin.

Jadi pupuk subsidi itu tetap beredar dasarnya itu adalah RDKK Pak.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Tadi katanya yang menerima pupuk subsidi yang punya kartu tani, kartu tani baru dapat 88 orang realisasi belum ada bagaimana bisa beredar pupuk? Terima kasih Pimpinan tolong bantu jelaskan.

KETUA RAPAT:

Mungkin begini Pak Khalid, Saudara Dirjen menjelaskannya kurang lengkap sebentar dahulu saya bicara dahulu, sementara kartu tani belum keluar berdasarkan RDKK tetap bisa nebus pupuk subsidi, bisa walaupun karena kartunya belum selesai atau kartunya belum diinput jadi Dirjen menjelaskannya salah, yang punya kartu dapat kalau yang tidak punya berartikan tidak bisa begitu loh.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jadi kalau pikirannya Pak Dirjen dianggap pikirannya yang hari ini harus berjalan itu salah, Pak Dirjen itu membahas tahun depan atau bulan depan setelah ini selesai, tapi karena melihat rumitnya seperti ini kita punya perspektif baru setelah Pak Dirjen presentasikan, ternyata dengan menggunakan kartu tani ini akan menjadi masalah kerumitan teknis agar warga kita dapat akses terhadap pupuk, untuk sementara kita di Komisi IV bisa memberikan silahkan dengan kartu tani tapi mana penjelasannya, bagaimana teknisnya, lebih mudah atau lebih rumit? Kenapa yang lebih rumit dipakai kan hidup mah yang lebih mudah lebih enteng, kira-kira begitu.

Kalau melihat kondisi barusan dengan melihat kondisi masyarakat kita kayaknya akan lebih rumit Ibu Deputi maka coba dahulu diperkotaan yang segala akses infrastrukturnya ada, batasi dahulu demarkasi dahulu ini daerah A ini daerah B sebagai uji coba jangan dahulu dilempar ke Aceh nanti Pak Khalid ngamuk-ngamuk nanti, terima kasih.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Ketua sebentar.

Ini satu hal tadi pertanyaan ada orang punya kartu tani tapi belum bisa beli pupuk, ini persoalannya itu apa sebabnya tadi Pak Aas sudah memberikan pencerahan itu apa sebabnya supaya sebab ini bisa diberikan solusinya begitu Pak, coba Pak Aas mungkin Pak Ketua bisa Pak Aas ulangi lagi Pak tadi sudah agak nyantol begitu, lalu kemudian kabur lagi tadi.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY* (AAS ASIKIN IDAT):

Sudah jelas sekali tadi dari Pak Ketua menyampaikan bahwa kartu itu harus lengkap, untuk bisa membeli pupuk kartu itu harus lengkap yang pertama tadi Pak Ketua sampaikan harus ada uangnya dahulu didalamnya, kemudian yang kedua bahwa didalam kartu ini harus tertulis dia berhak tidak membeli pupuk dan ada alokasinya tidak ini juga harus ada didalam kartu tersebut, kalau ini tidak ada pasti akan ditolak karena kartu yang pertama kali dikeluarkan itu saat dikeluarkan kartu baru diinput oleh dinas dilengkapi.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Harusnya dilengkapi dahulu persyaratan baru dikeluarkan kartunya? Bukan kartu dikeluarkan tapi bodong begitu, kesel banget saya lihat penjelasan kayak begini.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pak Ketua bantu nih kalau situasi kayak begini ini pengalaman di Jawa Barat, Pak Dirjen, Pak Dirut Pupuk Indonesia, Himbara, pengalaman di Jawa Barat di Kabupaten saya di Majalengka petani kan harus berjalan menanam padi harus dipupuki, mereka menerima kartu tapi kartu ini tidak dipakai pupuk tetap dapat dia barang kontan, kecurigaan saya adalah jangan-jangan pupuknya tidak ada sehingga alasannya seolah-olah kartunya yang tidak memenuhi syarat karena pada hakekatnya memang betul sekarang sedang langka pupuk terutama SP36.

KETUA RAPAT:

Saya rasa pupuk ada dipabriknya Pak, Ibu mau menambahkan? Silahkan.

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Terima kasih Pak.

kami terkait dengan kartu tani jadi kartu tani ini memang sebenarnya percetakan oleh Himbara, kemudian karena kita sekarang sejak tahun 2015 yang lalu memang sudah ada pilot yang kita lakukan bagaimana mengisi edisinya, sinyal, sistem apa yang bisa kita lakukan itu kita sudah lakukan sejak 2015 setelah ada perintah dari Presiden untuk menggunakan kartu tani, jadi pilot itu kita lakukan yang pertama yang punya inisiatif respon cepat itu dari Gubernur Jawa Tengah dan kemudian pilot pertama yang dilakukan di Kabupaten Batang, dan kemudian waktu itu juga Lombok maksud saya NTB bersedia Pemda Provinsi karena memang inisiatif-inisiatif dari Pemda karena kaitannya utamanya terkait dengan RDKK, terkait dengan data petani dan lahan.

Waktu itu kita semangatnya juga sedang melakukan *one map policy*, mengidentifikasi kita mulai bekerja sama dengan BIG dan lain-lain mengidentifikasi perporsil perluasan lahan oleh petani, perporsil itu bukan hanya luas lahan tapi juga dengan mengidentifikasi petaninya, kemudian dalam jangka tersebut kita bekerja sama dengan Himbara kemudian mereka punya data petani siapa saja yang selama ini mendapatkan bantuan-bantuan, itu biasanya ada dari Himbara mereka punya data awal kemudian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi kita mendetailkan kembali mereka mendetailkan data-data itu dan inisiatif itu dari Pemda Jawa Tengah yang kemudian dilakukan 2016, 2017.

2016 perintah Presiden untuk diperluas waktu itu uji cobanya baru di 1 Kabupaten tapi memang besarnya kegiatan utamanya banyak keidentifikasi dan validasi data, jadi memang negara kita ini data itu masih sangat penting sekali dan itu kitakan Kementerian Pertanian.

KETUA RAPAT:

Ibu sebentar saya potong.

Ibu mungkin salah ngomong bukan data itu penting, data banyak yang tidak jelas.

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Iya itu pak.

Data kita masih banyak yang tidak cocok dan ini mencocokkan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Nyalahin siapa ini? Pemerintah juga mengatakan data tidak cocok mau nyalahin siapa?

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Kita tidak menyalahkan siapa tapi kita sekarang dalam proses memperbaikinya Pak, dengan memperbaiki dengan kartu tani harapan kita itu data bisa kita cocok akhirnya jumlah pertaninya dengan persilnya karena ini mencocokkan data tersebut itu butuh waktu dan tentu saja butuh kegiatan yang lebih detail dimasing-masing. Jadi itu Pak 2016-2017 kita lakukan validasi data yang baik dan memang inisiatif menggunakan kartu tani karena harapannya nanti kita akan selama inikan banyak bantuan fasilitasi untuk mendorong pengembangan petani kita, dengan ada data ini kita punya data yang lebih betul-betul yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai dukungan lain.

Jadi memang memperbaiki data ini Pak yang menjadi prioritas utama dikegiatan koordinasi yang kami lakukan dan memang kenyataanya data mungkin sudah siap balik lagi tadi ada proses kembali Pak yang mana kartu taninya sudah ada belum bisa digunakan karena input datanya itu bukan hanya petaninya, luas lahannya, tetapi juga jenis tanamannya hampir semuanya didata dengan detail dan harapan kita bisa menjadi (*one card*) 1 kartu untuk dukungan-dukungan lainnya, jadi yang sekarang kita lakukan bagaimana memperbaiki dan kita sudah melakukan *pilot-pilot* Pak diberbagai kabupaten termasuk di Lampung juga ada Pak, kerja sama Pemprov dengan Bank Lampung tapi juga masih dalam rangka memvalidasi data Pak karena kaitannya subsidi jadi memang kita mungkin teman-teman melakukan validasi yang lebih detail lagi.

Ini yang sekarang dan sehingga kalau ada bantuan sebagaimana data yang sebenarnya yang 5 juta itu sebenarnya datanya sudah ada didalam tapi balik lagi petani banyak yang belum paham tentang bagaimana menggunakannya, sehingga kalau belum memasukan uang untuk membeli pupuk bersubsidi memang belum bisa dimanfaatkan tetapi pupuk itu jalan terus Pak, kalau belum bisa menggunakan kartunya meskipun dia menggunakan kartu tapi petani belum mau itu tidak dipaksa mereka tetap bisa menggunakannya secara manual karena daftarnya sudah ada didistributor daftar RDKK yang memang berhak mendapatkan pupuk, jadi ini yang sebenarnya jadi kalau tadi ada kartu terus tidak dipakai karena mungkin petaninya itu lebih memilih untuk memakai bayar secara manual.

Meskipun ada di beberapa kabupaten itu memfasilitasi bahwa petani itu sudah si penyalurnya itu dia bersedia “saya yang memasukan uang kamu kesini nanti kamu bisa pakai” ada sebagian yang seperti itu sehingga ada beberapa lokasi realisasinya lebih besar karena ada inisiatif-inisiatif dari penyalurnya yang memfasilitasi petani untuk memasukan uangnya ditempat dia membeli, tetapi ada juga yang memang karena dia tidak mau ya dia tetap membeli secara manual, jadi sekarang masih 2 sistem Pak kita mendorong penggunaan kartu tani tapi manual petani-petani yang belum bisa atau belum punya kepercayaan menggunakan kartu tani mereka tetap menggunakan secara manual, daftarnya tetap ada sesuai dengan usulan RDKK yang dari Pemda dan kemudian dari Dirjen, demikian Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Saya hanya ingin tanya itu hasil *pilot project* bagaimana apakah lebih baik dari tahun lalu atau lebih kusut Ibu? Tapi butuh jujur jawabannya, bahwa ini diinput data susah karena banyak masyarakat kita menganggap tidak penting atas data, banyak data bodong dan kira-kira yang *pilot project* di Jawa Tengah tadi itu bagaimana mudah tidak petani mendapatkan pupuk dengan cara barusan, butuh jujur apa adanya Ibu.

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Kami jugakan Pak karena kami koordinasi kamikan dapat informasi dari teman-teman Pemda Kabupaten, kami selalu mengundang kabupaten-kabupaten yang punya realisasi penyaluran kartu tani ini yang cukup besar, misalnya Temanggung itu beberapa kali kita undang dan memang salah satu ininya mereka adalah karena mereka mewajibkan jadi mereka akhirnya bisa hampir semua menggunakan kartu tani yang sudah disebar luaskan, dan kemudian dilokasi lain ada permasalahan-permasalahan yang ini sedang kita siapkan Pak dimakalah saya sebenarnya ada beberapa permasalahan antara lain belum seluruh Pemda mengeluarkan regulasi pendukung terkait penggunaan kartu tani.

Belum adanya rencana kerja terinci hal-hal yang perlu dilakukan dalam pencapaian penggunaan kartu tani ini kita lakukan perbaikan-perbaikan,

kemudian petani masih enggan menggunakan kartu tani karena merasa sulit ini juga kita lakukan optimalisasi penyuluh dalam penggunaan data petani serta sosialisasi dan pelatihan kepada petani, kemudian belum semua pelayanan di KPL memahami penggunaan kartu tani atau IDC biasanya pemilik KPL saja yang paham, kemudian ada bank pelaksana yang berbeda maka sistem pelayanannya juga berbeda, kemudian berapa daerah terdapat *blank spot* keterbatasan sinyal dan keterbatasan listrik ini kita juga meningkatkan komunikasi dengan Menkominfo dan Pupuk Indonesia untuk mengatasi *blank spot* yang ada dan kita coba perbaiki.

Terkait yang diutamakan Jawa dan Madura Pak dalam rencana kita memang untuk sampai 2020 selama setahun ini kita fokus untuk Jawa dan Madura itupun belum 100% Pak masih 60% karena keterbatasan-keterbatasan, karena memang kita harus fokus lagi mengatasi permasalahan-permasalahan yang lebih utama, kemudian yang Aceh itu kalau tidak salah Sumatra kita rencanakan paling tidak 50% jadi termasuk Aceh itu juga tahun 2021, jadi selama itu belum kita dorong untuk menggunakannya secara full itu masih bisa menggunakan secara manual, jadi kalau ada RDKK itu menurut Kementerian Pertanian itu pasti akan mendapatkan pupuk dengan sistem manual.

Dengan sistem kartu tani itu yang kita dorong program yang kita harapkan kita bisa percepat supaya harapan kita dan kemudian banyak hal-hal manfaat yang kita bisa dapatkan dari menggunakan kartu tani, data yang lebih baik kemudian bantuan itu langsung ke petaninya yang dituju itu semuanya bisa terselenggara, itu Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan sebelah kiri Pimpinan.

Jadi Ibu kita sebagian besar disini itu bukan orang yang duduk dibelakang meja, kami berinteraksi dengan petani Ibu langsung kalau Ibu menyampaikan bisa dengan cara manual, di dapil saya Ibu Jawa Barat IV Kota dan Kabupaten Sukabumi mereka punya kartu tani mau beli dikiosnya tidak ada pupuknya itu yang terjadi dilapangan, sehingga kalau Ibu mengatakan bisa beli manual fakta dilapangan ini saya ngomong sendiri didapil saya tidak bicara dibelakang meja, perlu dicek didapil saya daerah Sukabumi saya pertemukan dengan kelompok taninya, itu yang pertama.

Pimpinan, usul kongkrit tadi ada *pilot project* kita akan kunspek kalau jadi Jumat sebaiknya kita salah satu di *pilot project* tadi disebut di NTB sama Jawa Tengah, mungkin kita agendakan usul Pimpinan Kunspek didaerah yang tadi *pilot project* kita lihat perjalanannya, terima kasih Pimpinan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pimpinan, jadi begini Ibu tidak semua pengecer itu sebaik hati Ibu yang Ibu bayangkan tadi seperti itu, ketika sudah punya kartu tani berarti dicadangkan pupuk untuk mereka yang mempunyai kartu tani, di NTB itu tadi ada 31.000 belum ada yang menggunakan satupun padahal Ibu sebut tadi

Gubernur saya meinisiasi itu satupun belum ada, itu pertanyaan saya tadi sementara pergerakan kartu ini terlalu cepat menurut saya Aceh baru 88, awal Desember Ibu dipresentasi oleh Pak Dirjen PSP NTB baru 19.000 kartu tani hari ini sudah 31.000, itu pertanyaan kita kenapa Ibu mengeluarkan kartu sementara barangnya belum bisa dipakai.

Bayangkan misalnya dia sudah dicadangkan terus pengecer itu tidak ditebus itulah yang dia simpan sebagai stock kemudian berubah status nanti pada tebusan berikutnya itu menjadi pupuk nonsubsidi, jadi itu Ibu dilapangan itu pupuk itu tidak dikasih kalau kita hanya mengambil pupuk subsidi harus dipaket baru dikasih sama pengecer, kalau dengan kartu tani tadi itu sudah dapat kartu 31.000 misalnya NTB terus menunggu untuk ditebus dengan secara manual padahal dia sudah ada kartu tani, nanti berubah status pupuknya itu dari subsidi menjadi nonsubsidi, terima kasih.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E):

Karena tadi Ibu Deputi menyinggung Jawa Tengah ya, apakah Jawa Tengah itu sukses Ibu? Atau Temanggung saja kemudian Ibu bilang Jawa Tengah? Karena jujur saja Ibu di Grobogan dapil saya, saya dapilnya Pati, Blora, Grobogan, Rembang, Grobogan saya waktu rapat ini saya koordinasi dengan kepala dinas begitu juga Pati, jadi pengguna kartu tani itu hanya 2% dan pati hanya 1%, saya tidak tahu ini kendalanya seperti apa kalau tadi Ibu bilang data sudah ada kemudian tidak dipakai petaninya sudah tahu, jadi yang saya pikir ini sosialisasinya seperti apa? kalau memang 2015 sampai sekarang masih verifikasi data terus kemudian fungsinya bagaimana?

Setahu saya kalau kartu sudah keluar atau anggap sajalah ATM ataupun yang kartu kesehatan KIS itukan datanya ada dahulu masa kartu sudah ada datanya belum ada, jadi saya tidak ngerti ini sistem sosialisasinya ini seperti apa dan apakah yang disosialisasi ini paham atau tidak sehingga penyampaian kemasyarakatan kok tidak mengerti sama sekali.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Kartu tani ini menurut saya baik untuk memastikan petani dapat pupuk kalau itu ada subsidi pupuk kecuali subsidi dihapus, kartu tani ini dijalankan saja yang penting jangan dahulu dijadikan secara mutlak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, karena kalau dijadikan syarat maka menjadi persoalan bagi petani biar berjalan keduanya Ibu dan Bapak, jalan kartu tani jalan juga yang manual yang menjadi persoalan petani kita bukan kartu taninya tapi yang menjadi persoalan kurangnya pupuk subsidi, itu yang menjadi pokok utamanya jika sekiranya pupuk subsidi cukup buat apa itu kartu tani pakai kartu debit saja selesai.

Jadi menurut saya Pak ini akan panjang terus diskusi kita lebih bagus kita sepakat jalankan saja terus keduanya jangan menjadi persyaratan dan lain sebagainya, terima kasih Ketua.

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Ketua satu lagi boleh?

Yang bikin saya penasaran atas data-data jadi kontra produktif sebetulnya data yang ada Jawa Tengah yang sudah sukses walaupun 10%, yang ingin saya tanyakan dari 8 Juta Bapak realisasi 98% itu disalurkanannya itu kemana daerah mana? Apa memang Jawa Tengah itu yang 10% nya sudah mempergunakan kartu tani, itu mohon penjelasan.

KETUA RAPAT:

Saya sampaikan kepada Ibu untuk nanti disampaikan ke rapat menko, kalau petani dia punya duit 1 juta dia masukan ke kartu tani tadi pada waktu dia mau nebus kekios di kios tidak ada pupuknya terus bagaimana? Dan yang nebus ini pasti umumnya Poktan atau Gapoktannya, karena sering dia datang “sayakan sudah kasih kamu duit Ketua Gapoktan duitnya katanya sudah kami setor ke Bank kok pupuknya tidak ada.” ini kendala juga sebetulnya inilah yang permasalahannya, nanti sampaikan waktu rapat Ibu hal ini tidak gampang ini sangat rumit sekali tidak semudah seperti kita jalan tol, jaman sekarang kita jalan tol semua punya kartu bahkan yang punya kartupun tidak punya saldonya minjam sama yang belakang.

Ini saja makan waktu panjang, coba Pak Dirjen lanjutkan apa yang mau dijelaskan.

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Saya menyampaikan bahwa di Permentan 1 tahun 2020 itu jelas di Bab 6 Pasal 17 ayat 2 bahwa “penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani.” Artinya yang kartu tani dapat mengakses silahkan kalau tidak mengakses secara manual Ibu secara biasa, jadi yang 98,7% itu ditebus ada yang menggunakan kartu tani ada yang tidak kebanyakan tidaknyakan begitu, kasus di Jawa Tengah waktu mau Pilpres itu ada mau demo disana karena tidak bisa tebus dengan manual akhirnya kami datang kesana boleh dengan manual akhirnya semuanya seperti itu.

Kemudian ada juga setiap gesek itu ada juga dipotong Rp 3.000,00 dari BRI, kami paginya mengupulkan seluruh Direktur Utama BRI, BNI, dan Bank Mandiri, akhirnya semuanya gratis tidak ada biaya administrasi apalagi ada pertanyaan Rp 50.000,00 itu tidak ada, jadi artinya begini Ibu mungkin masih bingung pupuk bersubsidi itu bisa secara manual bisa secara kartu tani.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Berarti ini baru *clear* penjelasan karena penjelasan Dirjen dan penjelasan Ibu Musdalifah sudah sedikit jelas bahwa kita sepakati yang

disampaikan apalagi yang di Permen bahwa dapat disebut dengan kartu tani, timbul pertanyaan apa plus minusnya ada kartu dan tidak ada kartu? Sebagaimana dijelaskan tadi tidak perlu dijelaskan lagi, yang jadi masalah bukan kartunya tapi pupuknya maka tadi saya mendiskusikan dengan Pak Mindo yang berpengalaman yang sudah sangat paham kenapa kita dorong dari distributor langsung ke Bumdes. Agar kenapa? karena ada permainan di sini ini ada permainan di pengecer ini. Jadi selama ini yang masalah bukan kartu Pak, yang bermasalah pupuk di mainkan. Ini mungkin menjadi perhatian kita bersama sehingga mungkin yang bisa di terapkan, di terapkan terus yang tidak bisa di terapkan di terus di laksanakan seperti biasa tugas kita hari ini bagaimana mengamankan pupuk untuk masyarakat.

Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik saya lanjutkan.

Kaitan dengan pertanyaan dari Anggota tadi yang selanjutnya itu alokasi Lampung itu kenapa lebih besar karena memang per tanggal 19 Desember 2019 itu RDKK yang masuk memang besar Pak, jadi yang besar ya besar, yang kecil ya kecil. Namun demikian, yang kecil tidak bukan berarti sebesar itu karena kita bergeser antar Provinsi antar Kabupaten antar Kecamatan dan kalau memang masih kurang itu masih ada peluang pasti di tutup oleh pupuk Indonesia karena nanti di ujung ada audit BPK dengan predikat kurang bayar Pak jadi jangan khawatir.

Kemudian selanjutnya dari kaitan dengan gas itu nanti domainnya Menteri Keuangan Pak Khalid tadi ada pertanyaan mungkin nanti akan di jelaskan juga sama Pak Aas. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya pikir sudah di apa namanya di jawab kemudian perlu uji lab saya pikir kalau nanti di perlukan ya setuju kami Pak.

Kemudian apa namanya subsidi pupuk di lepas itu pun perlu kajian apakah tidak memberatkan petani atau tidak memang sebetulnya kami juga sering ke daerah bahwa petani itu tidak mempermasalah apa namanya mahal tidaknya pupuk tapi keberadaannya ini nanti mungkin ini keberadaannya ada di apa namanya bisa di jelaskan dari Pak As nanti. Kemudian usulan RDKK selalu tinggi dari realisasi itu betul Pak sesuai data yang ada itu memang selalu tinggi dan hampir 2 kali itu ya karena memang luas tanam di RDKK itu mungkin berdasarkan luas lahan seperti tadi di sampaikan ada 22 juta hektar sedangkan luas tanam dari BPS itu 11,8 juta hektar dengan luas lahan baku sawah 7,4 juta hektar yang kita realis terakhir ini.

Kemudian perlu adanya validasi data LBS luas lahan baku sawah dengan RDKK ini pasti Pak harus ada validasi dan kaitan dengan penyuluh nanti pertanyaan dari Pak Hansi Lema nanti akan di jawab ke oleh Kepala badan SDM. Kemudian yang terakhir dari Pak Firdaus kaitan dengan RDKK

22 juta hektar luas kemudian luas tanam berdasarkan data dari BPS 11,8 dapat kami jelaskan bahwa tidak semua usulan RDKK itu kita penuhi tapi kita sesuaikan dengan alokasi pupuk yang di berikan oleh Pemerintah, sehingga kita menghitungnya tetap berdasarkan luas tanam yang di lakukan oleh petani berdasarkan luas lahan baku yang ada.

Mungkin itu Bapak Pimpinan sementara ada tambahan dari Dirjen Ketaahanan Pangan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya mau klarifikasi tadi anda mengatakan pupuk subsidi nanti yang menentukan penyalurannya Kabupaten.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Bukan begitu Pak, jadi apa namanya sesuai dengan ketentuan bahwa pusat itu

KETUA RAPAT:

Menetapkan kasih ke Provinsi, Provinsi kasih Kabupaten, Kabupaten ini menyalurkan.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Kabupaten itu menetapkan kuota atau....

KETUA RAPAT:

Menetapkan kuota berarti bukan berdasarkan permintaan kelompok.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Berdasarkan kelompok tentunya Pak kan berdasarkan RDKK Pak.

KETUA RAPAT:

Begini Pak, misalnya kecamatan A itu mintanya 1000, turunnya 500, yang menentukan pembagian 500 itu siapa.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Yang menentukan pembagian 500 itu harusnya kewenangan dari kepala dinas pertanian Kabupaten Pak

KETUA RAPAT:

Kepala dinas, jadi kalau saya tidak baik sama kepala dinas belum tentu dapat, dapatnya sedikit Pak ingat lho Kepala dinas bukan anak buah Menteri Pertanian loh harus jelas ini tidak bisa interferensi.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Karena yang mengatur ke bawah Desa kecamatan adalah kepala dinas Pak.

KETUA RAPAT:

Pengawasannya bagaimana

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Kita ada namanya KP3 (Komsu Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi yang keanggotanya itu ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari kepolisian dari dinas sendiri Pak. Mungkin dari KP3 ini yang selama ini belum efektif Pak, sehingga keluhannya apa tidak ada uang intensif sehingga di 2020 ini kita siapkan uang intensif untuk tim dari KP3 itu Pak.

KETUA RAPAT:

Karena setahu saya masalah pupuk ini tidak pernah ada yang sampai ke atas walaupun ada temuan-temuan tidak pernah ada sampai atas.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ketua sedikit Ketua.

Saya beda pendapat Pak dengan yang di bicarakan tadi terhadap kewenangan Kadis Kabupaten, Kadis Kabupaten ini menentukan berdasarkan jatah yang di beri jadi RDKK masuk katakanlah 20.000 Ton, itu Dinas Kabupaten tidak berhak menentukan bahwa 20.000 Ton di salurkan kepada distributor, dia berdasarkan dengan jatah yang di berikan oleh pusat bahwa kamu hanya dapat 5.000 Ton umpamanya baru dari situ di berikan kepada distributor kamu sekian, kamu sekian.

Saya kira demikian Ketua.

KETUA RAPAT:

Bukan maksud saya pertanyaan saya bukan begitu Pak, yang menentukan gapok ini tadi dapat berapa itu siapa.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Dinas Pak, Jadi volume Pak mohon izin Pak, petani menyusun RDKK di dampingi oleh penyuluh.

KETUA RAPAT:

Pak saya tanya satu lagi, apa setiap desa ada penyuluh

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Setiap desa tidak ada penyuluh tapi merupakan wilayah Pak, jadi satu penyuluh itu bisa memegang tiga empat desa Pak

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua Johan.

Itu SK penyaluran itu Bupati Pak Ketua. Saya tahu itu ketika terjadi apa terjadi kasus penjarahan truk pupuk subsidi di Bima itu kan kita bicara tentang kelangkaan setelah kita di jelaskan oleh Kepala dinas bahwa memang di Bima itu belum di keluarkan SK penyaluran dari Bupatinya. Jadi memang SK penyaluran itu di Bupati Pak Ketua.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Mohon izin

Dulu Bupati Pak, karena dulu sering terjadi keterlambatan sehingga diubah sekarang adalah cukup kepala dinas itu Permenpan, karena menunggu SK Bupati biasanya biasanya lama Pak, menunggu kajiannya di sana sehingga di turunkan menjadi SK Kepala dinas.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi untuk Pak Dirjen saya kira di jelaskan lebih jelas supaya teman-teman itu juga bisa mengerti alur pemikiran tadi kan saya sudah katakan dari awal perlu ada penyuluh lalu di tanya penyuluh itu di setiap desa ada atau tidak di tempat kita sudah hampir tidak ada lagi penyuluh karena rata-rata sudah pensiun kan itu, lalu siapa yang sosialisasi ke masyarakat yang sosialisasi ke masyarakat itu adalah penyuluh lewat gapoktan lalu gapoktan sosialisasi buat kelompok kelompok penyuluh dari kelompok penyuluh ini itu lalu berdasarkan luas lahan sesuai dengan rapat BKK lalu satu kelompok tani itu kira-kira berapa hektar dan mendapatkan pupuk berapa banyak setelah itu di kembalikan lagi ke gapoktan kalau tidak salah.... itu nanti soal lain, tapi

yang penting kunci itu adalah pengawasan yang bisa tahu bahwa benar-benar lahannya itu tepat atau tidak, kalau tidak ada asal masyarakat isi itu maka dia terjadi peningkatan setelah itu sampai di Kabupaten kalau tidak salah di (suara tidak jelas) dari situ ke kepala dinas Kabupaten seterusnya menyerahkan ke Provinsi dari provinsi ya ke contoh di Kabupaten Maluku tengah ajukan kurang lebih sekitar 1800 Ton karena luas lahan yang mau di tanam itu kurang lebih sekitar 6000 sekian hektar bahwa NPK itu 1 hektar kira-kira 300Kg kalau UREA itu 100-200Kg lalu yang menentukan siapa tadi pertanyaan oleh Pimpinan bahwa yang menentukan dinas Provinsi yang menentukan kalau Kabupaten yang menentukan dia tidak mau rugi kalau 1800 ya 1800 karena ada yang koreksi adalah dinas Provinsi maka tadi yang di harapkan 1800 turunnya 1200 permintaannya 1800 turunnya 1200 itu maka di anggap kelangkaan karena apa kebutuhan dengan yang di ACC kan dia tidak berimbang lalu apa yang di dilaksanakan di sana prosesnya seperti apa lalu di sana yang tadinya NPK 300Kg per hektar hanya di jadikan kurang lebih 200Kg/hektar apa di katakan oleh Dirjen bahwa ada sekitar 70% dari itu, itu maka masyarakat di sana bisa mendapatkan itu kalau ini di jelaskan lebih awal itu maka kita semua paham.

Setelah itu sampai dengan kartu tani kartu tani juga problem tadi saya tanya kepala dinas berapa sih kartu tani katanya menurut apa ya itu kurang lebih sekitar 4000 sekian mau di bagikan Februari saya tanya.... di gunakan tapi kita tidak tahu seperti apa karena di Kecamatan Seti dan Kobi itu ada 2 bank, 2 bank berarti juga ada 2 ATM lalu bagaimana caranya agak sulit caranya agak sulit masyarakat tinggal di plosok caranya bagaimana itu dia bisa mendapatkan itu , proses yang ada sekarang distributor ke pengedar ke pengecer lalu pengecer bawa ke petani-petani yang membutuhkan pupuk itu prosesnya kalau demikian itu maka kartu tani ini memang masih agak sulit tidak tahu berapa lama lagi tapi kunci di programkan karena ini semuanya sudah bagus ya cuma tinggal pengawasannya lalu habis itu manfaatnya kapan di gunakan sehingga jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan sudah ada kartu tani tapi masyarakat tidak mengerti, saya coba tanya masyarakat mengerti tidak masyarakat belum paham soal kartu tani bahkan menjadi kelompok tani saja mereka tidak paham karena apa kita kurang sosialisasi.

Makanya tadi usulan saya yang pertama tolong di perhatikan penyuluh apakah penyuluh nanti kerja sama dengan kepala desa itu terserah karena ini basic data yang kita dapat, kalau yang di bawah sudah *heng* maka di atas sudah heng semua ya ini Pak Dirjen saya tidak terlalu ini tapi saya juga mantan dari sana juga tapi ini minimal bisa di pahami supaya kita juga bisa tahu alur kita tahu alur kita tahu sasaran bahwa RDKK berapa itu itu juga kalau jelas itu berarti dapat menentukan berapa luas lahan yang ada pada masyarakat sedikit lagi Pak.

Jadi mungkin itu saja untuk Pak Dirjen maupun yang lain-lain mudah-mudahan ini menjadi perhatian agar tidak terjadi kelangkaan pupuk karena ini kan memang berbeda setiap Kabupaten setiap wilayah berbeda kalau kita sudah berjalan seperti biasa tapi yang penting saya katakan tadi bahwa kalau dari dari RDKK permintaannya sekian lalu Pemerintah tidak menyetujui 100%

itu maka terjadi kelangkaan untuk itu kalau semuanya berjalan bagus saya kira keuangan Pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Saya kira itu sementara Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Haerudin mau menambahkan singkat.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Ini aspirasi Ketua terima kasih.

Pak Dirjen ini aspirasi di Jawa Barat teman-teman dari pelaku distribusi itu mereka mengeluh kalau SKnya di Gubernur karena jangkauan ritmenya jauh tidak membayangkan yang Kabupaten Bandung membayangkan yang Pangandaran. Jadi harus ke Bandung begitu lama waktu prosesnya ini mereka minta efektif minta di Kabupaten masing-masing proses SK-nya dan proses pengangkatan atau kontrak dari teman-teman dengan Pemerintah setempat.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Tadi masalah penyuluh siapa mau menjelaskan.

Jadi begini, saya tambahkan sedikit hari ini tanya coba penyuluh saya mau bayar asuransi tani bagaimana sih sebagian masih banyak tidak tahu mau bayar dinas pun petugas dinas kadang-kadang juga tidak tahu cobalah di periksa tolong di jelaskan tadi.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI
NURSYAMSI, M.Agr.):**

Baik Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati yang kami muliakan Pimpinan Komsis IV DPR RI dan seluruh Anggota Komsis IV DPR RI.

Ada beberapa pertanyaan tadi terkait dengan penyuluh utamanya dari Bapak Fransiskus Lema, kemudian Pak Abdullah dan Ibu Ema. Pertanyaannya terkait dengan kuantitas penyuluh kualitas kemudian sarana dan BOP.

Bapak Ibu sekalian, sebetulnya untuk semua *item* yang saya sebutkan tadi tahun-tahun dulu ada tetapi memang sangat terbatas. *Insyallah* tahun ini 2020 kalau DPR sudah menyetujui alokasi anggaran kita ada peningkatan yang sangat signifikan untuk BPPP dan penyuluh Pak Pimpinan. Jadi untuk misalnya untuk kualitas di 2020 memang kami sudah mengalokasikan anggaran dan kegiatannya untuk pelatihan penyuluh ya melalui yang kita sebut sebagai *agri war room*. Nanti akan terkoneksi, akan terhubung ke seluruh konstra tani 2019.

KETUA RAPAT

Kontra tani ini apa? saya masih agak bingung. Jangan peristiwa yang lalu, karena saya ada indikasi peristiwa yang lalu mau di ulang lagi ini, cuma judulnya saja beda ini. Kami ini Anggota Komsis DPR RI bukannya tidak paham, sangat paham sekali itu coba jelaskan konstra tani itu apa.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Baik Pak, jadi kalau kontra tani itu adalah kepanjangan dari komando strategis pembangunan pertanian tingkat kecamatan nah di Kabupaten kota itu ada yang namanya kontrada tani Pak. Jadi kontra tani itu prinsipnya adalah rekapitalisasi BPP baik fisiknya maupun penyuluhnya.

KETUA RAPAT:

Memang kenapa harus di kasih nama konstra tani supaya kelihatan hebat komando begitu, tidak ini mau saya bawa ke rapat kerja ini masalah ini.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua.

Saya kemarin salah satu Reses saya Pak di kantor BPP di Kabupaten Donpu. Saya menjelaskan tentang istilah konstra tani ini dan mereka saya tanya mengerti tidak kontra tani ini, "saya baru mendengar dari Pak Johan" katanya. Itu di kantor BPPP Pak, bukan di tempat lain saya rasa di kantor BPPP. Ini betul Pak Ketua, jangan gagah-gagahan begini kalau kita di bawah tidak mengerti tentang kebutuhan penyuluh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya takutnya nanti konstra tani di Kecamatan pakai tongkat komando pakai baret pula nanti iya itu akan begitu nampaknya nanti saya sendiri masih tidak paham jadi sampaikan kalau konsep belum jelas jangan di lemparkan begitu lho nanti masih banyak permasalahan dengan Kementerian Pertanian nanti waktu rapat kerja saya sudah siapkan data semuanya.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI
NURSYAMSI, M.Agr.):**

Terima kasih Pak.

Jadi kegiatannya adalah pelatihan baik untuk penyuluh maupun untuk petani nah kemudian terkait dengan kuantitas saya kira betul apa yang di katakan oleh para Anggota Komsis IV ini bahwa masih jauh dari ideal satu desa satu penyuluh jadi saat ini penyuluh PNS kita kurang lebih 31.500 kemudian THL kurang lebih 12.635 jadi totalnya PNS dan THL itu ada sekitar 43.000 padahal desa kita yang berpotensi untuk pertanian itu lebih dari 60.000 desa jadi memang masih relatif jauh dari kuantitas nah oleh karena itu Bapak Menteri pertanian sudah mengusulkan untuk formasi penyuluh baru ya jadi yang kita usulkan 6000 formasi 6000 penyuluh per tahun jadi selama 5 tahun ada kurang lebih tambahan 30.000 kalau di penuhi ya, nah itu totalnya akan mendekati penyuluh 1 desa 1 penyuluh.

Nah, kemudian juga untuk THL TBPP Bapak Menteri pertanian juga sudah berkunjung ke Menpan RB membicarakan masalah THL yang sudah lulus tes ada sekitar 9500 THL TBPPP yang sudah lulus tes tapi sampai saat ini belum di angkat sebagai ASN P3K itu yang di bicarakan kendalanya sampai saat ini Perpres mengenai ASN P3K, baik jenis pekerjaannya karena bukan hanya penyuluh ASN P3K itu ada juga guru ada juga perawat sampai saat ini belum realis belum realis jadi nanti kalau perpres terkait dengan ASN P3K ini realis itu kepala daerah Bupati Wali Kota langsung bisa menetapkan SK pengangkatan penyuluh sebagai ASN P3K itu yang sudah di laksanakan oleh Bapak Menteri pertanian terkait penyuluh selain itu kami dorong juga untuk lahirnya para penyuluh swadaya dan *alhamdulillah* sampai saat ini ya perkembangan peningkatan penyuluh swadaya saya kira sangat baik ya ada sampai saat ini kurang lebih 20.000 orang penyuluh swadaya dan ini sangat untuk mendorong pembangunan pertanian terutama yang ada di daerah.

Nah, kemudian terkait dengan sarana jadi mulai tahun ini ada peningkatan yang sangat signifikan untuk sarana BPP utamanya BPP yang kantornya rusak itu ada renovasi kemudian juga BPP itu di lengkapi dengan sarana IT Pak Pimpinan tahun 2019 lalu kami sudah lakukan 400 BPP yang sudah di lengkapi sarana IT sebagai sarana Komunikasi termasuk sarana pelatihan dan sebagainya.

2020 kami merencanakan kurang lebih 3050 BPP itu juga akan di lengkapi sarana prasarannya untuk sarana komunikasi penyuluh ya dengan pelatih ya juga para penyuluh yang ada di Provinsi maupun yang ada di pusat, selain itu secara selektif Pak Pimpinan kami juga mengalokasikan anggaran untuk roda 2 untuk roda 2 tapi memang ini sangat selektif sama selektifnya dengan renov bangunan BPPP dan ini tentu saja kerja sama dengan Kabupaten Kota biasanya kita saling melengkapi Pak Pimpinan kalau misalnya BPP itu *mengcover* perbaikan kantor BPP nah Kemenpan biasanya roda 2 jadi tergantung apa namanya alokasi APBD kabupaten kota.

Terkait dengan BOP ya ada tambahan sekitar Rp5.400.000/BPP per tahun di bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ya nah BOP ini utamanya untuk keperluan sehari-hari ya BPP seperti ATK kemudian uang pendampingan dan lain sebagainya, jadi saya kira itu nah selain itu juga ada biaya operasional yang terkait dengan sarana IT Pak Pimpinan dan ini jumlahnya relatif agak besar karena ada beberapa sarana IT kita yang memerlukan misalnya internet dan lain sebagainya nah itu biayanya agak besar jadi yang selain Rp5.400.000 juga ada apa namanya BOP untuk sarana IT kemudian juga untuk demplot Pak Pimpinan.

Jadi saya kira itu yang di tanyakan oleh Ibu Endang tadi terkait dengan petani yang posisinya di *remote* area saya pikir ini memang jadi perhatian kita semua nah terkait dengan subsidi pupuk ini saya pikir yang manual masih di perlukan ya untuk daerah-daerah *remote* area selain itu barang kali memang kita perlu perhatian agak khusus ini untuk para petani yang berada di *remote* area.

Saya kira itu Pak Pimpinan dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saudara Kepala Badan SDM, anda tahu berapa banyak BPP kantornya yang rusak? Hampir se-Lampung itu rusak. Tadi anda ngomong indah banget kelihatannya, memperbaiki, kasih IT, kasih ini jangan omong kosong lah Pak. 5 tahun yang nama Momon Sekjen itu jadi SDM pun tidak ada yang di lakukan. Penyuluh ya penyuluh tetap saja hidupnya susah, jadi jangan yang indah-indah di sampaikan di sini. Orang anggarannya saja belum di bahas kok, apa sudah di bahas anggarannya? kan belum. Indah sekali, nanti berbagi dengan Pemda Kabupaten, Pemda Kabupaten berbisik, "memang *gue* punya, bukan *gue* punya, *gue* tidak ada urusan". Jadi jangan yang indah-indah lah di sampaikan di sini. Kami ini orang lapangan Pak, Sekjen Kementan itu SDM sekian tahun itu, tidak ada yang di lakukan, apa yang di lakukan.

Saya kadang kalau melihat kantor BPP geli sekali melihatnya. Pemerintah Pusat tidak perhatian, Pemerintah Daerah tidak perhatian, karena di anggapnya apa. Apa mungkin, saya tanya sama anda kantor BPP di biayai oleh APBD? tidak mungkin, secara nomenklatur tidak bisa, karena itu aset negara bukan aset Kabupaten, bukan aset Provinsi. Sebaliknya Provinsi Lampung membangun kantor Gubernur yang baru. Bisa minta dana APBN? tidak bisa, karena apa itu aset Pemerintah Daerah. Jadi saya mendengar anda tadi lucu sekali saya mendengarnya.

Bisa tidak Pak, Bapak mantan Bupati bisa tidak? tidak bisa, ya sudah saya nanti emosi lagi. Jangan yang indah-indahlah kita ngomong kenyataannya saja. Orang aset Pemerintah Pusat kok Kabupaten yang memperbaiki. Jalan yang selubang segede-gede apa kalau jalan negara yang namanya Bupati suruh menguruk sedikit saja tidak mau, karena apa? ya

bukan jalan *gue* itu jalan negara, apalagi tadi Pak kantor BPP, sudah Pak. Sekarang siapa mau menjelaskan lagi kepada Dirjen PSP. Dari Holding.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI
NURSYAMSI, M.Agr.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan

Mungkin nanti untuk menjawab secara teknis yang ada di lapangan nanti kita di bantukan di sini para Dirut semua hadir Pak di sini. kepada dirut terus tadi juga Pak Pimpinan menyampaikan kira-kira apa yang mau di sampaikan di lapangan bisa di sampaikan.

KETUA RAPAT:

Silakan dari mana dulu, seluruhn Dirut harus ngomong menyampaikan permasalahan-permasalahan dilapangan. Kita cari solusi jalan keluar yang terbaik untuk Pemerintah. Itu saja silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan sebentar Pimpinan

Hanya memperdalam tadi soal PPL Pak, PLL tadi kalau tidak salah akan merekrut baru bukan, memperdayakan yang lama atau merekrut yang baru minta dijelaskan.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI
NURSYAMSI, M.Agr.):**

Mohon izin Pimpinan pertama adalah mendorong lahirnya penyuluh swadaya Pak itu yang sudah dan sedang kita lakukan kemudian yang kedua Pak Menteri pertanian sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk formasi penyuluh baru tapi sampai sekarang ini belum ada jawaban saya kira itu terima kasih, bulan Desember Pak baru sebulan yang lalu. Untuk yang lama itukan ada yang statusnya ASN ada yang THL. Nah, yang THL ini sebetulnya sudah di proses untuk menjadi ASN P3K. Nah, sudah sampai lulus tes kemudian sudah di proses ke BAKN dan Kemenpan RB namun demikian sampai saat ini belum realis SK-nya karena perpres mengenai ASN P3K belum terbit jadi nanti kalau perpres tentang ASN P3K itu terbit itu kepala daerah akan segera menetapkan SK pengangkatan THL TBPP menjadi ASN P3K.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Penggajiannya dari APBN atau dibebankan kepada daerah?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (PROF. (R). Dr. Ir. DEDI
NURSYAMSI, M.AGR.):**

Dari APBN.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua tadi pertanyaan saya tentang PMT itu belum di jelaskan karena sekarang kan PMT ini lagi di berdayakan untuk pendampingan KUR. Inikan tenaga-tenaga begini kan dari pada kita merekrut baru kenapa bukan ini yang kemudian kita berdayakan, misalnya membantu petani dalam pengurusan kartu tani, apalagi kalau di BPP itukan ada klinik pemberdayaan segala macam. Nah, ini PMT ini sudah 3 tahun tidak di kontrak ini Pak Ketua, tapi tetap di berdayakan begitu tapi tidak di kontrak itu seingat saya dulu pernah menjadi kesimpulan rapat kita ketika dengan Dirjen. Nah, ini coba di jelaskan bagaimana posisi PMT ini biar kita jelas.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI
NURSYAMSI, M.Agr.):**

Mohon izin Pak Pimpinan, saya pikir masukannya sangat bagus Pak, nanti kita akan bahas Pak, itu. Jadi karena memang...

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Dulu jawabannya juga begitu Pak, dulu jawabannya juga begitu akan dibahas. Bapak mau bahas sama siapa.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI
NURSYAMSI, M.Agr.):**

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, cukup Pak Johan.

Coba sekarang dari pupuk, silakan menyampaikan, Pak Aas yang pandu dari siapa-siapa.

**DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY* (AAS
ASIKIN IDAT):**

Sebelum kalau ada teman-teman ada yang mau di sampaikan. kami akan tadi ada beberapa pertanyaan, sebenarnya sudah lengkap di jawab pertanian. Ini yang pertama di lapangan, di ... masih memberikan Pupuk bagi petani yang mempunyai sawah lebih dari 2 hektar. Nah, prinsip Pak, kami itu

menyalurkan itu berdasarkan RDKK, dimana RDKK itu sudah melakukan implementasi mengenai petaninya, luasan dan lain-lain, dan para distributor atau para pengecer ini tidak mempunyai hak untuk melakukan validasi. Jadi yang dibesarkan kepada RDKK Pak, jadi kami tidak mengetahui ini mempunyai 2 hektar atau tidak. Ini yang berkaitan dengan hal ini.

Terus yang berkaitan dengan masalah mutu Pak, mutu dari pada pupuknya sendiri. Jadi pupuk bersubsidi ini diatur dalam Permentan dan tertuang dalam kontrak PI dengan Kementan. Dalam ketentuan ini dilakukan uji mutu baik di Lab internal dan di Lab di Balitan Pak, ini dilakukan pemeriksaan dan hasilnya diajukan ajuan sebagai pembayaran subsidi. Ini khususnya untuk uji mutu NPK dan organik, ini dilakukan secara bulanan. Dan untuk urea ini dilakukan oleh internal berdasarkan sertifikasi, biasanya dari Sucofindo yang melakukan. Tapi tadi masukan dari Bapak Haerudin sangat bagus Pak, ini di lapangan masih ada yang mutunya kurang baik, apakah itu penyimpanan atau gudangnya tadi Pak Haerudin juga sudah melakukan pengecekan di lapangan, ini menjadi perhatian buat kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di lapangannya Pak.

Yang lain tadi, ini khusus yang di Indonesia Timur, ini mempertanyakan kenapa hanya dilakukan pengantongan dan penelusuran dilakukan di Sulawesi Selatan? Apakah cukup atau tidak untuk mengondisikan di Indonesia Timur? Jadi, Makasar itu hanya sebagian Pak, jadi pengasar itu untuk di Sulawesi Selatan saja, mungkin juga Bapak Pimpinan pernah melihat di lapangan itu, jadi bukan itu Pak untuk ..., tapi kita punya juga gudang-gudang yang dikirimnya tidak dalam bentuk curah tapi langsung, ini langsung dari Bontang Pak dikirim, ini ada di Palu, ini untuk Sulawesi Tengah, juga ada di Bitung itu ada di Sulawesi Utara, juga dari Kendari untuk Sulawesi Tenggara, juga dari Mamuju untuk Sulawesi Barat, dan di Gorontalo untuk Gorontalo. Jadi bukan satu Pak, kita ada tujuh gudang untuk melayani daerah tersebut, jadi bukan satu saja yang seperti Pak Ketua pernah lihat Pak.

Yang lain tadi disampaikan, PI (Pupuk Indonesia) menyiapkan pupuk non subsidi di kios-kios atau di distributor. Nah, ini tadi disampaikan seperti yang tidak ikhlas dan ingin menjual pupuk yang mahal. Bukan demikian Pak, nah sekarang ini kan seperti yang kita ketahui banyak Petani juga yang belum masuk ke dalam RDKK, termasuk juga pembeli-pembeli yang tidak bisa dilayani oleh kios, kalau Petani yang tidak masuk dalam RDKK dan kios, dan juga dengan adanya sekarang seperti yang tadi disampaikan adanya penurunan alokasi pupuk yang bisa juga berdampak kepada kekurangan pupuk, sambil menunggu relokasi, tapi ini dibutuhkan dengan segera, kami menyediakan ada pupuk non subsidi, seandainya kalau petani betul-betul butuh. Daripada mereka tidak sanggup beli, ya kita tawarkan yang non subsidi, tapi kami tidak paksakan, hanya ada kami siap, karena kalau tidak ada berarti mereka betul-betul tidak bisa tanam. Jadi kami siapkan itu adalah untuk petani-petani yang tidak ada di dalam RDKK, jadi kami siapkan yang non-subsidi Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Mohon maaf Pak Ketua, masuk Pak Ketua.

Ini faktanya di lapangan itu pengecer mewajibkan mengambil paket. Jadi Petani datang untuk mengurus RDKK-nya itu tidak akan dikasih pupuk subsidi Pak, kalau dia tidak mengambil paket yang juga non subsidi.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY* (AAS ASIKIN IDAT):

Kalau ada yang seperti itu kami minta daftar Pak, karena kami tidak perkenankan yang demikian dari Pupuk Indonesia.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pertama mungkin saya tanya Pak Ketua.
Apa spesifikasi.

KETUA RAPAT:

Johan mungkin paketnya ini loh Pak Saudara Dirut, belu urea wajib beli ini, beli ini, gitu mungkin. Begitu kan faktanya, bukan wajib membeli non subsidi.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY* (AAS ASIKIN IDAT):

Dia wajib mengambil yang non subsidi Pak Ketua.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Di Kecamatan Empang Sumbawa, silakan turun Pak.

KETUA RAPAT:

Biasanya kalau beli Urea harus beli MPK, beli apa gitu.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY* (AAS ASIKIN IDAT):

Saya minta ditindak, nanti saya akan minta kepada penanggungjawab disini.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Kalau turun lapangan akan saya temani.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (AAS ASIKIN IDAT):

Iya Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Jadi maksud saya begini, ada tidak spesifikasi kios itu, misalnya ada branding tidak khusus kios itu, biar orang tahu dimana, siapa pengecer di kampung itu. Biar kita jelas tahu dimana pengecer resmi dan mana yang abal-abal gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya merah biru kan ada merk tertentu, ada tidak *Branding* dari...

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (AAS ASIKIN IDAT):

Ada Pak, pupuk pengecer ini dan mereka juga pasti ada, harus memegang adanya surat izin dan surat perjanjian semacam penunjukannya ada itu Pak, bisa diminta. Terus tadi juga dilihat kenapa bisa terjadi adanya Piutang subsidi Pak, atau kurang bayar? Kalau buat kami itu Piutang subsidi. Nah, ini dampak dari proses, untuk menetapkan HPP atau jumlah subsidi yang akan dihitung itu didasarkan hasil audit setahun atau 2 tahun yang ke belakang Pak, dasarnya itu. Nah, padahal kan kalau kita sudah masuk kepada tahun yang baru itu akan terjadi kenaikan-kenaikan, khususnya adalah kenaikan dari Kurs Pak, pasti Kurs Dollar akan terjadi kenaikan.

Terus yang keduanya harga gas Pak, itu juga naik Pak, gas itu menduduki 70% dari total *cost*. Nah, karena yang belakang itu belum menunjukkan kenaikan, sebenarnya begitu dihitung itu ada kursnya yang tidak naik, dan ada juga harga gasnya juga yang naik, termasuk import yang dari luar, ... itu juga kenaikan, sehingga begitu BPK melakukan audit ini ada kekurangan begitu.

Terus yang lain, ini yang lalu itu ada istilah Ukon Pak, untuk penjualan di minggu ketiga dan keempat di Bulan Desember. Nah, sekarang itu tidak ada Pak, jadi yang bulan tiga dan bulan empat itu masuk ke piutang Pak, karena tidak ada masuk Jadi itu yang menjadikan subsidi yang masih terhutang. Juga adanya beberapa penambahan Pak, adanya penambahan dari pupuknya sendiri, karena kekurangan itu tidak diperhitungkan, itu juga menjadi subsidi. Ini yang menjadikan kenapa terjadi adanya kurang bayar atau piutang Pak.

Masalah SP 36, kalau tidak salah ini yang tadi ditanyakan di daerah Jawa Bara. Ini sebenarnya stok itu kita sudah hampir 3 kali dari ketentuan yang ditetapkan di daerah itu. Nah, yang menjadi masalah terjadi kelangkaan itu karena kan adanya pengurangan jumlah Pak, alokasi jumlah, sehingga kemungkinan adalah petani yang tidak daftar atau Petani yang berkurang menjadi perolehan dari pupuknya. Itu yang menjadikan kenapa petani tidak bisa beli sesuai dengan yang dibutuhkan, toh sama sekali tidak beli Pak.

Mungkin itu Pak, yang lainnya mungkin teman-teman dari pupuk kalau ada yang belum disampaikan.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, ingin saya tanyakan anda masih percaya sama Sucofindo?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (AAS ASIKIN IDAT):

Sementara ini kami menggunakan.

KETUA RAPAT:

Kalau saya tidak percaya, begitu saja. Supaya jelas, nanti juga saya ngomong sama Media saya tidak percaya. Pak Budi percaya Pimpinan? Sangat tidak.

Ya, silakan.

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Iya, silahkan ini semua ada Pak lengkap disini, ini Pak Bakir.

KETUA RAPAT:

Pak Bakir sebutkan nama dan dari PT apa supaya teman-teman yang Anggota baru tahu.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK KALTIM (BAKIR PASAMAN):

Yang terhormat Bapak Pimpinan, beserta seluruh Anggota DPR yang kami hormati,
Para hadirin yang kami hormati.

Saya Bakir dari Pupuk Kaltim. Baiklah Pak, kami hanya *concern* sedikit saja mengenai penurunan alokasi Pupuk Pak, bahwa tahun 2019 itukan ada penurunan alokasi untuk subsidi sekitar 600.000 Ton dari 9,55 juta ton menjadi 8,9 juta ton. Kemudian juga tahun ini menjadi 7,9 juta ton untuk alokasi subsidi. Namun demikian, kami dari Pupuk Kaltim artinya tentunya mengantisipasi ini seandainya nanti ada isu kelangkaan ataupun apa, itu yang kami gantikan dengan penyiapan pupuk non subsidi Pak. Kami kemngisi kios-kios, kami mempunyai 10.000 kios dan saat ini pupuk non subsidi itu kami sebarkan juga selain di gudang-gudang di lini 2 dan lini 3, di kios sesuai dengan instruksi dari Pupuk Indonesia, kami meletakkan 500 kg non subsidi di kios sebagai antisipasi itu.

Jadi ini hanya penyampaian informasi saja Pak.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Supaya teman-teman tahu bahwa setiap kios pun menyiapkan pupuk non subsidi.

Lanjut.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (MULYONO PRAWIRO):

Terima kasih.

Yang kami hormati Bapak Ketua,
Para Bapak-Bapak yang kami hormati Anggota DPR,
Dan juga yang hadir di malam ini.

Saya Mulyono Prawiro dari Pusri Pak. Jadi kami ditugasi oleh Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di daerah Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dan sebagian di Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.

Beberapa hal yang kami ingin utarakan bahwa memang pada tahun 2020 ini ada pengurangan alokasi untuk pupuk PSO, yang ini juga merata di daerah-daerah pemasaran Pupuk Sriwijaya dan ini sudah kami antisipasi juga sesuai dengan instruksi dari Pupuk Indonesia bahwa di setiap pengecer sampai ke paling bawah di lini 4 agar di stok juga pupuk non-subsidi atau Komersial, yaitu besarnya rata-rata sekitar 500 Kg – 300 Kg. Dan beberapa di Jawa Tengah memang ada beberapa *complain* seperti tidak mendapatkan jatah pupuk di beberapa daerah atau desa. Setelah di periksa secara langsung ternyata memang ERDKK-nya belum terbit dari Bupati-Bupati, dari Kabupaten tersebut, sehingga setelah di jembatani oleh kita semua dan juga Kepala Dinas di masing-masing daerah yang *complain* tersebut sudah bisa diatasi Pak, dan kita melakukan pendistribusian secara manual, jadi paralel, boleh melakukan penebusan dengan kartu tani maupun secara manual dengan ERDKK. Itu yang sesuai dengan instruksi Bapak Dirjen yang kita aplikasikan ke lapangan.

Dan beberapa ini sekarang di daerah Jawa Tengah alokasi bulan Januari sudah mulai habis, dan itu sesuai dengan prosedur bahwa bisa ditarik Bulan berikutnya seperti bulan Februari ditarik ke bulan Januari, nanti diperhitungkan Bulan-Bulan berikutnya, sehingga alokasi maksimum 1 tahun itu tidak terlampaui.

Saya kira begitu Pak, terima kasih dari kami.

KETUA RAPAT:

Terima kasih penjelasannya.

Selanjutnya.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK ISKANDAR MUDA (HUSNI AHMAD ZAKI):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Para Anggota Dewan yang saya hormati,
Bapak-Bapak Eselon I dari Departemen Pertanian.

Saya Husni Ahmadzaki dari Pupuk Iskandar Muda Pak.

Seperti tadi di awal agenda bahwa ada permasalahan di Bulan November dan Desember 2019 dikatakan bahwa PIM berhenti beroperasi itu betul Pak, yang Bulan November itu memang ada permasalahan di blok A, kami sudah punya kontrak di blok A dari Pertamina yang sekarang menguasai seluruh lahan yang ada di Aceh untuk gas, namun sampai saat ini kontraknya belum final Pak, jadi masih ada perubahan yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Khalid, harganya memang dulu 9,7 waktu kami berkontrak 2015, sekarang oleh Pemerintah kebijakan dari Dirjen Migas diturunkan menjadi 7,08 di *Plaingate* Pak, nah itu kalau ada permasalahan kami terpaksa harus mengambil dari PHE yang bekas Exxon dan dicampur dengan LNG karena yang PH nya sendiri sudah mulai bermasalah dari sisi kemampuan untuk *Mensupply* gas, memang sudah tua-tua Pak alatnya. Nah, itu yang menyebabkan di akhir November kami sempat beroperasi 2 Minggu dan kemudian di akhir Desember itu lebih, di tahun 2019 kami alokasi subsidi jauh berkurang dari 380.000 di tahun 2018 menjadi 221.000, itu juga yang menyebabkan terjadi kelangkaan, kami itu memasok Urea subsidi untuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jambi, yang banyak penurunan itu adalah di Aceh, Sumut dan Sumatera Barat, sehingga di akhir Desember tadi juga teman-teman menyampaikan memang sudah habis alokasinya, jadi kami tidak bisa menyalurkan lagi karena memang alokasinya berkurang banyak.

Di tahun 2020 ini alokasi sudah membaik, hanya yang di Sumatera Utara turun dari 160.000 menjadi 90.000, ini juga menjadi potensi nanti akan menjadi mungkin *Complain* atau kekurangan pasokan, karena kami hanya bisa memenuhi pasokan kalau 90.000 itu mungkin sampai Bulan Agustus saja Pak, kurang lebih seperti itu. Sementara tadi kontraknya juga masih belum final, mudah-mudahan sudah selesai sehingga tadi pasokan bisa terjamin dengan *volume* dan harga yang maupun tidak murah, tapi paling tidak bisa menjamin keberlangsungan usaha dari PT. Pupuk Iskandar Muda ke depannya.

Begitu Pak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Complicated juga ya masalah PIM ini ya, mau produksi gasnya mahal, sekiranya harga murah sedikit gasnya kosong, itu pakai LNG apa, pakai LNG ya.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK ISKANDAR MUDA (HUSNI AHMAD ZAKI):

Tidak, gasnya ada gas alam harusnya, sekarang diganti oleh gas alam plus LNG, karena yang gas alamnya dari PHE sudah turun Pak, harusnya 54 kebutuhan kami per hari, sekarang hanya dapat sekitar 28-30, sehingga yang sisanya kami beli dengan gas spot yang harganya sampai 10 Dolar saat ini, sehingga gas rata-rata kami itu ada di kisaran 8 Dolar saat ini, paling mahal diantara produksi pupuk yang lain Pak. Terpaksa, karena yang blok Atau-nya kemarin kena longsor.

KETUA RAPAT:

Tapi terpaksa tidak rugi kan?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK ISKANDAR MUDA (HUSNI AHMAD ZAKI):

Masih dengan konsep skema saat ini masih bisa bertahan Pak, kami kan hanya bisa jual ke subsidi saja tidak bisa jual ke komersil.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Selanjutnya.

DIREKTUR UTAMA PETROKIMIA GRESIK (RACHMAD PRIBADI):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Mulia Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,
Dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Jadi kami Rahmat Pribadi dari Petro Kimia Gresik. Pada intinya kami mendukung apa-apa yang ditugaskan oleh Pemerintah. Berdasarkan dari alokasi yang sudah diberikan oleh Pemerintah, maka kita akan menyalurkan dan menyiapkan stoknya. Pada hari ini, hampir semua produk mulai dari FZA, SP36, Urea dan NPK di wilayah-wilayah yang ditugaskan kepada Petro Kimia Gresik stoknya lebih dari 3 kali lipat yang diperlukan dalam 3 minggu ke depan.

Permasalahannya muncul sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Abdullah Tuastikal, yang sering disampaikan kelangkaan pupuk tadi itu Pak. Jadi dapat kami sampaikan Pak, yang terjadi dilapangan adalah seperti ini. Ada ERDKK yang kemudian ditetapkanlah alokasi pupuk berdasarkan APBN

yang ada. Jumlah alokasi secara nasional ini ditetapkan per provinsi melalui SK Permentan. Nah, dari situ dibagi per Provinsi, dari Provinsi keluarlah SK per kabupaten. Nah, dari kabupaten ini, di kabupaten itu baginya baginya adalah per kecamatan oleh camat atau kepala dinas cabang itu tidak lagi dibagi per desa, sehingga yang kita miliki adalah alokasi per kecamatan. Nah, alokasi per kecamatan ini ada distributor-distributor yang kita tunjuk untuk menyalurkan pupuk di kecamatan itu. Nah, sedangkan pengecer atau kios-kios itu pegangnya adalah ERDCK. Sehingga pada saat penebusan itu ada mismatch, disitulah terjadinya kelangkaan.

Terkait dengan kartu tani di tahun 2018 sudah dilakukan percontohan itu ada di beberapa tempat misalnya di Sumenep ada 4 kecamatan. Nah, kalau alokasi tadi tidak dibagi per desa sedangkan kartu tani inikan berdasarkan NIK. Nah, harusnya di kartu tani itu di update datanya, yang meng-update itu mestinya PPL atau KDT-nya. Tapi karena tidak terbagi per desa apalagi membagi per orang, sehingga disitulah kerumitan-kerumitan pelaksanaan penggunaan kartu tani yang kita dapati.

Memang ini saya rasa bukan salah siapa-siapa tapi kami dari Petro Kimia Gresik sebagai bagian dari Pupuk Indonesia Holding Company siap mendukung apapun yang menjadi target dan program Pemerintah Pak.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK KUJANG (BAMBANG EKA CAHYANA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Saya Bambang Eka Cahyana, Direktur Utama PT. Pupuk Kujang.

Kami mendapatkan penugasan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di 2 Provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten, sama 3 kabupaten di Jawa Tengah. Terkait dengan penyaluran pupuk subsidi ini khususnya di Jawa Barat, dapat kami sampaikan persoalan yang kami miliki. Yang pertama, ini memang berkaitan dengan RDCK, jadi RDCK alokasi yang diterbitkan untuk Jawa Barat ini masih berdasarkan ERDCK per 25 Oktober 2019, sehingga kami itu hanya mendapatkan alokasi untuk urea ini sebesar 249 ribu ton dan MPK ini hanya 93 ribu ton yang tadinya 150 ribu.

Nah, dengan alokasi seperti ini di kuartal I tahun 2020 akan ada 2 kabupaten di Pantura yang sudah habis Pak, yaitu Kerawang dan Indramayu ini akan habis di bulan Maret. Kemudian masih juga di Jawa Barat, berbeda dengan provinsi lain, di Jawa Barat ini untuk dasar penyaluran masih menggunakan SK Gubernur dan sampai hari ini RDKK-nya belum ada yang terbit.

Persoalan kedua yang dihadapi oleh Pupuk Kujang ini masih terkait dengan pasokan gas. Kami ini sebenarnya untuk bisa menjalankan 2 pabrik secara efisien memerlukan setiap hari itu 101 ... tetapi kami hanya mendapatkan pasokan 85-90. Jadi ini masih kurang dari kebutuhan....

KETUA RAPAT:

Terus kekurangannya dari mana?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK KUJANG (BAMBANG EKA CAHYANA):

Nah, kami kadangkala harus beli dari PGN dengan harga 8,75 Pak. Jadi kalau kira-kira memang kurang dari 85 karena minimal itu terpaksa kami beli dari PGN. Seperti awal November kemarin, kami selama seminggu terpaksa beli dengan harga 8,75 Pak. Kemudian pasokan untuk kami pun dari PHE ini akan semakin menurun dan di 2021 ini pasokan kepada kami dari PHE ini akan berakhir Pak. Jadi ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pupuk Kujang.

Kiranya demikian Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Langkahnya apa untuk mengantisipasi tadi itu?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK KUJANG (BAMBANG EKA CAHYANA):

Untuk kekurangan gas ini bersama dengan holding company kami sudah menyurati ke Menteri ESDM untuk mendapatkan pengalihan sebesar 35 dari SSBJ Pak. Namun, sekarang ini masih dalam proses karena dari PGN sendiri ini belum mau menurunkan untuk bisa dapat harga sesuai dengan Permen, yaitu 6 Dolar Pak.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau ngomong dengan Menteri ESDM kan paling gampang, kan dulu satu badan.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK KUJANG (BAMBANG EKA CAHYANA):

PGN-nya ini Pak, yang masih belum bersedia. Menteri ESDM sudah mendukung tapi PGN yang masih dicoba dibujuk dari ESDM untuk bisa.

KETUA RAPAT:

Pencet dikit Menteri ESDM-nya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan sampai kartu tani ini terulang keagalannya. Pak Suswono jadi Menteri pernah membuat *pilot project*, kartu pintar diluncurkan di Subang dan Purwakarta. Dengan berapi-api dengan gaya menyampaikan ini pasti berhasil, tidka 6 bulan hilang kartunya. Jadi saya tidak mau ini terulang kembali. Kesuksesan Kementerian Pertanian, holding pupuk itu adalah kebanggaan kami. Bapak sukses kami punya kebanggaan, karena kita adalah mitra. Kenapa saya berkata keras karena saya memang demikian, saya maunya semua transparan, semua dibicarakan secara jelas. Tujuannya apa? kita mencari titik temu yang baik.

Dari dialog, saran dan masukan Anggota Komsis DPR RI, sebelum acara kita akhiri kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada malam ini.

F-PG (H. M. ALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ada yang mau ditanya sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak mau tanya satu jam juga saya tungguin Pak.

F-PG (H. M. ALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ketinggalan saja ini, sekedar mengingatkan kepada Dirjen PSP. Saya mau jawabab konkrit Pak, aspirasi tahun yang lalu itu Pak, kenapa Bapak Darori itu dapat saya tidak. Kalau Bapak Khalid Anggota baru Pak, apakah ada dimarginalkan Ketua, sebab begini Ketua, Ketua tadi baru saya simak, Ketua mau transparan apalagi kalau Abang saya Mindo diminta 3 dikasih 30, saya tidak ada masalah. Ini Bapak Dirjen PSP saya ada dapat Pak, traktor roda 2 41, kombain 3, kombain kecil 1, kombain sedang 1, pronto jagung dengan prontok padi, pompa, semprot elektrik pun yang murah pun tidak dapat Bapak Darori. Mungkin karena saya tidak mau kencang, kalau memang itu yang Bapak inginkan dari sini kedepan khusus untuk Bapak saya kencang.

Saya ingin jawaban Bapak sejujurnya Ketua, kenapa ini barang tidak sampai. Mungkin karena tidak kita tidak ingat-ingatkan, karena apa? sebab tipikal manusia itu Pak Dirjen, tidak sama semua, ada diam hanya menghanyutkan, ada blak-blakan ini sudah apa istilahnya Bapak Khalid tadi konflik. Saya itu saja Bapak Dirjen, mungkin bukan kesalahan di Bapak mungkin lupa. Sedih ini Pak, saya dengar Bapak Sudin dapat 40 traktor besar upama. Kenapa saya 3 saja tidak dapat, saya tahu memang saya tidak

pernah mau minta sama Bapak, ini pun perlu kejelasan Pak. Ini sudah rabut istilah orang Aceh Bapak Khalid, itu juga termasuk pupuk Iskandar Muda kami. Ini CSR kami sama Bapak Khalid tidak pernah diingat, makanya Bapak yang baju bilang yang terhormat Komsis VI DPR RI, paham kita Pak.

KETUA RAPAT:

Namanya Bapak Rahmat.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Rahmat ya, paham kita Pak, Cuma ini kita pun ada ini saya ingin Pak. Sudah itu Pak, indikasi ada alokasi 150 miliar tadi Pak, apa memang betul ke Provinsi Sulawesi Selatan. Ini indikasi saja, sebab begitu Fraksi PDIP mempertanyakan kepada Ketua Komsis, saya terkejut Pak. Kenapa ada tiba-tiba dana 150 miliar, kalau ada 150, 50 kesana, 30 Lampung, 30 Aceh, selesai itu. Jawa Tengah kan sudah banyak kartu pintar apa tadi. Itu Pak, yang saya mau.

Sudah itu masalah kalau ada pembangunan BPP, Bapak bilang 3050, setuju kita Pak, mungkin alokasi anggaran Bapak Ketua. Saya kira asal pandai Bapak mengatakan Komsis IV DPR RI, jadi barang ini Pak. Bapak jumlah Anggota Komsis IV DPR RI tahu Bapak, hafal Pak? jumlah kami hanya 24 Pak, kali dua. Kalau sudah kita bersepakat Pak, anggaran apa yang tidak bisa diapakan, disepakati. Ini Bapak mengajukan ketika nanti dibangun disana, bukan untuk kami untuk mengerjakan proyeknya Pak. Sekedar kami dari Dapil membawa itu, ini ada oleh-oleh. Seolah-olah kami pun Anggota Komsis IV DPR RI yang katanya mitra Bapak nampak disitu Pak. Ada 500 Ketua, pegawai yang mau diangkat, 6000 ya, Komsis IV DPR RI inikan 50 kan 10-10 orang, kan wajar. Bukan kami yang dijadikan pegawai Pak, Cuma orang-orang daerah kami yang kami anggap layak sesuai dengan aturan dan peraturan yang kita ikuti Pak.

Saya kira itu saja Pak Ketua, saya mau jawaban dari Bapak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Dirjen PSP menjawab pertanyaan Bapak Fakhry.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sedikit juga Bapak Ketua, Bapak Suhardi Bapak Ketua.

Yang satunya kan tadi mengenai 3 provinsi ini, Riau, NTB dengan Sulawesi Barat yang tidak dapat jatah bibit jagung, mohon penjelasan.

KETUA RAPAT:

PSP jawab dulu, nanti masalah jagung dijawab.

Silakan.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik, terima kasih Pak.

Jadi semua permintaan Dapil sebenarnya sudah kami tugaskan Direktur Alat Mesin Pertanian. Mungkin ada yang ketinggalan tapi hutang 3 TR 4 ini akan kami penuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin untuk tadi 3 provinsi, mungkin Dirjen Ketahanan Pangan akan....

KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ijin Bapak Pimpinan, tadi sebenarnya sudah dijawab 3 provinsi terkait benih jagung hibrida di 3 provinsi. Ijin lapor, sesuai evaluasi kami kinerja di lokasi itu kegiatan jagung bermasalah dan kurang bagus, sehingga kami tidak alokasikan di lokasi itu tetapi alokasinya masih cukup di taruh di pusat, sehingga kami amankan supaya betul-betul nyampai kepada masyarakat dengan baik. Jadi kalau ada usulan masih tetap berjalan untuk petani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Artinya tetap ada bibit itu ya Pak, kan ada masalah di daerah sehingga dicabut ke pusat. Saya setuju Pak, itu.

KETUA RAPAT:

Tadi ada pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Salin Fakhry mengenai 150 miliar untuk wilayah Sulawesi Selatan tolong dijawab. Siapa yang mau jawab silakan.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik, Bapak Pimpinan.

Mungkin kami salah ya, jadi atas nama Bapak Sekjen mohon maaf. Tentunya mengapa itu sebenarnya wacana, bukan wacana jadi alokasi untuk Sulawesi Selatan di tahun 2020 ini. Hanya memang pas acara disana jadi secara simbolik menyampaikan ada alat mesin pertanian, ada benih padi, benih jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang dan seterusnya. Mungkin nilainya lebih kurang sebesar itu.

Dasarnya apa? jadi Biro Perencanaan, Bapak Sekjen dan kami semua kami hanya berpikir bahwa Undang-Undang APBN itu kan berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Mungkin penjelasan saya yang salah, mohon maaf. Sehingga begitu keluarnya DIPA itu otomatis menurut kami bisa dilaksanakan. Mungkin salah gitu ya, oleh karena itu pada kesempatan ini kami jelaskan. Namun, kalau memang ternyata pertanyaan kami salah ya mohon dimaafkan dan tidak akan terulang lagi kedepan. Termasuk nanti mungkin minggu depan itu ada kunjungan Presiden ke Lampung dan memang disitu diminta ada yang harus diserahkan juga simbolis ke Pemda, mungkin akan kami jelaskan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Bapak Pimpinan, sedikit Pimpinan.

Tidak salah Pak, Cuma begini sebagaimana disampaikan kita ini bukan mitra Cuma dipembahasan anggaran. Apa salahnya, kami sudah bersepakat ini tidak berbicara partai, tidak berbicara partai di Komsu ini, berbicara kebersamaan. Alangkah indahnya begitu ada sesuatu kegiatan disana, dikordinasi dengan Pimpinan, sehingga ada teman kami Anggota Dewan Sulsel. Dia juga punya marwah, yang paling mahal di kita ini bukan uang, bukan pangkat, tapi saling menghargai. Saya melihat dan membaca di group, saya sebenarnya tidak ... saya dari Aceh, tapi melihat bagaimana puncatnya wajah teman-teman tanpa mengetahui ada pembagian itu, mari kita saling menghargai, *insya Allah*.

Terima kasih.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Tambahan Ketua, Bapak Dirjen tidak salah itu Pak, wajar itu Pak. Macam ini ke Lampung, bukan karena Ketua orang Lampung. Siapa pun nabi pun mengatakan Pak, selamatkan sebelahmu baru orang lain. Cuma kalau kita sudah begini Pak, termasuk Alsinta ini Pak, apa salahnya musyawarah kita. Jangan ketika di Bapak, 1 Januari boleh. Ini 6000 alat apa salahnya sama Bapak 1000 sama kami 5000, umpama Bapak Ketua. Ini bukan pasti, jangan ini saya pegang Pak, wajar itu Pak, bukan kita tidak menghargai seorang Bapak Menteri, putera sana, siapa pun begitu Pak.

Coba Bapak tengok masalah setifikat-sertifikat, kalau di Aceh Bapak Sofyan Jalil cepat semua itu Pak, wajar. Bapak tidak salah mengungkapkan itu Pak, jangan terlampau takut "kalau saya salah", Bapak tidak salah. Bapak tambah lagi ini mau kungsi Presiden ke Lampung karena Pimpinan, wajar itu. Masa seorang Pimpinan tidak ada lebihnya dengan Anggota, Cuma yang kami pegang gini Pak. Kalau mau musyawarah itu gampang Pak, gampang semua ini, tidak ada kita rapat-rapat lagi Ketua, macam ini sampai Subuh tidak usah lagi, asal sudah sepakat. Ini tidak mau Bapak, cuma mau kami tolong diakomodir, kami pun bukan untuk kami Pak, membantu Bapak Dirjen Cuma kami ini orang politik. Ketika Bapak Jokowi dulu calon Presiden "saya akan bangun jalan tol", bangun wajar. Siapa pun begitu Pak, kalau Bapak

Dirjen tidak usah takut kali kalau salah, sayang Bapak Limpo sama Bapak itu. Cuma Bapak pun harus sayang dengan mitra, bukan karena Bapak Limpo itu orang Nasdem, itu orang Golkar kami titipkan ke Nasdem itu.

Jadinya itu saja Pak, kalau Pak Dirjen apa ini Tanaman Pangan, begitu ada banjir tidak usah takut NTB tadi, asal jelas prosedur beliau kasih Pak. Saya sudah buktikan itu Pak, kalau dapat pujian di depan forum ya meningkatlah bantuan itu Pak.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi sebetulnya kejadian masalah 150 miliar melampaui wewenang. Saya kalau ditanya secara pribadi saya tersinggung, orang belum ada pembahasan kok tahu-tahu sudah ada. Jadi saudara Dirjen tidak usah berbelit-belit, bilang saja itu pelantikan anaknya Menteri jadi Ketua Umum, itu saja tidak usah muter-muter. Orang pelantikan anaknya Menteri sebagai Ketua Umum, wah ini nanti dapat ini, dapat ini, yang lain juga akan complain Anggota. Ibu Musdalifah tadi yang dikatakan itu mengenai Bansos Bu, jadi kami kalau pulang ke Dapil...

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, kalau itu dibagikan terkait dengan pelantikan Garnita saya protes.

KETUA RAPAT:

Loh, ini ada beritanya.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Ini bukan urusan partai, harap diklarifikasi ini. Kalau terkait Garnita itu kan Naasdem, ini bukan urusan partai.

KETUA RAPAT:

Tidak ada Bapak Surya Paloh kesana.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sory, teman-teman Nasdem, kalau seperti ini tidak benar kita mengatur negara ini. Catatan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Siap Pak Mindo.

Jadi Ibu Musdalifah ini mengenai penyaluran bantuan. Jadi kalau kami pulang ke kampung, kami ditanya Anggota Dewan apa gunanya Gapoktan kami butuh hand tractor bisa tidak minta sama Kementerian? Bisa, kami hanya membawa proposal kepada Kementerian. Kami tidak pernah ikut campur masalah, tahu-tahu barang tersebut ada di kecamatan. Kami hanya numpang kasih baju dan numpang pengawasan, supaya jelas ini nanti permasalahan. Nanti Ibu berprasangka lain lagi kan, seolah-olah kami apa tidak, itu saja.

Jadi tadi saudara Dirjen anda tidak salah, Cuma semalam saya WA karena saya langsung ditegur oleh Fraksi saya, ada Bapak Mindo itu. Kurang lebih "Ketua Komsis IV DPR RI kemana ya", katanya. Itu saja pertanyaannya, memang sederhana sekali.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sedikit lagi Bapak Ketua.

Ini saya juga dapat informasi soal Sulsel menyangkut benih jagung. Informasi pertama itu angkanya di 75 ribu hektar, lalu naik jadi 91 ribu hektar, terakhir itu jadi 180 ribu. Saya mau tanya dasarnya apa Pak? kalau ditanya ini juga Kepala Dinas Provinsinya juga kaget bisa jadi sampai 180 ribu. Saya ingin tahu saja dasarnya itu apa, apa sesuai dengan kebutuhan disana Pak, atau bagaimana ini Pak, supaya tidak ada firnah, tidak ada kecurigaan karena saya pegang datanya ini per kabupaten, 24 kabupaten kota ada disini Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mau dijawab?

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Terima kasih.

Untuk alokasi itu memang diplot seluruh Provinsi ada alokasi. Tapi realisasi nanti bottom up dari usulan petani ada penyuluh ke kabupaten, ke provinsi itulah namanya untuk direalisasikan usulan JPJN. Jadi alokasi belum tentu keserap semua, kalau tidak terserap bisa direlokasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tadi persoalannya bukan gitu Bapak Wandu, anda juga jangan berbelit-belit. Persoalannya tadi dari sekian puluh ribu naik 90 ribu, naik jadi 180 ribu itu dasarnya darimana. Saya juga paham kalau gitu Pak, dasarnya dari mana, belum berjalan, belum dibahas sama eselon I dengan Komsis IV DPR RI kok

ada 3 kali kenaikan. Ini loh Pak, pertanyaan Bapak Hansi Lema tadi, dari mana, paham Bapak. Ya sudah Bapak tidak perlu jawablah, percuma nanti jawab juga nanti makin blunder jawabnya.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit lagi Ketua, saya kira apa yang dikatakan Bang Mindo tadi sebagai orang tua untuk mengingatkan kepada personil Kementerian Pertanian. Sebab di Kementerian Pertanian tersebut tidak ada yang main-main politik, Undang-Undang menyatakan ASN pilihan ada, Cuma kalau ini sudah dipolitisir dengan permainan politik awal-awal tahun anggaran pun yakinlah apa yang dikatakan senior tadi Bang Mindo mengelola negara ini bisa jadi amburaduk. Ini jadi pelajaran walaupun Bapak Dirjen tadi tidak salah, walaupun agak-agak ketakutan. Ini menjadi pelajaran bagi kita, silakan Bapak mau coblos partai mana, dukung mana silakan. Cuma 4 ini yang ada fraksi Komsis DPR RI, kalau soal yang berkuasa Pak Sudin yang berkuasa di Pemerintahan sekarang, kita nomor dua yang lain di belakang, mohon maaf.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, untuk kedepan saya kira sekaligus juga menolong eselon I ini kita proporsionalkan program itu. Jangan-jangan Sulawesi Selatan cocoknya 1.250 hektar untuk jagung, tetapi pada saat yang sama di daerah Dapil di Jawa Timur kalau disana 250 1 juta setengah, kan begitu. Kalau di Sulawesi Selatan 250 ribu untuk jagung, berarti di Lampung setidaknya 400 ribu, ditempatnya Johan sekitar 700 ribu di NTB sana. Jadi kalau dibuat aturannya seperti tidak ada khawatir, tidak ada kecurigaan apapun, kita bangun sama-sama daerah ini. Jadi saya kira Pak Ketua Komsis jangan ada rapat lebih lanjut kalau pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab tertulis, diadakan rapat apapun dengan Kementerian Pertanian sebelum pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab secara tertulis, harus kita atur dari awal bagaimana pertanian ini kita bangun.

Terima kasih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN S.T.):

Pak Ketua, Johan Pak Ketua.

Terima kasih Informasinya Pak Suhardi Duka.

Saya baru mengerti sekarang kenapa Pak Kades pertanian saya menitip proposal benih kesaya, ternyata NTB sama dengan Sulawesi Barat tidak dikasih jatah.

KETUA RAPAT:

Kasih juga ya Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN S.T.):

Iya, padahal di NTB itu adalah pusat jagung terutama Dapil saya Sumbawa dan Dompu. Karenanya mungkin saya akan serahkan ke Bapak nanti proposalnya sesuai dengan permintaan Kepala Dinas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya cukup ya teman-teman semua, kita bacakan kesimpulan rapat.

1. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah segera mengeluarkan validasi data baku luas sawah yang akan digunakan sebagai acuan jumlah kuota dan pagu alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2020. Selanjutnya Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah melakukan validasi data Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok tani elektronik (ERDKK).

Setuju Pemerintah?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan.

Kata “segera” itu nampak perlu di definitifkan Pak Ketua, sehingga kita memberikan target waktu kan. Waktu Rapat Kerja awal ketika kemudian Menteri dengan menggebu-gebu menyampaikan target, kalau tidak salah satu setengah bulan akan memberikan validasi data. Nah, oleh karena itu usulan saya segera itu di definitifkan dalam bentuk waktu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet, kalau mereka validasi datanya tidak, iya kita engga ketok nanti waktu Rapat Kerja, gitu aja iya kan. Kita kan Eselon I kita bahas dulu ini, kalau mereka engga ada data yang tepat maka kan sengaja saya mundurin terus ini rapat dengan Eselon I sampai ada validasi dikeluarkan oleh ATN, BPN dan BPS.

Pemerintah dijawab Pak, karena langsung direkam Pak.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Siap Pak, setuju Pak segera.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah agar penyaluran Pupuk bersubsidi melalui kartu tani ditetapkan secara bertahap, hingga dilakukan perbaikan infrastruktur penyaluran Pupuk bersubsidi dan perlu dilakukan perbaikan sistem dengan menggunakan prinsip memberi kemudahan bagi Petani.

Anggota?

Pemerintah?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung Pemerintah meningkatkan pengawasan program subsidi pupuk untuk mengantisipasi muncul permasalahan baru, baik di Pusat maupun di Daerah.

Anggota?

Pemerintah?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah agar wilayah Jawa dan Madura sebagai *pilot project* pemberlakuan program kartu tani, sebelum pemberlakuan kartu tani nasional direalisasikan. Selanjutnya Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, meminta Himbara untuk meningkatkan kinerjanya terkait pelaksanaan kebijakan kartu tani, serta melakukan sosialisasi penggunaan kartu tani.

Anggota?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan.

Biar tidak nanti menjadi hambatan, kita memberikan tadi seperti pembicaraan bahwa ada daerah khusus untuk *pilot project* tidak keseluruhan Pimpinan. Kalau Bahasa Jawa dan Madura seluruh tuh, Jawa dan Madura itukan luar berapa puluh Kabupaten Kota-nya. Artinya ada yang difokuskan atau ditambah dengan Bahasa agar wilayah Jawa dan Madura atau daerah yang dikhususkan sebagai *pilot project*. Jadi ada kata dapat itu sebagai kata fakultatif untuk dipilih oleh Pejabat Negara-nya.

Terima kasih Pimpinan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN S.T.):

Pak Ketua tadi, Johan-Johan.

Tadi Ibu menjelaskan bahwa yang aktif mengusulkan itu adalah Jawa Tengah dan NTB, harusnya yang dijadikan *pilot project* itu salah satunya NTB.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Masalah begini Pak Johan, NTB apakah siap infrastruktur telekomunikasinya?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN S.T.):

Oh, di semua Kecamatan sudah ada BTS-nya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, kalau itu masukan saja.

Jawa, Madura dan NTB.

Anggota?

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Ini Pak mungkin kalau di NTB bisa Pak, tapi hanya untuk lokasi tertentu dulu Pak. Jadi tidak perlu semua NTB Pak, karena memang tadi infrastruktur belum siap.

KETUA RAPAT:

Kira-kira diusulkan Kecamatan mana atau Kabupaten mana Bu?

Ibu ngomong Kabupaten mana?

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Subawa Barat iya, nanti kita bisa kerja sama nanti Pak untuk memfasilitasinya Pak.

KETUA RAPAT:

Engga, ini mau dimasukan dalam kesimpulan rapat Bu.

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Iya Pak masukan saja, nanti kami mohon dukungannya Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Johan usulkan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN S.T.):

Kabupaten Ketua bahwa Sumbawa Barat.

KETUA RAPAT:

Oke, masukan saja.

DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN KEMENKO PEREKONOMIAN (Ir. MUSDHALIFAH MACHMUD, M.T.):

Iya, dalam kurung Sumbawa Barat (NTB).

KETUA RAPAT:

NTB-nya dihapus.

Sudah dibaca?

Pemerintah sudah baca?

Saya baca ulang.

4. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah agar wilayah Jawa, Madura, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sebagai *pilot project* pemberlakuan program kartu tani sebelum pemberlakuan kartu tani nasional direalisasikan. Selanjutnya Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Himbara untuk meningkatkan kinerjanya terkait pelaksanaan

kebijakan kartu tani, serta melakukan sosialisasi penggunaan kartu tani.

Pemerintah?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah dan Lembaga Penelitian untuk melakukan uji laboratorium pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi seluruh BUMN yang bertugas menyalurkan pupuk nasional.

Anggota?

Pemerintah?

Holdings?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah untuk mengantisipasi kasus kurang barang dan terlambat bayar dengan sistem verifikasi secara online, sehingga hasilnya lebih akurat dan antisipasinya dapat dilakukan lebih dini.

Anggota?

Pemerintah?

F-PAKS (drh. H. SLAMET):

Sebentar Pak, Pimpinan saya bisa tarik kata sedikit Pimpinan, nomor 5 terkait dengan laboratoriumnya apakah tidak perlu disebut. Jadi ini Komsis IV DPR RI sudah trauma dengan Sucopindo, sehingga saya pikir perlu menyebut lembaga itu supaya kredibilitasnya diakui juga oleh Komsis IV DPR RI.

Terima kasih Pimpinan, untuk nomor 5.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet saya rasa tidak perlu disebutkan yang sudah pasti kita tidak pakai Sucopindo, gitu aja.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ini menjadi catatan buat Pemerintah.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Mohon izin Bapak Pimpinan,
Kaitan dengan kurang bayar apa itu domennya Kementerian
Keuangan?

KETUA RAPAT:

Iya, sudah hapuskan saja yang nomor 6.
Ini yang nomor 6.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta PT. Pupuk Indonesia Holding Company bertanggung jawab terhadap pemalsuan dan penyimpangan distribusi pupuk ditingkat distributor pengecer. Selanjutnya Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah untuk mengefektifkan kinerja Komsis Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) sehingga Petani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan 6 prinsip, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

Anggota?

Pemerintah?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

7. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memintan Pemerintah dan PT. Pupuk Indonesia Holding Company segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi tingginya harga gas bahan baku pupuk bersubsidi.

Anggota?

Pemerintah Holding?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Untuk gas ini domainnya Kementerian Keuangan Pak dan ESDM.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, biar clear juga Dirjen ini memahaminya, engga ada disitu Kementean Pertanian yang disebut itu Pemerintah. Jadi point yang empat tadi bu tentang kurang bayar itu, itu harus masuk. Iya itulah nanti alasannya anggota Komsis IV yang masuk badan anggaran iyato mendonors disana dibadan anggaran "Hai Menteri Keuangan, kapan dibayar ini? ini sudah menyusahkan pabrik pupuk, akibatnya pelayanan mereka terhadap Petani terluntah-luntah", Itu misalnya, kata-katanya. Jadi dikembalikan lagi, itu juga begini seperti itu. Ini mempersoalkan harga gas.

KETUA RAPAT:

Jadi bukan Kementan maksudnya?

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Bukan iya, Pemerintah iya, oke.

KETUA RAPAT:

Kurang bayar dimasukan paling bawah saja, engga apa-apa.

Nomor 7 setuju Pemerintah?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

8. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah melakukan kajian mengenai penerapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui (bumdes), sesuai tadi usulan dari anggota Komsis IV DPR RI. Selanjutnya Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar hasil kajian disampaikan pada Rapat Kerja pertama dengan Menteri Pertanian berikutnya.

Ini usulan dari anggota.

Pemerintah?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Sebentar saya baca dulu.

KETUA RAPAT:

Rapat Kerja berikutnya saja.

Berikutnya saya rasa engga perlu juga, dihapus saja.

Anggota?

Pemerintah?

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Setuju Bapak.

KETUA RAPAT:

9. Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah untuk mengantisipasi kasus kurang bayar dan terlambat bayar dengan system verifikasi secara online, sehingga hasilnya lebih akurat danantisipasi dapat dilakukan lebih dini.

Anggota?

Pemerintah?

Holding?

Kalau holding memang kepengen ini, saya paham, jadi engga perlu ditanya. Coba tanya, gini-gini ketawa semua kalau saya bilang suruh bayar, karena 12,2 triliun.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Mohon izin pak,

Definisi dari Pupuk Holding itu kurang bayar itu sama dengan terlambat bayar, gitu pak ya?

KETUA RAPAT:

Iya sama kurang bayar sama terlambat bayar.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Ngomongnya aja, jangan dan begitu.

Mengantisipasi kurang bayar dengan system, kan itu sam artinya Pak. Garis miring, mungkin garis miring.

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN S.T.):

Pak Ketua, ada satu menurut saya ini yang belum masuk, yaitu soal opservasi peran penyuluh. Kita banyak tadi berbicara tentang penyuluh dan tenaga pendamping lainnya dalam konteks pendampingan terhadap petani dalam kartu petani ini.

KETUA RAPAT:

Pak Johan ini konteksnya adalah RDP tentang Kartu Tani dan Pupuk, bukan dengan penyuluh. Nanti pada waktu rapat dengan Eselon I, engga, nanti waktu rapat dengan Eselon I itulah dimasukan yang Pak Johan tadi ngomong, tapi nanti waktu rapat dengan Eselon I.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN S.T.):

Terima kasih Ketua.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan sebelah sini Pimpinan.

Usul dikesimpulan atau dicatatan bahwa tadi kita ingin memastikan *pilot project* yang sudah berjalan tadi disebut itu sudah berjalan, oleh karena itu menjadi kesimpulan itu untuk kita konspek ke daerah yang pilot project itu.

KETUA RAPAT:

Tadi kalau engga salah sudah dibuat.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Belum.

KETUA RAPAT:

Ada, tunggu. Yang *pilot project* tadikan?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bukan *pilot project* yang akan datang Pak, kan tadi disebut-sebut oleh Ibu Deputy tadi. Iya, bahwa dia sudah berhasil begini-begini, oleh karena itu kita juga perlu memastikan bahwa itu tidak hoax, begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya rasa engga perlu Pak Slamet, kita langsung buat Kunspek saja.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya pikir untuk mengikat menjadi penting kalau pun tidak di kesimpulan di catatan rapat kita hari ini Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya boleh, terima kasih.

Terima kasih atas tanggapannya.

Apakah dalam kepanjangan kesimpulan rapat hari ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat malam ini, kami persilahkan saudara Dirjen PSP mewakili undangan untuk menyampaikan kata penutup dalam RDP ini.

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik terima kasih.

Bapak Pimpinan, Bapak Anggota Komsis IV DPR RI.

pada kesempatan ini yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas saran, masukan dan kesimpulan rapat pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat segera kami tindak lanjuti, khususnya kaitan dengan Kementerian Pertanian sehingga kebijakan kaitan dengan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi termasuk di dalamnya pelaksanaan program kartu tani secara bertahap yang tadi sudah disampaikan Jawa, Madura, NTB meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dapat kita laksanakan

dengan sebaik-baiknya. Juga hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan pupuk bersubdi ini dapat kita laksanakan kedepan dengan lebih baik.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih dan mohon dimaaf tentunya kalau ada hal-hal yang kurang tepat, sehingga mengganggu apa namanya Bapak Ibu sekalian.

Demikian lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komsis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.20 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001